

**POKOK-POKOK KEBIJAKAN**



# **RENCANA STRATEGIS**



**PALANG MERAH INDONESIA**

**2019-2024**



**SAPTA KARSA  
POKOK-POKOK KEBIJAKAN  
DAN  
RENCANA STRATEGIS PMI 2019-2024**



# DAFTAR ISI

Prinsip-Prinsip Dasar Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah	3
Kata Pengantar .....	4
Pokok-Pokok Kebijakan dan Rencana Strategis PMI Tahun 2019-2024	
A. Pendahuluan .....	5
B. Kerangka Rencana Strategis .....	8
C. Analisis Lingkungan Strategis .....	9
D. Rencana Strategis PMI Tahun 2019-2024 .....	14
E. Rencana Operasional PMI Tahun 2019-2024	
Tujuan Strategis-1 .....	18
Tujuan Strategis-2 .....	21
Tujuan Strategis-3 .....	24
Tujuan Strategis-4 .....	26
Tujuan Strategis-5 .....	29
Tujuan Strategis-6 .....	32
Tujuan Strategis-7 .....	35
F. Kerangka Monitoring dan Evaluasi .....	37
G. Penutup .....	37
Lampiran:	
▪ Indikator Kunci Kinerja Rencana Strategis 2019-2024	39
▪ Rencana Operasional dan Daftar Rujukan Kegiatan	48



## **Prinsip-Prinsip Dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional**

### **Kemanusiaan**

Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional lahir dari keinginan untuk memberi bantuan tanpa diskriminasi kepada mereka yang terluka di medan pertempuran, berusaha untuk mencegah dan meringankan penderitaan manusia di mana pun dalam lingkup kapasitas internasional dan nasional.

Tujuannya adalah untuk melindungi kehidupan dan kesehatan serta untuk menjamin penghormatan terhadap manusia. Gerakan ini mendorong saling pengertian, persahabatan, kerja sama, dan perdamaian abadi di antara semua bangsa.

### **Kesamaan**

Tidak ada diskriminasi untuk bangsa, ras, agama, kelas atau pendapat politik. Gerakan ini berusaha meringankan penderitaan individu, yang hanya dipandu oleh kebutuhan mereka, dan memberikan prioritas kepada kebutuhan yang paling mendesak.

### **Kenetralan**

Untuk memperoleh kepercayaan dari semua pihak, Gerakan ini tidak memihak dalam permusuhan atau terlibat dalam kontroversi yang bersifat politik, rasial, keagamaan atau ideologi.

### **Kemandirian**

Gerakan ini bersifat mandiri/independen. Perhimpunan Nasional, walaupun merupakan perpanjangan tangan pemerintah dan tunduk pada hukum negara masing-masing, harus selalu menjaga otonomi yang dimiliki sehingga mereka dapat bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip Gerakan setiap saat.

### **Kesukarelaan**

Gerakan ini adalah gerakan bantuan sukarela, yang tidak didorong oleh keinginan untuk mendapatkan keuntungan dalam bentuk apa pun.

### **Kesatuan**

Hanya ada satu Palang Merah atau Bulan Sabit Merah di dalam satu negara. Lembaga ini harus terbuka untuk semua. Lembaga ini harus menyelenggarakan pelayanan kemanusiaan di seluruh wilayahnya.

### **Kesemestaan**

Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, yang menjunjung status yang sama serta tugas dan tanggung jawab yang sama bagi seluruh perhimpunannya, saling membantu satu sama lain, di seluruh dunia.





## **KATA PENGANTAR**

Sudah 74 tahun tak teras Palang Merah Indonesia (PMI) telah mengabdikan dan mengantarkan jasa bagi masyarakat di persada Indonesia. Berbagai pengalaman dan catatan telah ditorehkan, baik berupa kelemahan maupun kelebihan serta peluang maupun tantangan, namun PMI tetap ada dan akan terus mendarmabaktikan diri bagi segenap rakyat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peran PMI sebagai mitra bagi pemerintah, dengan tetap menjaga kemandirian dan kenetralan dalam penyelenggaraan Kepalangmerahan kepada masyarakat, sangat penting untuk dipertahankan. Meski tidak dapat dipungkiri bahwa PMI belum optimal dalam mencapai tujuan. Analisa kondisi internal dan eksternal secara nyata memperlihatkan bahwa belum semua PMI Provinsi dan Kabupaten/Kota mampu menunjukkan jati diri sebagai organisasi kepalangmerahan yang mandiri, unggul, terstruktur, memiliki kapasitas, dan sumber daya yang berkualitas.

Selama 73 tahun sejak lahirnya Perhimpunan Palang Merah Indonesia (PMI), PMI bekerja dan berbakti untuk kemanusiaan hanya dengan berlandaskan Keputusan Presiden No. 25/1950 dan Keppres No. 246/1963. Sejak tanggal 9 Januari 2018, dengan diterbitkannya Undang-undang No.1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerhan, PMI memiliki landasan hukum Organisasi yang lebih kuat dan tentunya akan melaksanakan tugas yang tertuang dalam UU No.1 tahun 2018, BAB V, bagian kesatu, pasal 22, yang meliputi:

- a. Memberikan bantuan kepada korban Konflik Bersenjata, kerusuhan, dan gangguan keamanan lainnya;
- b. Memberikan pelayanan darah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Melakukan pembinaan relawan;
- d. Melaksanakan Pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan Kepalangmerahan;
- e. Menyebarkan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Kepalangmerahan;
- f. Membantu dalam penanganan musibah dan/atau bencana di dalam dan di luar negeri;
- g. Membantu pemberian pelayanan kesehatan dan sosial; dan
- h. Melaksanakan tugas kemanusiaan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah;

Pelaksanaan tugas tersebut secara lebih rinci dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 2018 tentang Kepalangmerahan.

Dengan diterbitkannya Perundang-Undangan Kepalangmerahan, konsekuensinya, PMI perlu merumuskan kembali Visi, Misi, dan Pokok-Pokok Kebijakan secara komprehensif, terarah dan berkelanjutan. Untuk itu, Visi, Misi dan Pokok-Pokok Kebijakan PMI perlu dilaksanakan dalam jangka panjang (5 tahun) dan diarahkan pada tugas-tugas sebagaimana yang dimandatkan oleh Undang-undang No. 1 Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2019. Walaupun demikian, PMI kedepan juga harus mampu menyesuaikan diri terhadap fenomena globalisasi dan dinamika kehidupan di dalam negeri yang dapat mempengaruhi eksistensi dan keberlangsungan organisasi PMI. PMI harus lebih menunjukkan keunggulan, prinsip netralitas dan kemandirian, serta bergerak bersama dengan masyarakat.

Pokok-Pokok Kebijakan dan Rencana Strategis ini menjadi acuan bagi seluruh Sumber Daya Manusia PMI di setiap tingkatan untuk merumuskan program dan kegiatannya. Untuk mewujudkan harapan tersebut, sungguh penting keteguhan akan komitmen dari segenap komponen PMI dengan dilandasi atas niat untuk mengabdikan yang tinggi serta diwujudkan dalam aktivitas nyata di dalam menggerakkan jalannya roda organisasi, agar berfungsi baik hingga akhirnya menjadi organisasi kepalangmerahan yang profesional, netral, mandiri, dan bergerak bersama masyarakat memberikan pelayanan kemanusiaan.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa membimbing niat tulus akan pengabdian dan komitmen kita untuk kemajuan PMI yang kita cintai dan memberkahi kita bersama. Amin.

Pengurus Pusat  
PALANG MERAH INDONESIA  
Ketua Umum





# **POKOK-POKOK KEBIJAKAN DAN RENCANA STRATEGIS PALANG MERAH INDONESIA TAHUN 2019-2024**

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. LATAR BELAKANG**

Musyawarah Nasional (Munas) XXI Palang Merah Indonesia (PMI) tahun 2019 yang terselenggara di Jakarta pada tanggal 16-18 Desember 2019 telah memutuskan beberapa hal di antaranya sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Musyawarah Nasional XXI PMI nomor 7/MUNAS-XXI/XII/2019 tentang Pokok-pokok Kebijakan dan Rencana Strategis PMI, tanggal 17 Desember 2019, yang menyatakan bahwa Munas memutuskan:

- a. Menetapkan Pokok-pokok Kebijakan dan Rencana Strategis PMI tahun 2019-2024;
- b. Mewajibkan kepada Pengurus Pusat PMI masa bakti tahun 2019-2024 untuk menjabarkan Pokok-pokok Kebijakan dan Rencana Strategis tersebut dalam bentuk Program Kerja Tahunan PMI; dan
- c. Mengamanatkan kepada Pengurus PMI Provinsi dan Pengurus PMI Kabupaten/Kota untuk menjabarkan Rencana Strategis PMI ke dalam Pokok-pokok Kebijakan PMI Provinsi dan PMI Kabupaten/Kota pada saat Musyawarah Provinsi dan Musyawarah Kabupaten/Kota.

Sebagai langkah awal dalam rangka menjabarkan sebagaimana dimaksud pada butir a dan b di atas, dipandang perlu terbitnya suatu dokumen/buku mengenai Pokok-pokok Kebijakan dan Rencana Strategis PMI tahun 2019-2024 untuk menjadi acuan.

### **2. PENYUSUNAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN DAN RENCANA STRATEGIS PMI TAHUN 2019 - 2024**

Penyusunan Pokok-pokok Kebijakan dan Rencana Strategis PMI tahun 2019-2024 telah melalui berbagai tahapan, yakni:

- |           |   |   |
|-----------|---|---|
| Tahap I   | : | Pembentukan Kelompok Kerja, guna menyusun Rancangan Pokok-pokok Kebijakan dan Rencana Strategis PMI tahun 2019-2024 sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Umum PMI nomor XXX/KEP/PP PMI/II/2019 tentang Pembentukan Tim Persiapan Materi Musyawarah Nasional PMI tahun 2019 pada tanggal 11-12 Februari 2019. |
| Tahap II  | : | Pembahasan Rancangan Pokok-pokok Kebijakan dan Rencana Strategis PMI tahun 2019-2024, sesuai dengan rekomendasi Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PMI tahun 2019 yang telah diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 16 Oktober 2019.   |
| Tahap III | : | Pengajuan dan Penetapan Rancangan menjadi Pokok-pokok Kebijakan dan Rencana Strategis PMI tahun 2019-2024 yang di sahkan di dalam forum Musyawarah Nasional XXI PMI pada tanggal 17 Desember 2019 di Jakarta.   |

### **3. DASAR PEMIKIRAN**

Dalam periode 2010-2019, Indonesia telah mengalami berbagai peristiwa bencana alam skala besar seperti banjir bandang Wasior, letusan Gunung Merapi, tsunami di Mentawai yang terjadi dalam waktu berdekatan (Oktober 2010), gempa bumi Lombok, gempa-tsunami dan likuifaksi Sulawesi Tengah serta Tsunami Selat Sunda (periode Agustus-Desember 2018) telah semakin menyadarkan kita bahwa Indonesia merupakan wilayah yang sangat rawan terhadap berbagai jenis ancaman alam. Disamping itu, kerugian akibat bencana alam juga terbatas pada akibat langsungnya seperti, kerusakan, korban jiwa, kehilangan harta benda, kesakitan, tetapi juga berdampak pada pemiskinan terhadap korban bencana, terutama anak-anak yang kehilangan kesempatan hidup lebih sejahtera.

Menanggapi berbagai peristiwa bencana alam tersebut, Palang Merah Indonesia (PMI) telah mengupayakan berbagai tindakan, mulai dari menggerakkan kapasitas lokal, mengerahkan Relawan potensi nasional hingga mengkoordinasikan dukungan internasional, khususnya dari Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Pada saat yang sama, berbagai pihak pemerhati kebencanaan di Indonesia, termasuk pemerintah Indonesia di semua tingkatan, juga telah mengerahkan semua potensi yang dimilikinya merespon situasi darurat tersebut di atas. Semakin jelas bahwa dalam pengurangan resiko bencana dan respon bencana, PMI kini berada dalam pada lingkungan yang dinamis dan terus berkembang. Ke depan, sesuai dengan tugas-tugas yang diamanatkan dalam UU No.1 2018 serta Peraturan Pelaksananya, PMI perlu melakukan reposisi untuk untuk mempertegas peran yang khas dalam konteks pelayanan kemanusiaan secara nasional.

Di samping ancaman bencana, Indonesia juga masih banyak menghadapi berbagai masalah sosial-ekonomi yang dihadapi kelompok masyarakat tertentu, yang kurang beruntung atau tidak memperoleh manfaat langsung dari gerak pembangunan, bahkan terpinggirkan. Situasi yang tidak menguntungkan ini telah melahirkan kelompok masyarakat rentan, yang jumlahnya semakin banyak dan tersebar luas di seluruh wilayah Indonesia. Ke depan, PMI juga perlu menetapkan peranan yang khas dalam hubungannya dengan kelompok rentan dan terpinggirkan ini.

Posisi Indonesia yang terletak antara dua benua dan dua samudra, disamping memiliki manfaat strategis juga memiliki konsekuensi kerawanan tertentu sebagai dampak dari lalu lintas pergerakan manusia, ekonomi, perdagangan, politik antar kawasan. Kaum migran tidak berdokumen, baik karena masalah politik-keamanan di negeri asal maupun motif ekonomi, semakin meningkat jumlahnya. Lalu lintas pergerakan manusia ini bisa jadi juga membawa potensi penyakit lintas kawasan (pandemik) sebagaimana pengalaman diwaktu lalu (Avian Flu, SARS). PMI tentunya tidak akan menyentuh isu politik, hukum, kesehatan yang menjadi domain Pemerintah, tetapi juga tidak dapat menutup mata terhadap aspek-aspek kemanusiaan yang timbul karenanya.

PMI sebagai organisasi sosial-kemanusiaan terbesar di Indonesia dan dalam rangka melaksanakan fungsi *auxiliary role to the government* perlu ikut serta dan menyikapi permasalahan-permasalahan besar ini. Dengan terbitnya UU No.1/2018 dan PP No.7/2019, maka fungsi *auxiliary role to the government* ini dapat dilaksanakan dengan tetap berkoordinasi dengan Pemerintah, khususnya sektor-sektor yang terkait dengan kegiatan-kegiatan PMI.

Walaupun demikian, eksistensi PMI yang telah memperoleh apresiasi dan dukungan dari masyarakat lokal, nasional dan internasional, perlu dipertegas dan diperkuat dalam menjalankan mandatnya sebagai organisasi sosial kemanusiaan sesuai Prinsip-prinsip Dasar Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, yaitu, Kemanusiaan, Kesamaan, Kenetralan, Kemandirian, Kesukarelaaan, Kesatuan, Kesemestaan, dan khususnya dalam rangka berpartisipasi menjawab permasalahan-permasalahan nasional ini.

Perlu diperhatikan pula bahwa masyarakat Indonesia kini semakin kritis terhadap berbagai inisiatif pembangunan, termasuk di bidang sosial-kemanusiaan. PMI yang sangat mengandalkan dukungan dan kepercayaan masyarakat perlu mengantisipasi hal ini dengan meningkatkan prinsip-prinsip akuntabilitas, baik dalam hal pengelolaan program/kegiatan maupun penerahan sumber daya organisasi.

Untuk menjawab permasalahan tersebut di atas, maka komponen PMI di semua tingkatan harus benar-benar memiliki komitmen yang kuat, tanpa pamrih serta mampu memberikan keteladanan.

Memiliki komitmen kuat dalam arti mampu menjabarkan Prinsip-Prinsip Dasar Gerakan Internasional PM/BSM, baik dalam kepemimpinan (Pengurus), pengelola organisasi (Staf) dan penyelenggara kegiatan kepalangmerahan (Relawan). Tanpa pamrih dalam arti mampu bertindak selaku Relawan (*Volunteers*), bekerja secara Sukarela (*Voluntarily*) dan dengan semangat Kesukarelaan (*Volunterism*). mpu memberikan keteladanan dalam arti, di depan - menjadi panutan untuk gerakan kemanusiaan, di tengah - bergerak bersama masyarakat untuk kemanusiaan dan di belakang - menumbuhkan motivasi dan perhatian masyarakat untuk bidang kemanusiaan.

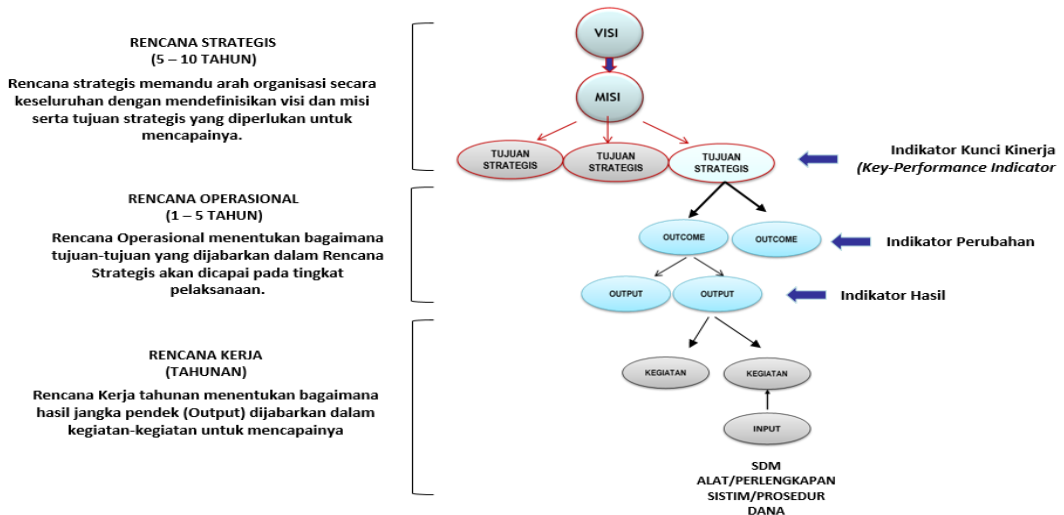
## B. KERANGKA RENCANA STRATEGIS

Untuk mempertahankan eksistensi PMI dalam menjalankan tugas dan mandatnya serta menghadapi tantangan-tantangan ke depan, perlu disusun **RENCANA STRATEGIS PMI TAHUN 2019-2024**, sebagai pedoman yang memandu arah keseluruhan tujuan organisasi PMI.

Rencana Strategis PMI tahun 2019-2024 diharapkan dapat memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- Menginspirasi (*inspirational*);
- Spesifik (*specific*);
- Terintegrasi (*integrated*);
- Fokus/ringkas (*concise*);
- Rasional dan logis (*coherent*);
- Partisipatif melalui proses konsultasi ke atas dan ke bawah (*participative, consultative*);
- Fleksibel (*flexible*) sesuai dengan kapasitas PMI;
- Realistis (*realistic*) sesuai sumber daya, dapat diimplementasikan dalam perencanaan operasional, dan dapat dievaluasi; serta
- Dapat diukur (*measurable*), memiliki indikator yang dapat diukur baik di tataran Tujuan Strategis (jangka panjang), hasil jangka menengah (*Outcome*), dan hasil jangka pendek (*Output*).

### SISTEMATIKA RENCANA STRATEGIS



## C. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

### 1. Analisis Internal

#### a. Kekuatan

PMI merupakan organisasi sosial kemanusiaan terbesar di Indonesia, dibentuk dan memiliki mandat resmi sebagai *auxiliary* Pemerintah untuk penanggulangan bencana dan donor darah. PMI memiliki keterwakilan di 34 Provinsi dan 474 Kabupaten/Kota yang dilengkapi dengan sarana prasarana dasar serta didukung perlengkapan operasional yang memadai untuk melaksanakan tugas dan pelayanannya.

Pengurus PMI di semua tingkatan memiliki latar belakang profesional yang beragam, sebagian besar memiliki akses yang baik ke Pemerintahan, sektor pelayanan publik dan sektor swasta (*private*). PMI juga memiliki jaringan Sukarelawan dengan berbagai latar belakang dan keterampilan pelayanan. Data sistim informasi manajemen Relawan tahun 2018 menunjukkan, PMI memiliki 29.042 Relawan terdaftar, termasuk 8.997 TSR, diantaranya 30% adalah Relawan yang aktif dilibatkan dalam berbagai kegiatan di tingkat Kab/Kota hingga nasional.

PMI juga memiliki kapasitas yang memadai di bidang tanggap darurat bencana. 75% dari PMI Kabupaten/Kota memiliki anggota Satgana antara 5-30 orang. Di samping itu terdapat 6 gudang regional sebagai basis desentralisasi dukungan logistik, lebih dari 100 armada truk tangki air dan truk angkutan barang, serta peralatan lapangan air dan sanitasi. PMI juga membina 249 komunitas siaga bencana yang tersebar di 64 PMI Kabupaten di 21 Provinsi.

#### b. Kelemahan

1) Organisasi dan tatalaksana PMI di semua tingkatan belum berfungsi baik, antara lain:

- ❖ Fungsi pembinaan oleh PMI Provinsi kepada PMI Kabupaten/Kota belum berjalan optimal. Hasil-hasil Musyawarah Nasional dan Musyawarah Kerja Nasional tidak tersampaikan kepada PMI Kabupaten/Kota, baik secara tertulis maupun lisan melalui sosialisasi;
- ❖ Banyak Pengurus/Pegawai yang belum memahami bahwa tingkat operasional ada di tingkat Kabupaten/Kota (misal: pembinaan Relawan dan rekrutmen Donor Darah Sukarela);
- ❖ Peraturan Organisasi yang telah disusun belum dapat disesuaikan dengan konteks lokal;
- ❖ PMI belum memiliki ketentuan waktu pelaksanaan Musyawarah Kerja (sebagai forum pengesahan rencana kerja tahunan) yang terjadwal secara tetap;
- ❖ Perencanaan masih lemah dan kurang terintegrasi antara perencanaan kegiatan dengan keuangan;
- ❖ Teknologi informasi belum dimanfaatkan secara maksimal.

2) Kapasitas sumber daya organisasi PMI belum merata di semua tingkatan, antara lain:

#### Sarana prasarana

- ❖ Lebih dari 50% Markas PMI Provinsi dan Kabupaten/Kota masih berstatus sewa atau hak guna bangunan;
- ❖ Peralatan dan perlengkapan dasar komunikasi dan teknologi informasi masih belum merata;
- ❖ Kepemilikan, pemeliharaan, penggunaan dan pencatatan aset belum tertata dengan baik.

### SDM (Pengurus, Pegawai dan Relawan)

- ❖ Keaktifan Pengurus, terutama di Kabupaten/Kota masih memprihatinkan, sehingga berdampak terhadap komitmen (hanya 16 % dari 286 Kabupaten/Kota yang mengatakan seluruh pengurusnya aktif);
- ❖ Peranan Pelindung dan Dewan Kehormatan tidak berfungsi optimal karena belum dijabarkan dalam Peraturan organisasi PMI;
- ❖ Kepemimpinan, pemahaman tentang PMI, dan kemampuan *networking* di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota masih lemah;
- ❖ Tingkat partisipasi Pengurus, Staf dan Relawan dalam proses pengambilan keputusan belum terpola, cenderung tidak merata, sangat mempengaruhi kinerja Markas;
- ❖ Masih banyak Kepala Markas yang dijabat rangkap oleh Pengurus;
- ❖ Sistem manajemen markas belum berjalan optimal;
- ❖ Koordinasi dan komunikasi antara Pengurus PMI Pusat, PMI Provinsi, PMI Kabupaten/Kota masih lemah;
- ❖ Keterbatasan SDM (*skill, knowledge, experience*);
- ❖ Pelatihan masih berorientasi pada kebutuhan program Diklat, bukan kebutuhan organisasi, lebih banyak pelatihan ketrampilan daripada pelatihan manajemen;
- ❖ Penerapan aturan kepegawaian yang belum seragam;
- ❖ PMI mengalami kendala dalam retensi sukarelawan karena kurang/tidak adanya kegiatan di masa normal (hanya 30% dari 286 PMI Kabupaten/Kota yang mengatakan bahwa separuh dari sukarelawannya masih aktif);
- ❖ Adanya tumpang tindih istilah Relawan produk pembinaan PMI dan Relawan produk proyek-proyek;
- ❖ Mobilisasi sukarelawan umumnya masih terbatas pada saat situasi tanggap darurat, kecuali jika ada kegiatan/program yang didukung pendanaannya oleh Donor;
- ❖ PMI belum memiliki pola regenerasi pegawai.

### Pendanaan

- ❖ PMI belum memiliki sumber dana yang berkelanjutan, upaya penggalangan sumber dana relatif rendah, dan ketergantungan terhadap sumber dana dari Pemerintah dan Donor masih tinggi (kurang dari 10% Kabupaten/Kota yang memiliki minimal 3 sumber pendapatan; 63% PMI Kabupaten/Kota memperoleh lebih dari separuh pendapatannya dari pemerintah);
  - ❖ Umumnya belum memiliki perencanaan pendanaan sehingga pencapaian rencana kerja rendah;
  - ❖ Transparansi pengelolaan dana belum optimal.
- 3) Kapasitas operasi penanganan bencana dan risiko kesehatan di seluruh wilayah Indonesia belum merata
- Program umumnya masih bersifat sektoral (belum terintegrasi optimal);
  - Program masih berbasis proyek yang didukung oleh Donor;
  - Rencana/Program kerja masih berorientasi pada kegiatan (*activity oriented*) bukan pada tujuan/hasil (*objective/result oriented*).
- 4) Kualitas dan kuantitas pelayanan transfusi darah masih perlu ditingkatkan
- Kebutuhan darah cenderung meningkat, namun kapasitas belum merata;
  - Bantuan *reagen* dari APBN Kemenkes terbatas dan tidak terjamin keberlangsungannya;
  - Tidak ada anggaran APBD untuk pelayanan darah PMI;
  - UDD Pusat tidak memiliki dana yang memadai untuk mendukung fungsinya dengan optimal.



## **2. Analisis Eksternal**

### **a. Peluang**

- 1) Landasan hukum organisasi PMI telah dikuatkan oleh Undang-undang No.1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan dan Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Kepalangmerahan;
- 2) Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap PMI masih tinggi;
- 3) Tingkat perhatian masyarakat Indonesia terhadap kebencanaan masih tinggi;
- 4) Minat masyarakat untuk menjadi relawan PMI masih tinggi;
- 5) Konsistensi dukungan Gerakan/Perhimpunan Nasional Negara sahabat;
- 6) Kemungkinan untuk mengakses Dana Desa untuk kegiatan PMI berbasis masyarakat;

### **b. Tantangan**

- 1) Dalam hubungannya dengan media

Media, sebagai salah satu komponen sistim demokrasi, dewasa ini semakin berperan dan berpengaruh dalam dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial-budaya dan keamanan di Indonesia. Dengan akses dan sumber daya yang dimilikinya, memungkinkan media untuk menjangkau semua sector pembangunan, semua lapisan/elemen masyarakat, baik nasional dan internasional, khususnya dalam hal perolehan dan penyebarluasan informasi.

Dalam bidang kemanusiaan, dewasa ini media juga sangat berperan dalam menginformasikan berbagai krisis kemanusiaan, ditingkat nasional dan internasional, baik untuk menggalang kepedulian masyarakat hingga menggalang dukungan (dana) masyarakat. Media bahkan menyalurkan sendiri bantuannya, yang tentunya akan berpotensi pesaing lembaga-lembaga kemanusiaan yang sudah mapan.

Disamping itu, hubungan PMI dengan personil media belum benar-benar dimanfaatkan. Pengalaman sejumlah kecil PMI Prov/Kab-Kota yang merekrut personil media sebagai TSR/Relawan yang dengan keunggulan jejaring dan akses informasi telah memberi kontribusi yang signifikan terhadap PMI setempat. Bagaimana PMI dapat merekrut dan meningkatkan partisipasi personil media dalam kegiatan PMI di Indonesia, hal ini akan menjadi tantangan PMI ke depan.

- 2) Dalam hubungannya dengan masyarakat

Seiring dengan era keterbukaan di Indonesia dewasa ini dan meningkatnya kesadaran akan partisipasi politik, telah mendorong masyarakat menjadi lebih kritis terhadap kebijakan-kebijakan publik. Disamping itu, berkembangnya penggunaan media-sosial juga semakin memudahkan masyarakat memperoleh akses untuk menyampaikan pendapat melalui saluran-saluran informal. PMI yang sangat terkait dengan layanan publik, misalnya dalam hal layanan donor darah dan kebencanaan, perlu mengantisipasi sikap masyarakat yang semakin kritis ini untuk memelihara akseptabilitas organisasi dan individu (Relawan) yang dilibatkan.

3) Dalam hubungannya dengan pemerintah di semua tingkatan

Peran dan perhatian lembaga-lembaga Pemerintah (BNPB/BPBD, Kemenkes, Kemensos, Kemen-PUPR, BMKG) dan lembaga legislatif (DPR, DPRD I/II) dibidang kemanusiaan dewasa ini semakin meningkat. Dilain pihak, UU No.1/2018 dan PP No.7/2019, telah memposisikan PMI untuk tetap berkoordinasi dengan lembaga-lembaga Pemerintah terkait dalam pelaksanaan kegiatannya. Upaya membangun kerjasama strategis dengan lembaga-lembaga terkait ini tentunya akan menjadi sangat penting dimasa mendatang.

Ketergantungan PMI terhadap sumber-sumber Pemerintah merupakan kenyataan dan sangat mempengaruhi tumbuh-kembangnya organisasi PMI disemua tingkatan. Pengalaman lima tahun terakhir menunjukkan bahwa afiliasi politik Pengurus tertentu di organisasi PMI, dalam tingkatan tertentu, telah menimbulkan kegamangan dalam memelihara integritas organisasi PMI terhadap Prinsip-Prinsip Dasar Kepalangmerahan.

4) Dalam hubungannya dengan Sektor Swasta/Korporasi

Kepedulian sektor Swasta/Korporasi di bidang sosial-kemanusiaan semakin meningkat seiring dengan membaiknya perekonomian Indonesia, tercermin dengan adanya progam-program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang diselenggarakannya. Dari donasi untuk peristiwa bencana di Lombok, Sulawesi Tengah dan Selat Sunda, PMI Pusat mencatat lebih dari 150 lembaga *profit*/korporasi telah mendonasikan dananya ke PMI, baik secara langsung (serah-terima kepada Pengurus Pusat) maupun tidak langsung melalui setoran ke rekening-rekening donasi bencana PMI, dengan kontribusi sebesar 62% dari total donasi yang diterima PMI (data donasi Gempabumi dan Tsunami Sulteng per 28 November 2018).

Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam merespons bencana di Lombok dan Sulawesi Tengah yang melakukan pembatasan terhadap organisasi-organisasi internasional, perlu dimaknai secara positif oleh PMI dengan mengurangi ketergantungan terhadap sumber-sumber Gerakan PM/BSM disatu sisi serta dilain sisi membangun kerjasama dengan sumber-sumber non-pemerintah potensial di dalam negeri.

Kepedulian sektor swasta/korporasi dalam situasi kebencanaan ini sudah terbukti dan perlu dipertahankan dengan meningkatkan kemampuan PMI dalam mengelola donasi secara akuntabel. Bagaimana dengan situasi non-bencana? Apakah PMI mampu melibatkan partisipasi sektor swasta/korporasi dalam program-program non-kebencanaan? Bagaimana strategi kerjasama PMI dengan sektor swasta/korporasi dimasa mendatang? Hal ini akan menjadi tantangan bagi PMI ke depan.

5) Dalam hubungannya dengan dinamika internasional dan globalisasi

Merujuk pada Strategi IFRC 2030, sebagai bagian dari Gerakan Internasional PM/BSM, PMI berkomitmen untuk mengambil bagian dalam menjawab tantangan global saat ini, yaitu dampak perubahan iklim, krisis kemanusiaan karena bencana dan konflik, isu kesehatan (epidemi dan pandemi), migrasi penduduk, inklusivisme. Tantangan global ini terjadi dalam dinamika perubahan dunia yang sangat cepat sehingga menuntut Perhimpunan Nasional, termasuk PMI, untuk bertransformasi dari pendekatan konvensional menjadi pendekatan yang mengutamakan masyarakat sebagai pelaku utama (*people centred approach*) dalam mengantisipasi, mempersiapkan diri, mengatasi serta memulihkan diri dari dampak suatu krisis kemanusiaan. Transformasi ini meliputi:

- Menjadi Perhimpunan Nasional yang kuat dan efektif;
- Mengutamakan peranan kaum muda dan Relawan;
- Membangun kepercayaan dan akuntabilitas organisasi;
- Membina jejera yang efektif;
- Mempromosikan aksi-aksi kemanusiaan;
- Digitalisasi informasi;
- Pendanaan yang mandiri;

Di Regional Asia Pasifik, sebagai kawasan dengan 2/3 populasi dunia serta pertumbuhan ekonomi yang cepat serta beragam di satu sisi, sementara disisi lain, kawasan Asia Pasifik sebagai “*ring of fire*” (rawan gempa bumi dan erupsi) dengan fenomena perubahan iklim yang semakin meluas dan di kawasan ini juga memiliki potensi konflik, baik di dalam negeri maupun antar negara, semakin meningkatkan kerawanan terhadap kebencanaan dan krisis kemanusiaan lainnya.

Untuk menghadapi tantangan perubahan yang cepat dan kompleks di kawasannya, dalam Konferensi Regional Asia Pasifik ke-10, para Pemimpin Perhimpunan Nasional berkomitmen untuk melaksanakan “*Manila Call for Action in a Fast-Changing World*” yang tidak lain adalah penjabaran Strategi Global IFRC 2030 khususnya di kawasan Asia Pasifik.

Langkah-langkah strategis apa yang diperlukan untuk menentukan arah/fokus perubahan PMI ke depan, sumber daya yang mana yang perlu di revitalisasi untuk bertransformasi terhadap kecenderungan global ini, akan menjadi tantangan PMI kedepan.

6) Dalam hubungannya dengan **Organisasi Sipil Masyarakat (OSM) lainnya**

Organisasi Sipil Masyarakat (OSM) yang bergerak dibidang sosial kemanusiaan semakin banyak jumlahnya. Satu sama lain berkeinginan menjadi yang terdepan atau terdahulu dalam memberikan layanan kepada masyarakat yang memerlukan bantuannya, demikian halnya dalam hal mengakses sumber-sumber dana kemanusiaan.

Kecenderungan ini dapat berdampak negatif bila menimbulkan iklim persaingan antar OSM, sementara masyarakat yang memerlukan bantuan hanya menjadi faktor alasan (obyek) mencari akses bantuan kemanusiaan. Akan tetapi, kecenderungan ini juga dapat berdampak positif bila timbul iklim koordinasi, komunikasi dan kerjasama antar OSM terjalin baik. Bagaimana PMI dapat memposisikan diri secara lebih baik dalam hubungannya dengan OSM lainnya, akan menjadi tantangan kedepan.

**D. RENCANA STRATEGIS PMI TAHUN 2019-2024**

**VISI**

**“TERWUJUDNYA PMI YANG PROFESIONAL DAN BERINTEGRITAS  
SERTA BERGERAK BERSAMA MASYARAKAT”**

***Profesional***

*bekerja sesuai standar kompetensi yang diperlukan, baik dalam berorganisasi maupun dalam memberikan pelayanannya, dan*

*mampu bersaing dan bekerja sesuai standar nilai dan norma yang berlaku universal serta mengutamakan perhatian kepada kelompok yang paling rentan.*

***Berintegritas***

*dalam melaksanakan mandatnya PMI berpegang teguh kepada Prinsip-prinsip dasar Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit merah, kode etik dan ketentuan perundangan yang berlaku*

*seluruh pelayanan PMI dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pihak yang berkepentingan termasuk kepada penerima manfaat*

***Bergerak Bersama Masyarakat***

*bekerja untuk kemanusiaan tanpa mengesampingkan potensi yang dimiliki masyarakat, memberdayakan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya.*

**MISI**

1. **Memelihara reputasi organisasi PMI di tingkat nasional dan internasional (dijabarkan pada Tujuan Strategis 1).**

7 Prinsip Dasar Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, merupakan produk Sejarah Dunia dimana nilai-nilai yang terkandung dalam Prinsip-Prinsip Dasar tersebut perlu diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Reputasi sebuah Perhimpunan Nasional, termasuk Perhimpunan Nasional Palang Merah Indonesia, sangat ditentukan oleh komitmen dan pemahaman yang baik dari semua komponen organisasi (Pengurus, Pegawai dan Relawan) dalam mengimplementasikan Prinsip-Prinsip Dasar Gerakan di bidang pelayanan kemanusiaan dan tatakelola organisasi.

Oleh karena itu, diseminasi nilai-nilai yang terkandung dalam 7 Prinsip Dasar Gerakan dan produk-produk Hukum Peri-kemanusiaan Internasional akan tetap menjadi program/kegiatan yang generik bagi setiap Perhimpunan Nasional, termasuk PMI.

PMI sebagai organisasi kemanusiaan berada diantara pihak yang memerlukan bantuan dan pihak yang menjadi sumber bantuan. Oleh karena itu, Kepercayaan dari para pihak harus menjadi sesuatu yang *“inherent”* (melekat) pada organisasi PMI, bukan semata-mata sebagai sebuah tujuan. Kepercayaan publik terhadap organisasi PMI, tidak hanya bersumber dari akuntabilitas organisasi, tetapi juga terhadap penerapan prinsip-prinsip dasar layanan kemanusiaan.

Bila diukur dari cakupan geografis dan jumlah penduduk yang dilayani, PMI merupakan Perhimpunan Nasional terbesar ke-5 di dunia. Oleh karena itu, membangun tingkat kepercayaan PMI ditingkat nasional maupun internasional menjadi sebuah taruhan.

Misi pertama ini terkait dengan tugas-tugas yang dimandatkan dalam UU No.1/2018, pasal 22, butir-e *“Menyebarkan informasi yang berkaitan dengan Kepalangmerahan”*, disamping sebagai upaya mewujudkan kata *“berkarakter dan netral”* pada pernyataan Visi PMI.

**2. Menjadi organisasi kemanusiaan terdepan yang memberikan layanan berkualitas kepada masyarakat sesuai dengan Prinsip-prinsip Dasar Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (dijabarkan pada Tujuan Strategis 2 s/d 6).**

PMI, yang telah berdiri sejak 1945 dan menjadi satu-satunya organisasi penyelenggara kepalangmerahan yang diberi mandat oleh Pemerintah RI melalui Undang-undang No.1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan, perlu meningkatkan upayanya untuk menjadi organisasi kemanusiaan terdepan di Indonesia di tengah perkembangan lingkungan strategis di Indonesia dan juga di dunia.

Misi kedua ini hanya dapat terwujud bila fungsi organisasi dioptimalkan sedemikian rupa, dengan didukung oleh SDM dan sarana prasarana yang memadai, serta menyelenggarakan pelayanan yang berkualitas baik pada masa normal dan kedaruratan dan pelayanan yang sangat khas palang merah, yaitu donor darah dalam upaya membangun dan memelihara ketahanan masyarakat.

Misi kedua ini terkait dengan tugas-tugas yang dimandatkan dalam Undang-undang No.1 Tahun 2018, pasal 22 butir-a, b, c, d, f, g, disamping sebagai upaya mewujudkan kata *“Karakter”* dalam pernyataan visi PMI di atas.

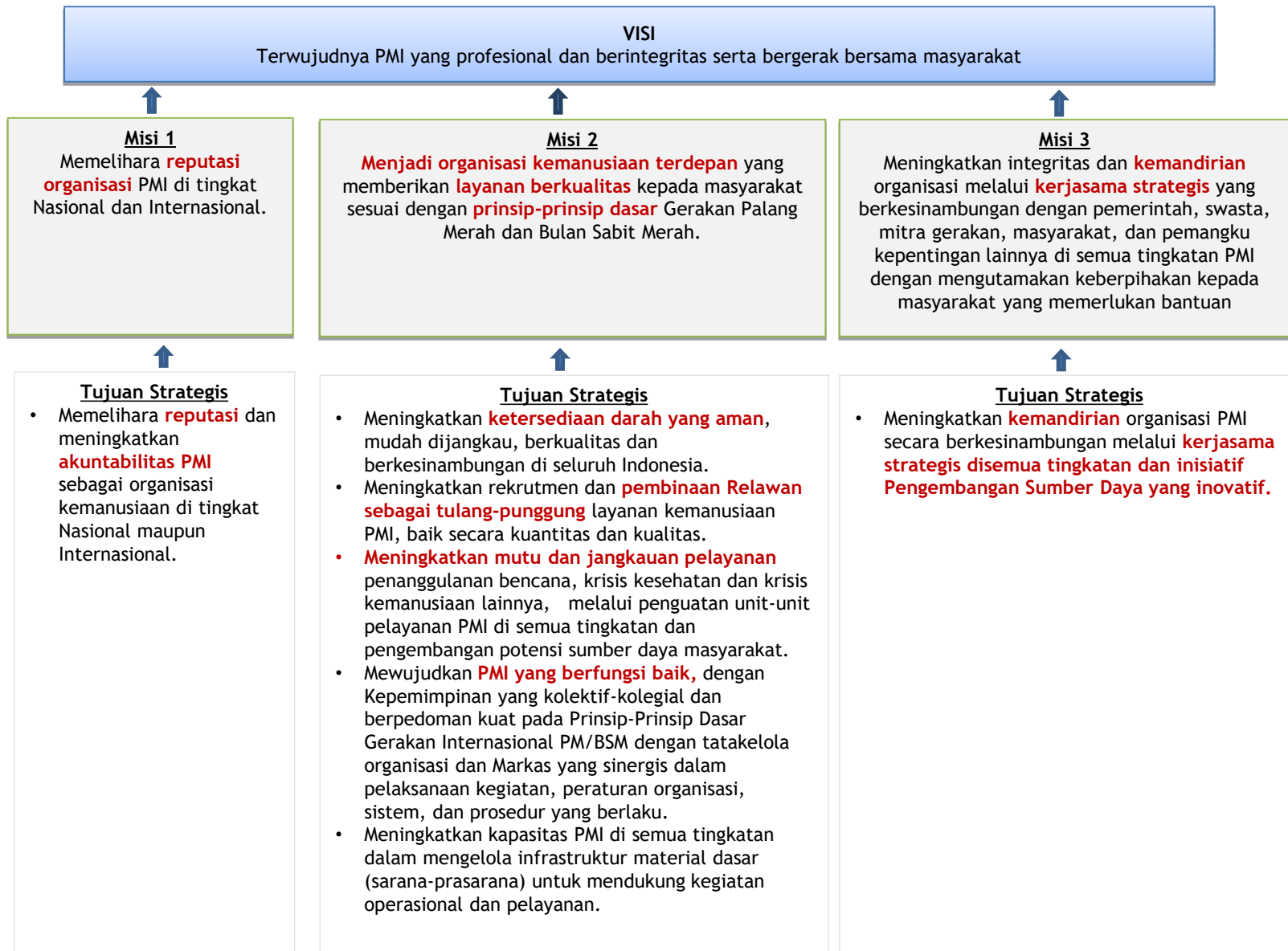
**3. Meningkatkan integritas dan kemandirian organisasi melalui kerjasama strategis yang berkesinambungan dengan pemerintah, swasta, mitra gerakan, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya di semua tingkatan PMI dengan mengutamakan keberpihakan kepada masyarakat yang memerlukan bantuan (tercermin pada Tujuan Strategis 7).**

Netralitas dan Kemandirian merupakan bagian dari tujuh Prinsip Dasar Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah yang menjadi landasan integritas Perhimpunan Nasional. PMI menyadari bahwa kerjasama strategis merupakan hal yang esensial untuk dapat menjalankan mandat perundang-undangan, namun pada saat yang sama PMI harus independen, dalam artian tidak tunduk atau terpengaruh pada kepentingan golongan/politik tertentu. Dalam bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, PMI harus mampu memposisikan diri sebagai mitra yang layak dan sejajar, dengan mengutamakan kepentingan masyarakat yang memerlukan bantuan.

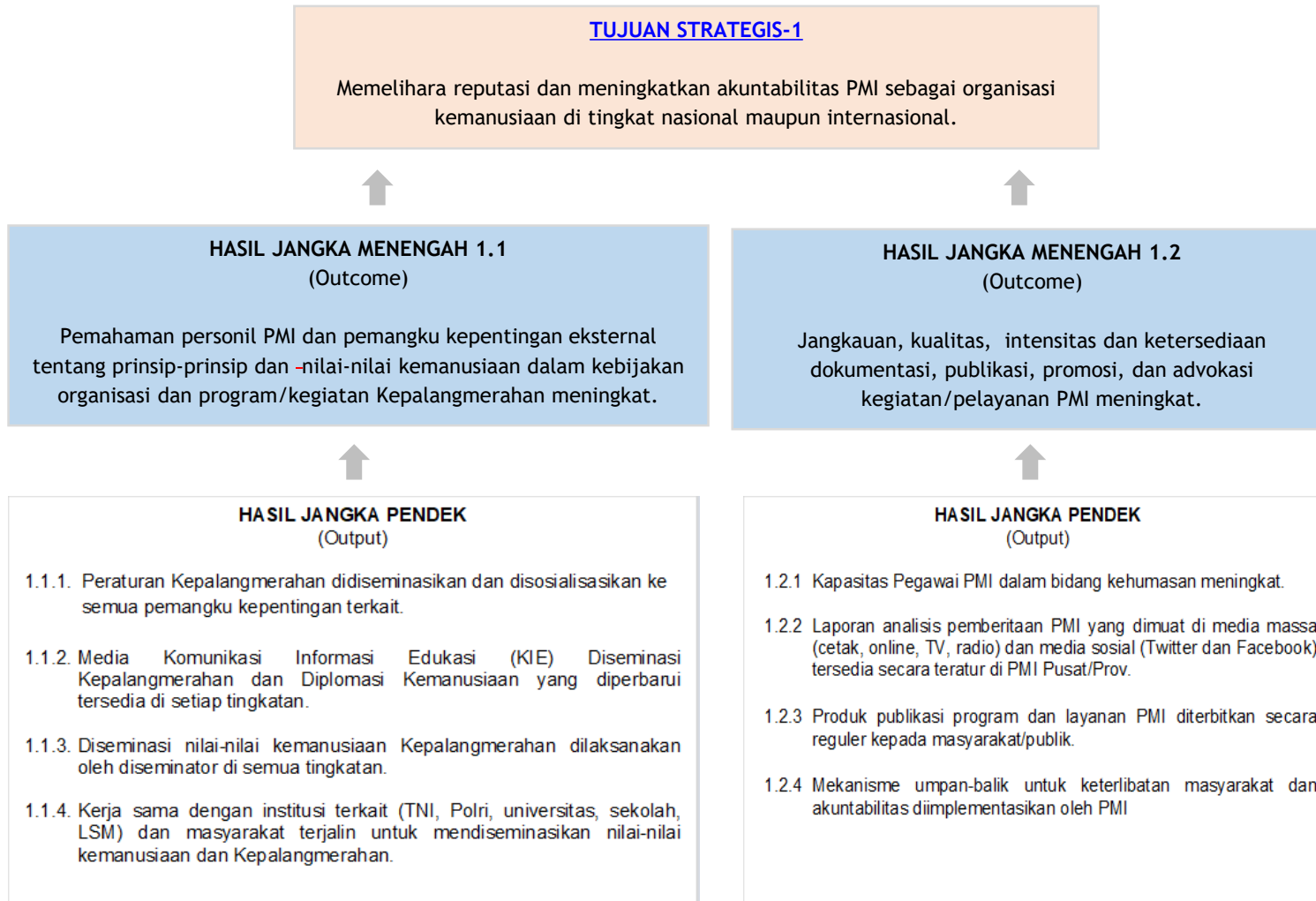
Misi Ketiga ini terkait dengan semua tugas yang dimandatkan dalam UU No.1 tahun 2018, pasal 22, butir a s/d h, disamping sebagai upaya mewujudkan kata *“Profesional dan Bergerak Bersama Masyarakat”* dalam pernyataan visi PMI di atas.

**TUJUAN STRATEGIS**  
(Tujuan Jangka Panjang)

1. Memelihara reputasi dan meningkatkan akuntabilitas PMI sebagai organisasi kemanusiaan di tingkat nasional maupun internasional.
2. Meningkatkan ketersediaan darah yang aman, mudah dijangkau, dan berkualitas di seluruh Indonesia.
3. Meningkatkan rekrutmen dan pembinaan Relawan sebagai tulang-punggung layanan kemanusiaan PMI, baik secara kuantitas dan kualitas.
4. Meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan penanggulangan bencana, krisis kesehatan dan krisis kemanusiaan lainnya, melalui penguatan unit-unit pelayanan PMI di semua tingkatan dan pengembangan potensi sumber daya masyarakat.
5. Mewujudkan PMI yang berfungsi baik, dengan kepemimpinan yang kolektif-kolegial dan berpedoman kuat pada Prinsip-Prinsip Dasar Gerakan Internasional PM/BSM dengan tatakelola organisasi dan Markas yang sinergis dalam pelaksanaan kegiatan, peraturan organisasi, sistem, dan prosedur yang berlaku.
6. Meningkatkan kapasitas PMI di semua tingkatan dalam mengelola infrastruktur material dasar (sarana-prasarana) untuk mendukung kegiatan operasional dan pelayanan.
7. Meningkatkan kemandirian organisasi PMI secara berkesinambungan melalui kerjasama strategis di semua tingkatan dan inisiatif Pengembangan Sumber Daya yang inovatif.



## E. RENCANA OPERASIONAL PMI TAHUN 2019-2024





### **Tujuan Strategis-1**

Memelihara reputasi dan meningkatkan akuntabilitas PMI sebagai organisasi kemanusiaan di tingkat nasional maupun internasional.

#### **Hasil Jangka Menengah (Outcome) 1.1**

Dengan diterbitkannya UU No.1/2018 dan PP No.7/2019 sebagai landasan hukum PMI, maka pemahaman masyarakat luas terhadap PMI juga perlu ditingkatkan. Sosialisasi UU No.1/2018 dan PP No.7/2019 perlu dilaksanakan secara sistematis untuk menciptakan lingkungan strategis yang kondusif bagi pengembangan organisasi PMI serta program dan kegiatan Kepalangmerahan. Hal ini sesuai dengan tugas yang diamanatkan oleh UU No.1/2018, butir-e, “Menyebarkan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Kepalangmerahan”.

Nilai-nilai kemanusiaan dan Prinsip-Prinsip Dasar Gerakan Internasional PM/BSM merupakan warisan dunia, oleh karena itu pemahaman tentang nilai-nilai kemanusiaan dan Prinsip-Prinsip Dasar Gerakan Internasional PM/BSM perlu diwariskan kepada seluruh elemen masyarakat, dari generasi ke generasi, untuk dipertahankan eksistensinya.

Pemahaman nilai-nilai kemanusiaan dan Prinsip-Prinsip Dasar Gerakan PM/BSM bagi personil PMI adalah mutlak diperlukan, mulai dari tingkat Pimpinan, Staf hingga para Sukarelawan. Hal ini sesuai dengan Visi Rencana Strategis PMI 2019 - 2024, “PMI Profesional, Netral, Mandiri dan Bergerak Bersama Masyarakat”, maka nilai-nilai ini perlu tercermin dalam semua aspek berorganisasi PMI, yaitu kepemimpinan, pelaku/pelaksana program, prinsip/sifat pelayanan PMI. Hal ini sesuai dengan tugas yang diamanatkan oleh UU No.1/2018, butir-d, “Melaksanakan Pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan Kepalangmerahan”

Untuk itu, sosialisasi perundang-undangan Kepalangmerahan, penyebaran (diseminasi) nilai-nilai kemanusiaan dan Prinsip-Prinsip Dasar Gerakan PM/BSM Internasional, akan dilaksanakan secara internal maupun eksternal. Secara internal, akan dimuat dalam setiap semua paket pelatihan PMI dan tentunya orientasi kepalangmerahan kepada Pengurus. Secara eksternal, diseminasi akan dilakukan melalui berbagai event PMI, baik lokal maupun nasional, dengan memanfaatkan jejaring media serta kerjasama dengan institusi-institusi Pemerintah, TNI/Polri dan institusi Pendidikan Dasar/Menengah/Tinggi.

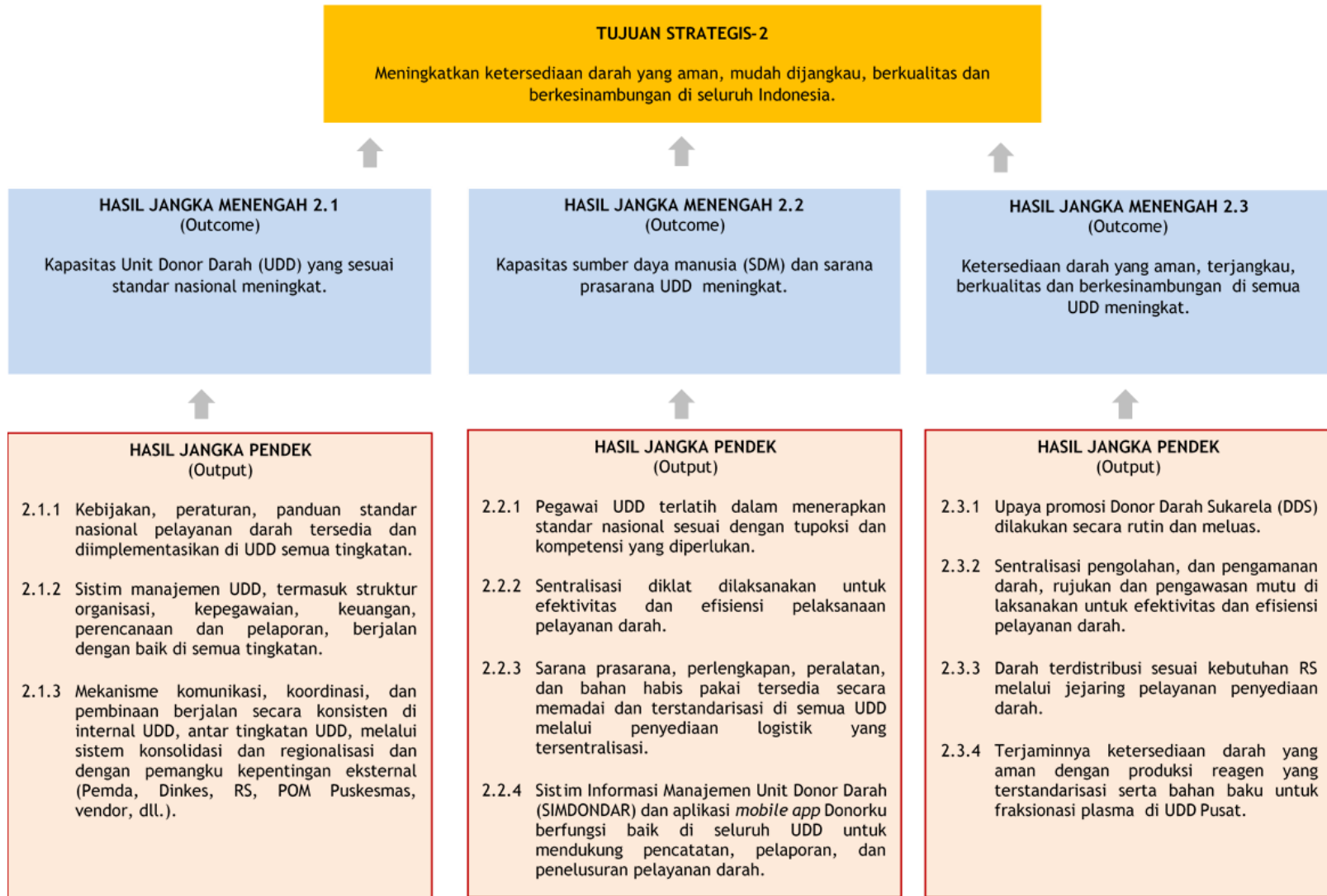
#### **Hasil Jangka Menengah (Outcome) 1.2**

Untuk memelihara reputasi PMI sebagai organisasi kemanusiaan di tingkat nasional dan internasional maka diperlukan upaya oleh PMI di semua tingkatan untuk menyediakan informasi, dokumentasi, publikasi, promosi, dan advokasi program/kegiatan pelayanan PMI. PMI di semua tingkatan perlu diperkuat dengan Staf kehumasan yang kompeten dan dilengkapi dengan perangkat dasar yang memadai. Produk-produk kehumasan yang terseleksi dan bervariasi dipublikasikan secara teratur, baik melalui saluran media formal maupun media sosial.

Disamping itu, untuk memelihara dan meningkatkan akuntabilitas organisasi PMI perlu diupayakan keterlibatan masyarakat, khususnya dalam kegiatan pelayanan PMI, melalui saluran dan mekanisme umpan-balik yang dikelola oleh staf PMI di semua tingkatan.

**Program dan kegiatan dibawah Tujuan Strategis-1 ini diarahkan pada:**

1. Diseminasi Kepalangmerahan dan nilai-nilai kemanusiaan serta perundang-undangan Kepalangmerahan, baik secara internal (personil PMI, cabang PMI) maupun secara eksternal (masyarakat umum, lembaga pendidikan dasar-menengah-tinggi, TNI-Polri, Kementerian terkait pendidikan, sosial, hukum, kemanusiaan);
2. Pencitraan organisasi melalui upaya publikasi, promosi, advokasi program/kegiatan pelayanan PMI;
3. Keterlibatan masyarakat dan akuntabilitas organisasi.



**Tujuan Strategis-2:**

**Meningkatkan ketersediaan darah yang aman, mudah dijangkau, berkualitas dan berkesinambungan di seluruh Indonesia.**

PMI merupakan organisasi kemanusiaan satu-satunya yang memperoleh mandat dari Pemerintah Indonesia berdasarkan UU No.1/2018, butir-b, PPP No.7/2019 dan Peraturan Menteri Kesehatan untuk penyediaan darah. Oleh karena itu, kapasitas Unit-Unit Donor Darah PMI, termasuk personilnya, di semua tingkatan untuk dapat menyediakan darah yang aman, mudah dijangkau, berkualitas dan harus terus dipertahankan dan ditingkatkan.

**Hasil Jangka Menengah (Outcome) 2.1**

Unit-Unit Donor Darah PMI harus dikelola sesuai Kebijakan, peraturan, panduan standar nasional pelayanan darah tersedia dan diimplementasikan di UDD semua tingkatan untuk memastikan produk-produk UDD PMI telah memenuhi kualitas yang diperlukan. Untuk itu, juga diperlukan sistem manajemen UDD termasuk struktur organisasi, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan, berjalan dengan baik di semua tingkatan dengan didukung mekanisme komunikasi, koordinasi, dan pembinaan berjalan secara konsisten di internal UDD, antar tingkatan UDD, melalui sistem konsolidasi dan regionalisasi dan dengan pemangku kepentingan eksternal (Pemda, Dinkes, RS, POM Puskesmas, vendor, dll).

**Hasil Jangka Menengah (Outcome) 2.2**

UDD PMI perlu dikelola oleh pegawai UDD terlatih dalam menerapkan standar nasional sesuai dengan tupoksi dan kompetensi yang diperlukan, oleh karena itu sentralisasi diklat dilaksanakan untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pelayanan darah.

Sarana prasarana, perlengkapan, peralatan, dan bahan habis pakai tersedia secara memadai dan terstandarisasi di semua UDD melalui penyediaan logistik yang tersentralisasi. Disamping itu, semua UDD PMI juga perlu ditingkatkan kapasitasnya dalam pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Unit Donor Darah (SIMDONDAR) dan aplikasi mobile app Donorku yang berfungsi baik di seluruh UDD untuk mendukung pencatatan, pelaporan, dan penelusuran pelayanan darah.

**Hasil Jangka Menengah (Outcome) 2.3**

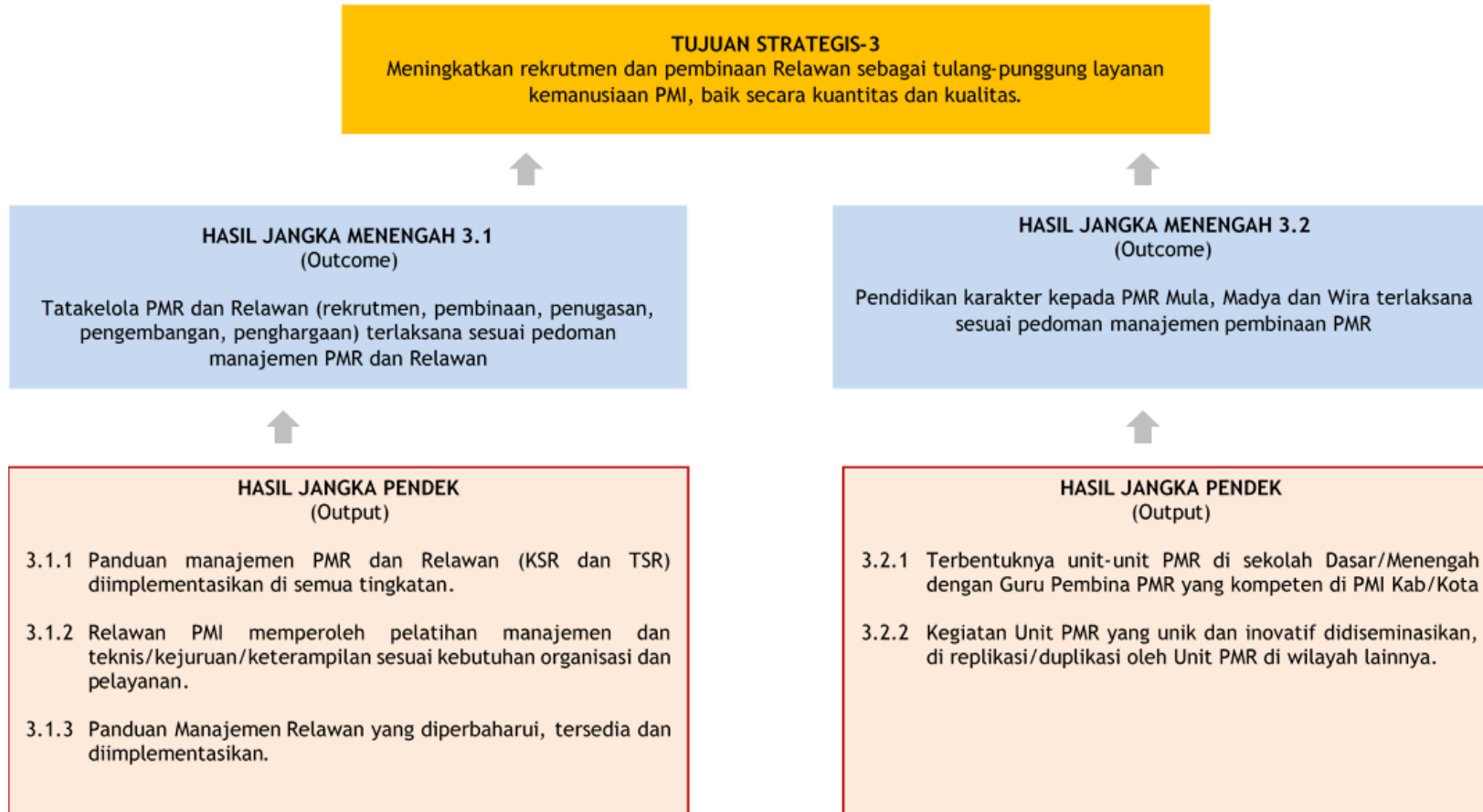
Ketersediaan darah yang aman, terjangkau, berkualitas dan berkesinambungan sangat bergantung pada keberadaan Pedonor Darah Sukarela dan kapasitas pengelolaan produk-produk darah UDD PMI. Upaya promosi DDS perlu dilakukan secara rutin, meluas dan proaktif dengan mendatangi sumber-sumber pendonor darah potensial. Hal ini perlu dilakukan secara intensif untuk meningkatkan jumlah pendonor darah baru disamping untuk mempertahankan pendonor darah sukarela yang secara tetap sudah menyumbangkan darahnya.

Kapasitas pengolahan darah untuk menjamin tersedianya darah yang aman, berkualitas, terjangkau dan berkesinambungan akan terus ditingkatkan melalui sentralisasi pengolahan, dan pengamanan darah rujukan dan pengawasan mutu di laksanakan untuk efektivitas dan efisiensi pelayanan darah sehingga darah terdistribusi sesuai kebutuhan RS melalui jejaring pelayanan penyediaan darah.

Terjaminnya ketersediaan darah yang aman juga dapat diwujudkan dengan produksi reagen yang terstandar di UDD Pusat dan ketersediaan bahan baku untuk fraksionasi plasma.

**Program dan kegiatan dibawah Tujuan Strategis-2 ini diarahkan pada:**

1. Peningkatan kapasitas semua Unit Donor Darah PMI sesuai standar nasional;
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sarana prasarana Unit Donor Darah PMI di semua tingkatan;
3. Peningkatan ketersediaan darah yang aman, terjangkau, berkualitas dan berkesinambungan di semua Unit Donor Darah PMI.



### **Tujuan Strategis-3**

Meningkatkan rekrutmen dan pembinaan Relawan PMI sebagai tulang-punggung layanan kemanusiaan PMI disemua tingkatan meningkat secara kuantitas dan kualitas.

#### **Hasil Jangka Menengah (Outcome) 3.1**

Pembinaan Relawan merupakan salah satu tugas yang dimandatkan oleh UU No.1/2018, butir-c. Pembinaan Relawan sebagai tulang-punggung pelayanan kepalangmerahan perlu ditingkatkan karena beberapa hal:

- Adanya rekrutmen dan pembinaan Relawan yang tidak dikelola oleh Bidang Relawan, yang pada gilirannya menimbulkan dikotomi pada istilah Relawan, dimana istilah Relawan PMI seharusnya hanya PMR, KSR dan TSR;
- Pengalaman mobilisasi Relawan di operasi-operasi bencana 5-tahun terakhir dimana prosedur mobilisasi, keamanan, jaminan manfaat bertugas, keselamatan bertugas belum dapat terpenuhi baik secara normatif maupun materiil;
- Munculnya organisasi-organisasi Relawan baru yang bukan berasal dari organisasi sosial-kemanusiaan, menjadi tantangan bagi Relawan PMI dengan jati-diri kepalangmerahan yang khas.

Untuk itu Panduan Manajemen PMR dan Relawan, tidak bisa tidak, perlu ditinjau ulang dan diperbaiki untuk dapat mengakomodasi perkembangan-perkembangan baru. Seiring dengan itu, pelatihan untuk Relawan juga perlu ditingkatkan kualitasnya dengan menambahkan komponen pengetahuan manajemen didalam kurikulum Diklat untuk Relawan, yang dalam jangka panjang sangat bermanfaat ketika Relawan direkrut sebagai staf Markas PMI setempat.

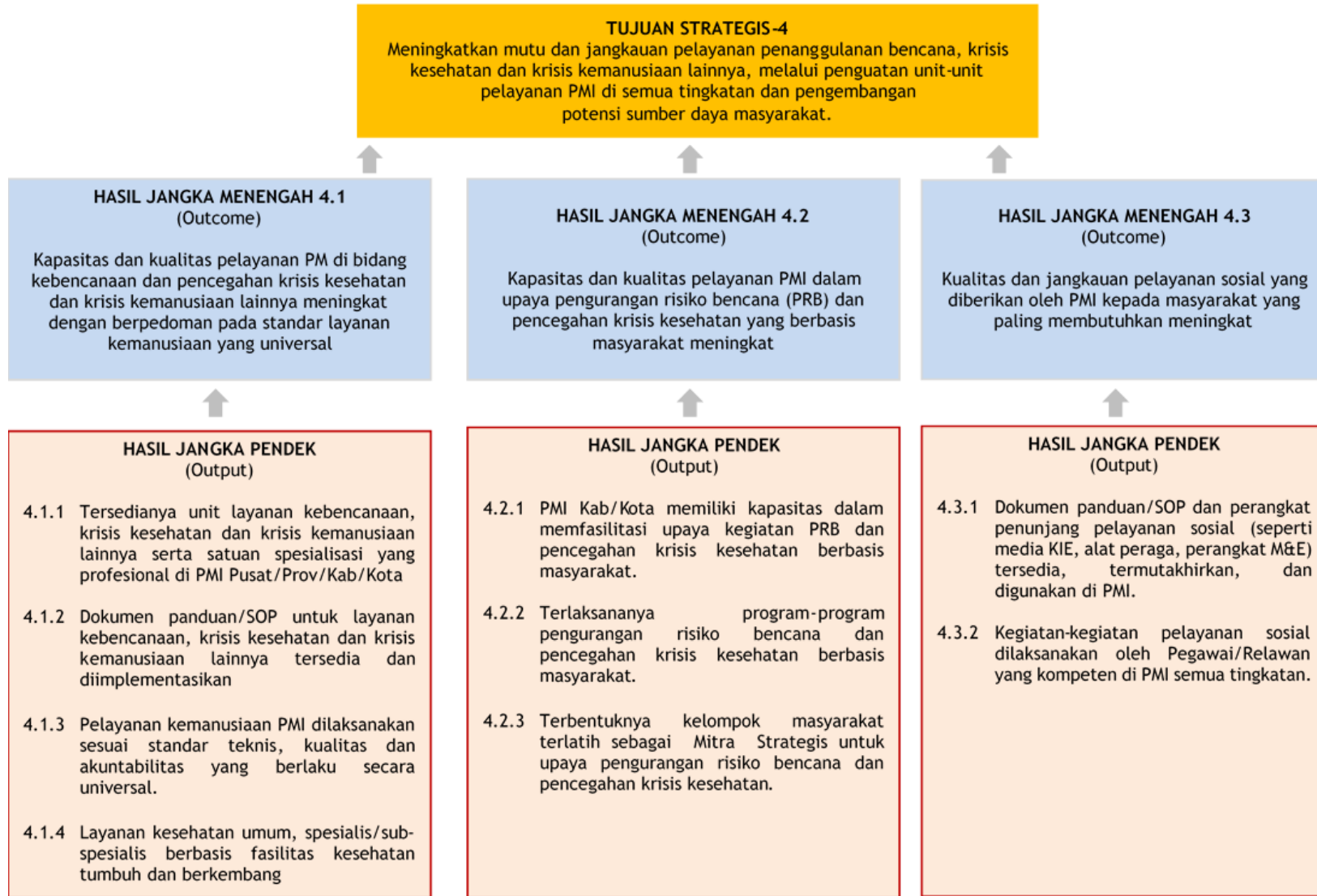
Panduan mobilisasi Relawan juga perlu ditinjau ulang dan diperbaiki, dalam arti perlu disesuaikan dengan siklus mobilisasi secara penuh, baik prosedur mobilisasi/demobilisasi, administrative, keamanan dan keselamatan, perlengkapan, hingga manfaat materiil penugasan.

#### **Hasil Jangka Menengah (Outcome) 3.2**

Pembinaan PMR di lembaga-lembaga Pendidikan, disamping sebagai wadah pembinaan karakter yang berkontribusi langsung terhadap pembinaan Generasi Muda Indonesia, juga menjadi wadah untuk menumbuhkan inisiatif dan inovasi Pemuda di bidang sosial-kemanusiaan. Oleh karena itu, pembinaan PMR oleh PMI Kab/Kota tidak hanya ditujukan untuk menambah jumlah PMR saja, tetapi juga diarahkan untuk membangun kepedulian PMR terhadap fenomena lingkungan sosial yang relevan untuk kegiatan Remaja Sebaya, dan juga untuk keberlanjutannya sebagai sumber calon Relawan (KSR) PMI kedepan.

**Program dan Kegiatan dibawah Tujuan Strategis-3 ini diarahkan pada:**

1. Peningkatan kapasitas Relawan untuk pelayanan PMI dan sumber daya Kemarkasan;
2. Pembinaan Generasi Muda PMI yang inovatif dan berkelanjutan.





#### **Tujuan Strategis-4**

Meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan penanggulangan bencana, krisis kesehatan dan krisis kemanusiaan lainnya, melalui penguatan unit-unit pelayanan PMI di semua tingkatan dan pengembangan potensi sumber daya masyarakat.

#### **Hasil Jangka Menengah (Outcome) 4.1**

**Kesiapsiagaan Institusional.** Kondisi geographis, geologis, klimatologis Indonesia yang sedemikian rupa, telah menempatkan Indonesia sebagai wilayah dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi, dalam arti jenis ancaman bencana (hazard) maupun frekuensi peristiwa bencananya. Kenyataan ini, telah menempatkan upaya kesiapsiagaan respons bencana menjadi kebutuhan dasar yang utama bagi organisasi seperti PMI yang bergerak di bidang sosial-kemanusiaan, bahkan menjadi program yang abadi.

Disamping kesiapsiagaan kebencanaan, upaya membangun kemampuan pencegahan krisis kesehatan dan kesiapsiagaan respons krisis kemanusiaan lainnya, terutama konflik horizontal, juga menjadi perhatian PMI selaku lembaga penyelenggara kepalangmerahan bersama Pemerintah menurut UU No.1/2018, butir-a, dan PP No.7/2019.

Untuk itu pembaharuan metode layanan kemanusiaan seperti bantuan berbasis tunai (*cash-based intervention*), tindakan dini berbasis ramalan cuaca (*forecast-based in action*) perlu diperkenalkan dan dilembagakan kedalam sistim kesiapsiagaan dan respons kebencanaan PMI. Disamping itu, keberadaan personil kompeten dan satuan spesialis yang terlatih di PMI Pusat/Prov/Kab-Kota merupakan kebutuhan yang harus tersedia dari waktu ke waktu. Adapun panduan/SOP untuk layanan kebencanaan, krisis kesehatan dan krisis kemanusiaan lainnya juga harus diuji melalui simulasi dan diperbaharui secara berkala. Sementara itu, layanan-layanan PMI juga ditingkatkan kualitasnya untuk memenuhi standar-standar teknis, normative dan akuntabilitas yang berlaku universal.

**Fasilitas Layanan Kesehatan Umum.** Beberapa PMI Provinsi dan PMI Kab/Kota telah berinisiatif mendirikan dan mengoperasikan fasilitas layanan kesehatan umum termasuk Rumah Sakit, disamping bertujuan untuk pencitraan PMI setempat, memenuhi fungsi sosialnya, juga diupayakan untuk diversifikasi sumber dana. Inisiatif pendirian fasilitas layanan kesehatan umum ini perlu didokumentasikan untuk menjadi model bagi PMI Prov/Kab-Kota lain yang memiliki gagasan yang sama. Dokumentasi termaksud antara lain meliputi, sarana-prasarana, jenis layanan kesehatan yang tersedia, personil, kualitas dan akuntabilitas layanan, sistim rujukan, pola bagi-hasil dll.

#### **Hasil Jangka Menengah (Outcome) 4.2:**

**Kesiapsiagaan Berbasis asyarakat.** Masyarakat di wilayah rawan bencana adalah pihak pertama yang akan merespons ketika bencana di wilayahnya terjadi. Oleh karena itu, upaya membangun kemampuan masyarakat merespons bencana merupakan gagasan awal dan seterusnya ditempatkan dalam kerangka pengurangan risiko dan mengarah pada ketahanan masyarakat.

Oleh karena itu, program/kegiatan PMI berbasis masyarakat juga memerlukan perbaikan strategi dimana masyarakat binaan akan pusat penentuan keputusan dan tindakan berdasarkan tujuan yang ditetapkan oleh masyarakat itu sendiri (*demand driven people-centred approach*). Dilain pihak, PMI akan menempatkan diri sebagai fasilitator dan katalisator dari inisiatif masyarakat. Untuk itu, PMI perlu meningkatkan kapasitas Staf dan Relawan yang dilibatkan dalam program/kegiatan berbasis masyarakat untuk mampu menjadi fasilitator dan katalisator inisiatif pembangunan masyarakat.

**Hasil Jangka Menengah (Outcome) 4.3:**

Pelayanan sosial kemanusiaan kepada berbagai kelompok yang memerlukan bantuan dan perlindungan juga akan menjadi perhatian PMI, khususnya diluar situasi kebencanaan. Pelayanan sosial kemanusiaan PMI tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar saja, tetapi juga diupayakan untuk memfasilitasi masyarakat rentan dalam mengakses pelayanan-pelayanan publik, pemberdayaan kelompok melalui kegiatan-kegiatan yang terpadu. Oleh karena itu diperlukan panduan/SOP dan perangkat penunjang lainnya yang memadai untuk membantu Staf/Relawan PMI yang bekerja melayani kelompok masyarakat yang membutuhkannya.

**Program/kegiatan dibawah Tujuan Strategis-4 ini diarahkan pada:**

1. Peningkatan kesiapsiagaan institusional untuk tanggap darurat bencana, pencegahan krisis kesehatan dan respons krisis kemanusiaan lainnya (konflik, musibah industri dan lain-lain yang berdampak korban massal);
2. Peningkatan ketahanan masyarakat terhadap bencana, krisis kesehatan dan krisis kemanusiaan lainnya;
3. Pelayanan sosial kepada kelompok masyarakat yang memerlukan bantuan dan perlindungan.

**TUJUAN STRATEGIS-5**  
 Mewujudkan PMI yang berfungsi baik, dengan kepemimpinan yang kolektif-kolegial dan berpedoman kuat pada Prinsip-Prinsip Dasar Gerakan Internasional PM/BSM dengan tatakelola organisasi dan Markas yang sinergis dalam pelaksanaan kegiatan, peraturan organisasi, sistem, dan prosedur yang berlaku.

**HASIL JANGKA MENENGAH 5.1**  
 (Outcome)  
 Kepemimpinan dan Tatakelola Organisasi PMI di semua tingkatan dilaksanakan secara konsekuen dengan berpedoman pada Prinsip-prinsip Kepalangmerahan

**HASIL JANGKA MENENGAH 5.2**  
 (Outcome)  
 Fungsi Kemarkas berjalan sesuai Tupoksi terutama aspek manajemen dan administrasi dalam mendukung pelayanan Kepalangmerahan

**HASIL JANGKA MENENGAH 5.3**  
 (Outcome)  
 Manajemen dan pengembangan sistim pendidikan-pelatihan PMI berfungsi dengan baik

**HASIL JANGKA PENDEK**  
 (Output)

- 5.1.1 AD/ART/PO dan aturan pelaksanaannya serta produk hukum lainnya tersedia dan diimplementasikan di semua tingkatan
- 5.1.2 Mekanisme konsultasi regular antara Pengurus dan Dewan Kehormatan PMI disemua tingkatan berfungsi.
- 5.1.3 Kegiatan pembinaan berjenjang dalam bidang organisasi dan program dilakukan secara rutin serta sesuai kebutuhan.
- 5.1.4 Komunikasi dan koordinasi internal, serta antar tingkatan PMI, termasuk lintas Prov/Kab/Kota terlaksana sesuai kerangka acuan yang disepakati.

**HASIL JANGKA PENDEK**  
 (Output)

- 5.2.1 Terlaksananya tatakelola kepegawaian yang menyeluruh dan berorientasi pada pengembangan kompetensi dan kesejahteraan pegawai.
- 5.2.2 Terlaksananya sistim dan tatakelola keuangan yang akuntabel.
- 5.2.3 Sistim perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan melembaga.
- 5.2.4 Hasil kajian pengembangan organisasi PMI digunakan oleh PMI di semua tingkatan.

**HASIL JANGKA PENDEK**  
 (Output)

- 5.3.1 Pelatih dan fasilitator dilatih, dan disertifikasi oleh PMI maupun badan yang berwenang, tersedia secara memadai untuk dimobilisasi di berbagai pelatihan.
- 5.3.2 Kurikulum pelatihan nasional yang dibutuhkan oleh internal/eksternal dimutakhirkan oleh PMI dan diakreditasi oleh Kementerian dan Lembaga Nasional (Kemenkes, Kemenakertrans, BNPB).
- 5.3.3 Pelatihan-pelatihan PMI dikelola sesuai dengan panduan manajemen pelatihan.
- 5.3.4 Standar Kerja Kompetensi Nasional Indonesia (SKNI) di bidang layanan kemanusiaan merujuk pada perundang-undangan Kepalangmerahan tersedia dan diimplementasikan.

#### **Tujuan Strategis-5**

Mewujudkan PMI yang berfungsi baik, dengan Kepemimpinan yang berpedoman kuat pada Prinsip-Prinsip Dasar Gerakan Internasional PM/BSM dengan tatakelola organisasi dan Markas yang sinergis dalam pelaksanaan kegiatan, peraturan organisasi, sistem, dan prosedur yang berlaku.

#### **Hasil Jangka Menengah (Outcome) 5.1**

Dengan diterbitkannya UU No/1/2018 dan PP No.7/2019 tentang Kepalangmerahan, maka produk-produk peraturan PMI, seperti AD/ART, Peraturan Organisasi (PO) dan peraturan PMI lainnya, pada tingkatan tertentu perlu disesuaikan dan diperbaharui. AD/ART dan PO ini tidak hanya tersedia dalam bentuk dokumen, tetapi juga disosialisasikan secara terus-menerus agar seluruh entitas organisasi PMI memahami konsekuensi pasal demi pasal dan melaksanakannya dengan sebaik-baiknya.

Untuk mewujudkan PMI yang berfungsi baik, diperlukan Kepemimpinan yang berkarakter khas kepalangmerahan, yaitu berkomitmen untuk menjabarkan Prinsip-Prinsip Dasar Gerakan dalam menentukan arah dan kebijakan organisasi, baik secara internal maupun eksternal, serta berkomitmen untuk mewujudkan Visi dan Misi PMI. Untuk itu, peran Pelindung dan Dewan Kehormatan PMI sebagai bentuk representasi masyarakat, yang menjalankan fungsi pengawasan perlu dihidupkan. Hal ini selaras dengan mandat UU No.1/2018, Bab VII Pembinaan dan Pengawasan, Pasal 33, yang berbunyi: “Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan Kepalangmerahan”.

Oleh karena itu, diperlukan peraturan pelaksanaan AD/ART, yaitu Peraturan Organisasi PMI yang memuat mekanisme proses pemilihan Kepemimpinan PMI yang sistematis dengan kriteria kepemimpinan yang tepat. Disamping itu, untuk memelihara komitmen Kepemimpinan PMI yang berkarakter kepalangmerahan, maka mekanisme pembinaan organisasi antar tingkatan yang sudah berjalan juga perlu dikembangkan lebih lanjut untuk memastikan ketersediaan saluran komunikasi, koordinasi dan konsultasi yang efektif antar Pengurus PMI

Disamping itu, inisiatif pembentukan forum regional antar Provinsi dan antar PMI Kab/Kota se-Provinsi juga perlu dikembangkan, tidak hanya berfungsi sebagai saluran komunikasi, koordinasi dan konsultasi, tetapi juga untuk mengembangkan inisiatif-inisiatif kerjasama lintas PMI Provinsi dan PMI Kab/Kota.

#### **Hasil Jangka Menengah (Outcome) 5.2**

Markas PMI yang berfungsi baik dikelola oleh Kepala Markas dan unit-unit kerja dalam struktur dengan TUPOKSI yang jelas. Sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsinya, unit-unit kerja Markas dikelola oleh Staf yang kompeten dalam jumlah yang memadai dengan uraian tugas dan tanggungjawab tertulis. Untuk itu, Markas PMI perlu memiliki Peraturan Kepegawaian yang mencakup semua aspek manajemen kepegawaian, mulai dari rekrutment, penempatan, pembinaan, penilaian kinerja, layanan purna-bhakti hingga kesejahteraan pegawai. Peraturan Kepegawaian ini, selain untuk memelihara dan meningkatkan kinerja Staf Markas, juga untuk menjamin keberadaan (eksistensi) Pegawai Markas dan tugas-tugas Kemarkasan yang berkelanjutan.

Mengingat PMI adalah organisasi sosial kemanusiaan yang mengandalkan pendapatannya dari sumber-sumber eksternal, maka PMI disemua tingkatan perlu didukung dengan sistim dan tatakelola keuangan yang memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. Sistim pencatatan keuangan dan pelaporan PMI perlu diseragamkan, baik sistim akuntansinya, nomenklatur maupun format pelaporannya, dan dikelola oleh Pegawai keuangan yang kompeten.

Markas yang berfungsi baik juga didukung dengan implementasi sistim perencanaan yang berorientasi pada tujuan, monitoring dan evaluasi yang berorientasi pada pembelajaran dan pelaporan yang berorientasi pada hasil/capaian. Untuk membantu proses perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan maka diperlukan data dan informasi yang akan dikelola melalui sistim informasi manajemen (SIM) organisasi berbasis teknologi informatika. Diharapkan, dengan adanya SIM PMI maka implementasi sistim PMER dapat melembaga serta berlangsung secara konsisten dan tepat waktu.

Disamping itu, untuk menyiapkan sebuah literatur, analisis dan kerangka berpikir yang komprehensif yang dapat membantu PMI disemua tingkatan dalam rangka membangun kinerja dan untuk mampu mewujudkan Visi dan Misi PMI, diperlukan inisiatif kajian dan pengembangan. Kegiatan kajian dan pengembangan ini diharapkan dapat menghasilkan referensi yang dapat menjadi acuan pengembangan organisasi PMI secara umum, dan khususnya, strategi tepat-guna untuk pengembangan program-program PMI kedepan.

#### **Hasil Jangka Menengah (Outcome) 5.3**

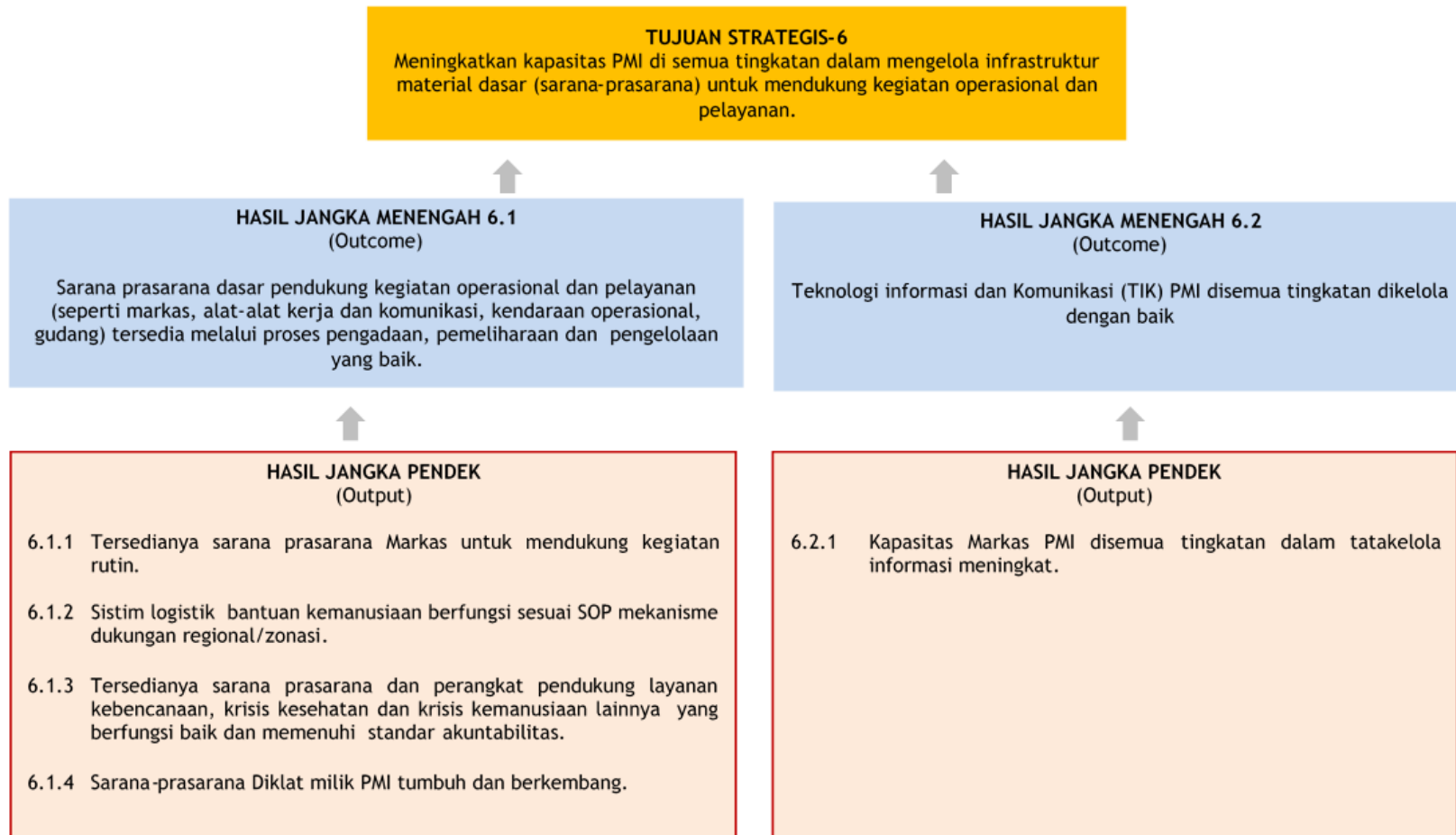
Sistim pendidikan dan pelatihan PMI berfungsi baik dapat dicapai bila didukung oleh ketersediaan Pelatih/Fasilitator yang bersertifikat dan kurikulum yang terakreditasi serta digunakan dalam semua pelatihan-pelatihan PMI, baik untuk keperluan internal maupun eksternal.

Keberadaan Pelatih dan Fasilitator Pendidikan dan pelatihan kepalangmerahan perlu ditingkatkan, baik dalam arti jumlah maupun kualifikasinya. Penambahan Pelatih dan Fasilitator adalah dalam rangka penggantian dan regenerasi, sedangkan yang masih eksis ditingkatkan kualitasnya melalui mobilisasi untuk frekuensi jam mengajar dan proses sertifikasi.

Seiring dengan itu, kurikulum pelatihan nasional juga ditingkatkan kualitasnya melalui pemuktahirkan materi secara berkala, kurikulum pelatihan nasional diakreditasi oleh Kementerian dan lembaga berwenang. Adapun penyelenggaraan Dikat PMI disetiap tingkatan mengikuti sistim akreditasi dari PMI Pusat

**Program dan kegiatan dibawah Tujuan Strategis-5 diarahkan pada:**

1. Pembinaan Organisasi dan Kelembagaan;
2. Peningkatan Kapasitas tatakelola Markas;
3. Peningkatan sistem pendidikan dan pelatihan PMI di semua tingkatan.



### **Tujuan Strategis-6**

Meningkatkan kapasitas PMI di semua tingkatan dalam mengelola infrastruktur material dasar (sarana-prasarana) untuk mendukung kegiatan operasional dan pelayanan.

#### **Hasil Jangka Menengah (Outcome) 6.1**

**Markas.** Keberadaan Markas sangat diperlukan untuk mendukung kegiatan operasional dan pelayanan PMI dan sebagai tempat Relawan berkegiatan. Oleh karena itu, ketersediaan sarana-prasarana dasar yang melengkapi Markas merupakan kebutuhan dasar organisasi yang, tidak bisa tidak, perlu dipenuhi secara berangsur, baik secara finansial sesuai kemampuan maupun dengan memanfaatkan bantuan dari sumber-sumber lain.

**Gudang Strategis.** Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, membawa konsekuensi yang khas yaitu, masalah akses, jarak tempuh dan waktu tempuh. Masalah khas ini juga sangat mempengaruhi efektifitas dan efisiensi mobilisasi sumber daya PMI untuk respons bencana. Untuk mempermudah akses dan mengurangi kendala jarak dan waktu tempuh, PMI telah membangun 6 gudang regional dan sedang menggarap 10 gudang provinsi di kawasan Indonesia Timur. Dengan adanya 16 gudang strategis ini maka mobilisasi bantuan kemanusiaan dapat dikelola secara efektif dan efisien melalui mekanisme regional (berbasis gudang regional) dan zonasi (berbasis gudang provinsi).

**Peralatan tanggap darurat.** Peralatan standar lapangan dan barang bantuan bencana harus selalu tersedia dan layak pakai menunjukkan tingkat kesiapsiagaan suatu Perhimpunan Nasional. Oleh karena itu, PMI dengan frekuensi bencana tinggi serta wilayah rawan bencana yang tersebar, tidak bisa tidak, perlu menyediakan peralatan standar lapangan dan barang bantuan dalam jumlah dan jenis yang bervariasi, di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Penyediaan peralatan standar lapangan dan barang bantuan bencana ini dipadukan dengan pengembangan mekanisme mobilisasi regional dan zonasi gudang-gudang strategis PMI.

**Sarana-Prasarana Pendidikan dan Pelatihan.** Pendirian sarana pendidikan-pelatihan merupakan inisiatif mandiri di beberapa PMI Provinsi dan Kabupaten/Kota. Disamping bertujuan untuk mengakomodasi pelatihan PMI itu sendiri, juga dirancang untuk sumber pendapatan. Perlu adanya standarisasi perlengkapan Diklat sebagai patokan (*benchmark*) minimum kualifikasi sarana-prasarana dan juga sebagai referensi untuk unit PMI lainnya yang akan mendirikan sarana Diklat.

#### **Hasil Jangka Menengah (Outcome) 6.2**

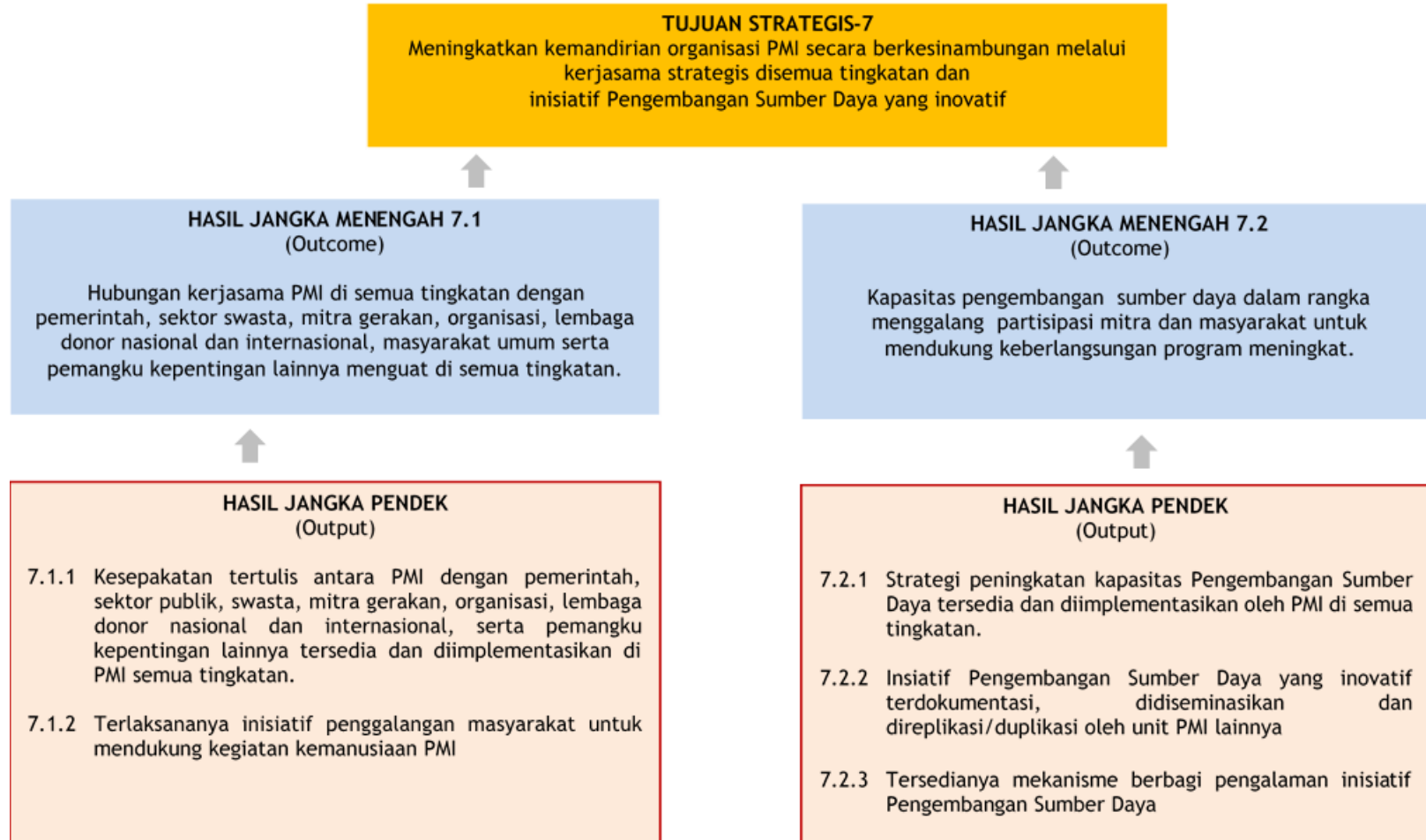
Organisasi modern menuntut ketersediaan data dan informasi yang terkini, akurat yang berfungsi untuk mendukung semua aspek manajemen, mulai dari perencanaan, monitoring, evaluasi hingga pelaporan. Untuk itu diperlukan perangkat dasar teknologi informasi dan komunikasi (TIK) disemua unit-unit PMI, yang dapat menghubungkan unit-unit PMI dimanapun sebagai satu kesatuan jejaring informasi dan komunikasi.

Kondisi geografis Indonesia yang sedemikian rupa, maka ketersediaan perangkat dasar TIK telah menjadi kebutuhan dasar organisasi yang harus terpenuhi, baik ketersediaan perangkat keras, perangkat lunak, sistem yang menghubungkannya, biaya operasionalnya hingga personil yang kompeten untuk mengoperasikannya. Penyediaan perangkat dasar TIK dan pelatihan untuk personil yang mengoperasikannya, tidak bisa tidak, harus dipenuhi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

**Program dan Kegiatan dibawah Tujuan Strategis-6 ini diarahkan pada:**

1. Penguatan Markas PMI disemua tingkatan
2. Pengembangan Gudang Strategis untuk mendukung operasi kebencanaan, krisis kesehatan dan krisis kemanusiaan lainnya;
3. Pengembangan perangkat dasar teknologi informasi dan komunikasi





### **Tujuan Strategis-7**

Meningkatkan kemandirian organisasi PMI secara berkesinambungan melalui kerjasama strategis disemua tingkatan dan inisiatif Pengembangan Sumber Daya yang inovatif

#### **Hasil Jangka Menengah (Outcome) 7.1**

Unit-Unit PMI yang hendak membangun kemitraan perlu memastikan bahwa bidang-bidang yang dikerjakasikan relevan dengan Rencana Strategis dan Rencana Operasional PMI, tidak bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Dasar Kepalangmerahan dan berdasarkan prinsip kesetaraan. Dilain pihak, unit-unit PMI yang hendak membangun kemitraan, juga perlu memiliki keunggulan tertentu yang layak dikerjakasikan, dalam arti, memiliki nilai tambah bagi para pihak dalam jangka panjang (berkelanjutan). Untuk itu, unit-unit PMI perlu memelihara dan meningkatkan kualitas bidang-bidang keunggulannya untuk dapat menjangkau mitra potensial.

Kerjasama PMI dengan pemerintah, sektor pelayanan publik, swasta, mitra gerakan, organisasi, lembaga donor nasional dan internasional, serta pemangku kepentingan lainnya diperkuat secara formal dengan kesepakatan tertulis. Hal ini untuk memastikan perlindungan hukum atas implementasi kerjasama tersebut secara konsisten di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota sasaran kerjasama.

PMI disemua tingkatan juga perlu mencari terobosan-terobosan baru (inovasi) dalam rangka menggalang partisipasi masyarakat dibidang sosial-kemanusiaan untuk mendukung kinerja PMI. Penggalangan dukungan masyarakat tidak terbatas pada donasi, tetapi memanfaatkan semua potensi masyarakat dalam berbagai bentuk yang relevan dan aman dengan kebutuhan PMI seperti:

- Jejaring masyarakat;
- Kelompok profesi;
- Anggota/kelompok masyarakat yang memiliki akses ke sumber-sumber pembangunan;
- Anggota/kelompok masyarakat yang memiliki popularitas;
- Anggota/kelompok filantropis;
- Masyarakat umum.

#### **Hasil Jangka Menengah (Outcome) 7.2**

Terkait dengan Outcome 7.1, PMI disemua tingkatan perlu membangun kapasitasnya dalam bidang pengembangan, baik pengetahuan dan ketrampilan personil maupun tatakelola pengembangan usaha. Untuk itu, panduan-panduan terkait inisiatif Pengembangan Sumber Daya, bimbingan/pendampingan teknis dan pelatihan-pelatihan terkait manajemen usaha akan diberikan kepada pesonil PMI disemua tingkatan.

PMI Prov/Kab-Kota dengan inisiatif Pengembangan Sumber Daya yang maju akan didokumentasikan dan dipublikasikan secara internal untuk pembelajaran dan dijadikan model untuk kunjungan-kunjungan belajar oleh unit PMI lainnya.

**Program dan Kegiatan dibawah Tujuan Strategis-7 ini diarahkan pada:**

1. Pengembangan kerjasama strategis;
2. Meningkatkan upaya diversifikasi sumber pendapatan.

## **F. KERANGKA MONITORING DAN EVALUASI**

Rencana Strategis dan Rencana Operasional PMI 2019-2024 ini telah dilengkapi dengan Indikator (unit pengukuran) dan beserta target capaiannya. Jumlah total keseluruhan indikator adalah 168.

Pada tataran Tujuan Strategis dari Rencana Strategis PMI 2019-2024, terdapat 16 Indikator Kunci Kinerja (*Key Performance Indikator*) yang akan dievaluasi capaiannya pada akhir tahun 2024 (lihat lampiran-2, Matriks Indikator dan Uraian Indikator untuk Monitoring dan Evaluasi).

Pada tataran Output dari Rencana Operasional, terdapat 55 pernyataan Output dengan 152 indikator yang akan dievaluasi capaiannya setiap tahun realisasi rencana kerja (lihat lampiran-2, Matriks Indikator dan Uraian Indikator untuk Monitoring dan Evaluasi).

Upaya monitoring dilaksanakan sepanjang pelaksanaan Rencana Kerja tahunan PMI di semua tingkatan. Hasil monitoring diwujudkan dalam bentuk laporan kegiatan, laporan bulanan, triwulan dan tahunan.

Untuk dapat melaksanakan monitoring dan evaluasi, Markas Pusat PMI telah menyusun buku Referensi Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, yang dapat menjadi acuan kegiatan monitoring dan evaluasi PMI disemua tingkatan.

## **G. PENUTUP**

Proses penyusunan Rencana Strategis ini telah melalui proses konsultatif dan partisipatif ke semua regional. Proses ini diharapkan dapat menumbuhkan rasa kepemilikan (*sense of ownership*), yang pada gilirannya juga diharapkan dapat menumbuhkan komitmen terhadap capaian tujuan-tujuan Rencana Strategis ini.

Disamping itu, proses pelebagaan Rencana Strategis PMI ini ke dalam sistim pembinaan Organisasi PMI di semua tingkatan juga perlu diperkuat. Hal ini akan tercermin apabila PMI di semua tingkatan telah menyusun rencana kerja berdasarkan Rencana Strategis yang kemudian diselaraskan dengan upaya-upaya lain terkait pembinaan organisasi PMI secara keseluruhan.

# LAMPIRAN

**DAFTAR INDIKATOR KUNCI KINERJA  
RENCANA STRATEGIS PMI 2019 - 2024**

**Misi - 1**

**Memelihara reputasi organisasi PMI di tingkat nasional dan internasional**

No	Indikator	Uraian Indikator	Alat Verifikasi	Target	Frekuensi Pelaporan
<b>Tujuan Strategis-1:</b> Memelihara reputasi dan meningkatkan akuntabilitas PMI sebagai organisasi kemanusiaan di tingkat nasional maupun internasional.					
1	% responden yang di survei dapat menyebutkan mandat PMI dengan benar	<p>Responden adalah personil PMI dan masyarakat umum berusia 17 tahun ke atas yang memberi umpan balik atas survei PMI Pusat dan dapat menyebutkan kegiatan PMI secara benar, setidaknya dapat menyebutkan 3 mandat dari UU No.1 Tahun 2018, BAB V, bagian kesatu, pasal 22 yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memberikan bantuan kepada korban konflik bersenjata, kerusuhan, dan gangguan keamanan lainnya;</li> <li>b. Memberikan pelayanan darah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>c. Melakukan pembinaan relawan;</li> <li>d. Melaksanakan Pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan Kepalangmerahan;</li> <li>e. Menyebarkan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Kepalangmerahan;</li> <li>f. Membantu dalam penanganan musibah dan/atau bencana di dalam dan di luar negeri;</li> <li>g. Membantu pemberian pelayanan kesehatan dan sosial; dan</li> <li>h. Melaksanakan tugas kemanusiaan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah.</li> </ol> <p><b>Kalkulasi:</b> Responden yang dapat menyebutkan minimal 3 mandat PMI sesuai UU No. 1 Tahun 2018 berbanding dengan total Responden yang di survei</p>	Hasil survei tingkat pemahaman dan kepuasan terhadap layanan PMI	50%	1 x 5 tahun
2	% responden yang memberikan penilaian positif terhadap kinerja organisasi PMI di semua tingkatan	<p>Penilaian positif adalah umpan balik dari masyarakat terhadap tingkat kepuasan terhadap layanan PMI.</p> <p><b>Kalkulasi:</b> Jumlah responden dengan penilaian positif berbanding dengan total responden yang di survei</p>	Hasil survei tingkat pemahaman dan kepuasan terhadap layanan PMI	Aktual	1 x 5 tahun

No	Indikator	Uraian Indikator	Alat Verifikasi	Target	Frekuensi Pelaporan
3	% orang yang dijangkau layanan kedaruratan PMI yang memberikan penilaian positif melalui mekanisme umpan balik yang tersedia	<p>Adalah orang yang dijangkau layanan kedaruratan PMI yang memberikan umpan balik melalui saluran komunikasi telepon, media sosial, tatap muka yang dikelola oleh PMI Pusat untuk layanan <i>Community Enngagement and Accountability</i> (CEA), yang dilaksanakan sesuai kebutuhan.</p> <p>Penilaian positif adalah <i>compliment</i> (penghargaan, apresiasi), information (pemberitahuan), input (masukan untuk perbaikan layanan). Penilaian negatif adalah <i>complaint</i> atau keluhan, tuntutan.</p> <p><b><u>Kalkulasi:</u></b> Total orang yang dijangkau layanan kedaruratan PMI yang memberikan penilaian positif pada setiap kejadian bencana berbanding total responden yang memberikan umpan balik.</p> <p>Orang yang dijangkau yang memberikan umpan balik dihitung sebagai satu orang walaupun memberikan penilain positif melalui mekanisme umpan balik PMI lebih dari 1 kali.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan CEA</li> <li>• Logbook CEA</li> </ul>	30%	1 x 5 tahun

Misi - 2

Menjadi organisasi kemanusiaan terdepan yang memberikan layanan berkualitas kepada masyarakat sesuai dengan Prinsip-prinsip Dasar Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah

No	Indikator	Uraian Indikator	Alat Verifikasi	Target	Frekuensi Pelaporan
<p><b>Tujuan Strategis-2:</b> Meningkatkan ketersediaan darah yang aman, mudah dijangkau, berkualitas dan berkesinambungan di seluruh Indonesia.</p>					
4	% UDD PMI Prov/Kab/Kota memenuhi standar Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB)	<p>Standar Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) mencakup semua elemen praktik yang akan menghasilkan produk atau layanan akhir yang dapat memenuhi spesifikasi yang ditetapkan secara konsisten (<i>Australian Code of GMP 2000</i>). Standar ini merupakan bagian dari upaya penjaminan kualitas yang menjamin bahwa komponen darah diproduksi dan dikontrol secara konsisten berdasarkan standar kualitas yang sesuai dengan tujuan penggunaannya, mengikuti spesifikasi yang telah ditetapkan (<i>WHO Guidelines on GMP 2011</i>).</p> <p><b>Kalkulasi:</b> Jumlah UDD PMI yang telah mempraktikkan standar CPOB berbanding dengan jumlah UDD PMI se-Indonesia.</p>	Laporan UDD Pusat tentang kapasitas UDD PMI se-Indonesia	23%	1 x 5 tahun
5	% UDD PMI Prov/Kab/Kota memenuhi standar nasional	<p>Standar Nasional mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan No. 91 Tahun 2015 tentang standar pelayanan transfusi darah yang disusun oleh tim gabungan dari Kemenkes, PMI dan pihak terkait, sesuai standar AABB (<i>American Assosiation Blood Bank</i>), <i>European Guidelines</i> dan WHO.</p> <p><b>Kalkulasi:</b> Jumlah UDD PMI yang telah melaksanakan standar nasional PMK No. 091 Tahun 2015 berbanding dengan total UDD PMI se-Indonesia.</p>	Laporan UDD Pusat tentang kapasitas UDD PMI se-Indonesia	47%	1 x 5 tahun

No	Indikator	Uraian Indikator	Alat Verifikasi	Target	Frekuensi Pelaporan
<b>Tujuan Strategis-3:</b> Meningkatkan kapasitas PMR dan Relawan sebagai tulang-punggung layanan kemanusiaan PMI secara kuantitas dan kualitas					
6	% Relawan PMI dengan keterampilan spesialis yang dimobilisasi PMI dalam operasi bantuan kemanusiaan	<p>Relawan PMI yang sudah memiliki keterampilan teknis, terlatih dan ditugaskan sesuai dengan kompetensinya dalam operasi bantuan kemanusiaan setidaknya satu kali baik oleh PMI setempat dan/atau mobilisasi di tingkat Provinsi/Nasional.</p> <p><b>Kalkulasi:</b> Jumlah relawan spesialis yang dimobilisasi berbanding dengan total relawan spesialis terlatih yang tercatat.</p> <p>Seorang anggota relawan dihitung sebagai satu orang walaupun dimobilisasi PMI dalam operasi bantuan kemanusiaan lebih dari satu kali.</p>	Laporan PMI Pusat tentang mobilisasi personil untuk operasi bantuan kemanusiaan	30%	1 x 5 tahun
7	% Unit PMR aktif	<p>Adalah Unit PMR yang secara teratur menyelenggarakan kegiatan dan melapor secara rutin (1 x 3 bulan) kepada PMI Kab/Kota setempat.</p> <p><b>Kalkulasi:</b> Jumlah Unit PMR aktif yang dicatat oleh PMI Kab/Kota (kumulatif per tahun dan tidak berulang) berbanding dengan jumlah Unit PMR PMI se-Indonesia</p>	Laporan tahunan PMI Kab/Kota	50%	1 x 5 tahun



No	Indikator	Uraian Indikator	Alat Verifikasi	Target	Frekuensi Pelaporan
<b>Tujuan Strategis-4:</b> Meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan penanggulangan bencana, krisis kesehatan, krisis kemanusiaan lainnya dan program pemberdayaan masyarakat melalui penguatan unit-unit pelayanan PMI di semua tingkatan.					
8	% Markas PMI dengan upaya kesiapsiagaan institusional	Adalah PMI Pusat/Prov/Kab/Kota yang melaksanakan upaya kesiapsiagaan institusional antara lain, tidak terbatas pada: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memiliki Pengurus/Pegawai Markas bidang pelayanan (PB dan kesehatan);</li> <li>• Membina satuan tanggap darurat (bencana, krisis kesehatan dan krisis kemanusiaan lainnya);</li> <li>• Memiliki Posko 24/7;</li> <li>• Memiliki Rencana Kontinjensi/kedaruratan dan SOP yang diperbaharui secara berkala;</li> <li>• Memiliki dana siap pakai</li> </ul> <b>Kalkulasi:</b> Jumlah PMI Pusat/Prov/Kab/Kota yang memiliki setidaknya 3 upaya kesiapsiagaan institusional berbanding dengan jumlah Markas PMI se-Indonesia	Laporan konsolidasi BOCA dan atau PER ( <i>Preparedness for Effective Response</i> )	20%	1 x 5 tahun
9	Jumlah orang yang dijangkau langsung layanan PMI	Adalah individu/keluarga/kelompok masyarakat yang dijangkau langsung layanan darurat bencana dan kesehatan, krisis kemanusiaan lainnya, serta program/kegiatan lain-lain di luar situasi kedaruratan, termasuk program/kegiatan berbasis masyarakat.  Unit pengukuran ialah orang. Data orang yang dijangkau dalam unit pengukuran KK perlu dikonversi menjadi orang.  <b>Kalkulasi:</b> Jumlah total orang yang dijangkau layanan PMI disemua tingkatan yang tercatat oleh PMI dipilah berdasarkan kategori jenis kelamin dan usia	Laporan konsolidasi layanan PMI	Aktual	1 x 5 tahun

No	Indikator	Uraian Indikator	Alat Verifikasi	Target	Frekuensi Pelaporan
10	Jumlah komunitas siaga binaan PMI dalam bidang pengurangan risiko bencana dan krisis kesehatan	<p>Komunitas Siaga adalah kelompok masyarakat desa, lembaga pendidikan dasar/menengah/tinggi yang dibina oleh PMI Kab/Kota untuk upaya pengurangan risiko bencana dan atau upaya pencegahan krisis kesehatan</p> <p><b><u>Kalkulasi:</u></b>            Jumlah komunitas siaga binaan PMI yang dilaporkan oleh PMI Kab/Kota di periode 2019-2024 (kumulatif dan tidak berulang).</p>	Laporan konsolidasi program/proyek berbasis masyarakat	150	1 x 5 tahun

No	Indikator	Uraian Indikator	Alat Verifikasi	Target	Frekuensi Pelaporan
<b>Tujuan Strategis-5:</b> Mewujudkan PMI yang berfungsi baik, dengan Kepemimpinan yang berpedoman kuat pada Prinsip-Prinsip Dasar Gerakan Internasional PM/BSM dan tatakelola organisasi dan Markas yang sinergis dalam pelaksanaan kegiatan, peraturan organisasi, sistem, dan prosedur yang berlaku.					
11	Jumlah Markas PMI di semua tingkatan berfungsi baik	Adalah PMI Pusat, Provinsi, dan Kab/Kota yang memenuhi kriteria berfungsi baik menurut alat penilaian kapasitas organisasi PMI seperti OCAC dan BOCA.  <b>Kalkulasi:</b> Jumlah PMI Pusat/Prov/Kab/Kota yang memenuhi kriteria alat penilaian kapasitas Organisasi PMI dengan skor $\geq 80\%$	Hasil penilaian kapasitas organisasi PMI (OCAC dan BOCA)	1 PMI Pusat, 10 PMI Prov dan 30 PMI Kab/Kota	1 x 5 tahun
12	PMI Kab/Kota melaporkan setidaknya 1 (satu) kegiatan unggulan	Kegiatan unggulan adalah kegiatan yang menjadi andalan Markas dan khas Kepalangmerahan, meliputi kegiatan pembinaan dan pelayanan yang tidak terbatas pada: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inisiatif kegiatan PMR/Relawan binaan PMI Kab/Kota</li> <li>• Inisiatif Kesiapsiagaan institusional PMI Kab/Kota</li> <li>• Pengurangan Risiko Bencana/krisis kesehatan berbasis masyarakat</li> <li>• Pelayanan Sosial</li> <li>• Inisiatif pengembangan sumber daya</li> </ul> Yang memenuhi kriteria: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Berkelanjutan</li> <li>• Didanai oleh sumber-sumber mandiri atau lokal</li> <li>• Melibatkan partisipasi masyarakat (individual, kelompok, komunitas)</li> <li>• Dipublikasi oleh media lokal lebih dari 2 kali dalam setahun</li> <li>• Diketahui dan diverifikasi oleh PMI Provinsi</li> </ul> <b>Kalkulasi</b> Jumlah PMI Kab/Kota dengan kriteria unggulan yang diverifikasi oleh PMI Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan kegiatan unggulan PMI Kab/Kota</li> <li>• Laporan PMI Provinsi</li> <li>• Kutipan media</li> <li>• Penghargaan dari Pemda setempat (opsional)</li> </ul>	Aktual	1x 5 tahun

No	Indikator	Uraian Indikator	Alat Verifikasi	Target	Frekuensi Pelaporan
<b>Tujuan Strategis-6:</b> Meningkatkan kapasitas PMI di semua tingkatan dalam mengelola infrastruktur material dasar (sarana-prasarana) untuk mendukung kegiatan operasional dan pelayanan.					
13	Jumlah gudang strategis PMI berfungsi baik	<p>Adalah gudang regional dan gudang zonasi/provinsi diperuntukkan untuk mobilisasi bantuan logistik operasi bencana melalui mekanisme dukungan regional/zonasi, memiliki manajemen pergudangan yang baik dan mampu menyediakan dukungan dalam operasi tanggap darurat, dengan kriteria tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memiliki Pegawai pengelola gudang</li> <li>• Inventarisasi barang lengkap dan dmukhtahirkan</li> <li>• Memiliki sistim arsip dokumen</li> <li>• Memiliki rencana pemeliharaan barang dan gudang</li> <li>• Memiliki laporan kegiatan gudang per bulan</li> </ul> <p><b>Kalkulasi:</b> Jumlah gudang strategis yang memenuhi seluruh kriteria</p>	Laporan PMI Pusat tentang manajemen pergudangan	6 Gudang Regional, 10 Gudang Zonasi/Provinsi	1 x 5 tahun
14	% pengguna ( <i>user</i> ) SIM PMI yang mengatakan puas terhadap produk/layanan SIM PMI	<p>Adalah Pengurus/Pegawai PMI yang di survei tentang manfaat dari produk/layanan SIM PMI</p> <p><b>Kalkulasi:</b> Jumlah pengguna yang menyatakan puas terhadap produk/layanan SIM PMI berbanding dengan total jumlah pengguna yang di survei.</p>	Laporan survey Bidang IT-Telekom	Aktual	1 x 5 tahun

Misi - 3

Meningkatkan integritas dan kemandirian organisasi melalui kerjasama strategis yang berkesinambungan dengan pemerintah, swasta, mitra gerakan, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya di semua tingkatan PMI dengan mengutamakan keberpihakan kepada masyarakat yang memerlukan bantuan

No	Indikator	Uraian Indikator	Alat Verifikasi	Target	Frekuensi Pelaporan
<b>Tujuan Strategis-7:</b>					
Meningkatkan kemandirian organisasi PMI secara berkesinambungan melalui kerjasama strategis disemua tingkatan dan inisiatif Pengembangan Sumber Daya yang inovatif					
15	Jumlah PMI Prov/Kab/Kota dan Pusat dengan peningkatan penerimaan dana yang bersumber selain dari Pemerintah selama 5 tahun terakhir	Adalah tren peningkatan pendapatan PMI Pusat Prov/Kab/Kota yang bersumber dari sumber-sumber non Pemerintah seperti unit usaha, penggalangan donasi masyarakat lokal, nasional dan Internasional dari tahun ke tahun.  <b>Kalkulasi:</b> Jumlah PMI Provinsi, Kab/Kota dan Pusat dengan penerimaan pendapatan non Pemerintah yang meningkat dari tahun ke tahun.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan penerimaan penggalangan dana;</li> <li>Laporan penerimaan dana unit usaha;</li> <li>Laporan Pertanggungjawaban Kepengurusan PMI Pusat/Prov/Kab/Kota.</li> </ul>	30 PMI Prov dan 30 PMI Kab/Kota	1 x 5 tahun
16	Jumlah PMI Prov/Kab/Kota dan Pusat dengan peningkatan pendapatan total selama 5 tahun terakhir	Adalah peningkatan pendapatan total PMI Pusat/Prov/Kab/Kota, yang bersumber dari Pemerintah, proyek bantuan luar negeri, unit usaha, penggalangan donasi masyarakat lokal, nasional dan internasional.  <b>Kalkulasi:</b> Jumlah PMI Provinsi, Kab/Kota dan Pusat dengan total pendapatan dari berbagai sumber yang meningkat dari tahun ke tahun.	Laporan Pertanggungjawaban Kepengurusan PMI Prov/Kab/Kota	34 PMI Prov dan 400 PMI Kab/Kota	1 x 5 tahun

## RENCANA OPERASIONAL 2019 - 2024 DAN RUJUKAN KEGIATAN

### TUJUAN STRATEGIS-1

**Memelihara reputasi dan meningkatkan akuntabilitas PMI sebagai organisasi kemanusiaan di tingkat nasional maupun internasional.**

No	Indikator	Uraian Indikator	Satuan Pengukuran	Target	Alat Verifikasi	Frekuensi Pelaporan	Rujukan Kegiatan
<b>Outcome 1.1:</b> Pemahaman personil PMI dan pemangku kepentingan eksternal tentang prinsip-prinsip dan nilai-nilai kemanusiaan dalam kebijakan organisasi dan program/kegiatan kepalangmerahan meningkat.							
17	PMI Pusat, Provinsi dan Kab/Kota menjalankan fungsi diseminasi Kepalangmerahan dengan baik	<p>Adalah PMI Prov, Kab/Kota dan Pusat mampu mengimplementasikan kebijakan diseminasi sesuai <b>Juklak/Juknis</b> diseminasi yang diterbitkan oleh PMI Pusat dengan kriteria minimal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Memiliki <i>focal point</i> diseminasi (Pengurus, Pegawai dan Relawan);</li> <li>Memiliki rencana kegiatan tahunan diseminasi;</li> <li>Mengalokasikan dana untuk diseminasi.</li> </ul> <p><b>Kalkulasi:</b> Jumlah unit kerja diseminasi PMI disemua tingkatan yang memenuhi kriteria per uraian indikator.</p>	Unit	Tahun 2024, 1 PMI Pusat, 34 PMI Provinsi dan <b>120</b> PMI Kab/Kota	Laporan OCAC, BOCA; Laporan SAF ( <i>Safer Access Framework</i> )	1 x 5 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penilaian kapasitas organisasi (BOCA dan SAF);</li> <li>Orientasi Organisasi dan Tatakelola Kepalangmerahan.</li> </ul>

No	Indikator	Uraian Indikator	Satuan Pengukuran	Target	Alat Verifikasi	Frekuensi Pelaporan	Rujukan Kegiatan
<b>Output 1.1.1:</b> Peraturan Kepalaangmerahan didiseminasikan dan disosialisasikan ke semua pemangku kepentingan terkait							
18	PMI Pusat/Prov/Kab/Kota melaksanakan sosialisasi Peraturan Kepalaangmerahan	<p>Sosialisasi adalah kegiatan yang dilakukan PMI dalam bentuk seminar, lokakarya dan kegiatan lainnya yang bertujuan untuk menyebarluaskan pemahaman tentang peraturan perundang-undangan kepalaangmerahan.</p> <p>Diplomasi kemanusiaan upaya menghimbau para pembuat keputusan dan pemimpin opini untuk bertindak, setiap saat, demi kepentingan orang-orang yang rentan, dan dengan penuh penghormatan terhadap prinsip-prinsip dasar kemanusiaan dan sesuai dengan isu-isu kemanusiaan global terkini (merujuk pada Strategi 2030).</p> <p>HHI (Hukum Humaniter Internasional) batang tubuh hukum yang mencakup Konvensi Jenewa dan Konvensi Den Haag beserta perjanjian-perjanjian, yurisprudensi, serta hukum kebiasaan internasional yang mengikutinya. HHI menetapkan perilaku dan tanggung jawab negara-negara yang berperang, negara-negara netral, dan individu-individu yang terlibat peperangan, yaitu terhadap satu sama lain dan terhadap orang-orang sipil (tidak bersenjata, bukan pihak yang terlibat perang) yang dilindungi.</p> <p><b>Kalkulasi:</b> Cukup jelas</p>	Unit	1 PMI Pusat, 34 PMI Prov, 100 PMI Kab/Kota	Laporan kegiatan sosialisasi Peraturan Kepalaangmerahan PMI	1 x 2 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kunjungan sosialisasi secara internal/PMI dan eksternal/stakeholders;</li> <li>Kunjungan diplomasi kemanusiaan/Advokasi ke lembaga-lembaga Pemerintah/Non-Pemerintah;</li> <li>Seminar/lokakarya implementasi UU kepalaangmerahan dan Peraturan Pelaksananya;</li> <li>Monitoring implementasi UU Kepalaangmerahan dan Peraturan Pelaksananya;</li> <li>Terkait <i>Red Ready</i>, pendekatan kepada lembaga eksekutif dan legislatif terkait Perundang-undangan Kepalaangmerahan;</li> <li>Meningkatkan penghayatan dan pengamalan Prinsip-Prinsip Dasar Kepalaangmerahan melalui pendidikan, pelatihan dan orientasi Kepalaangmerahan.</li> </ul>
19	Lembaga dan instansi memperoleh sosialisasi Peraturan Kepalaangmerahan	<p>Adalah lembaga atau instansi yang menghadiri seminar, lokakarya dan kegiatan lainnya yang bertujuan untuk menyebarluaskan pemahaman tentang peraturan kepalaangmerahan dan orang/pejabat pengambil keputusan yang berkompeten terhadap isu-isu kemanusiaan</p> <p><b>Kalkulasi:</b> Total peserta dari semua lembaga dan instansi yang menjadi sasaran sosialisasi Peraturan Kepalaangmerahan. Lembaga dan Instansi dihitung satu kali walaupun menerima sosialisasi lebih dari satu kali.</p>	Unit	10	Laporan kegiatan sosialisasi Peraturan Kepalaangmerahan PMI	1 x 2 tahun	

No	Indikator	Uraian Indikator	Satuan Pengukuran	Target	Alat Verifikasi	Frekuensi Pelaporan	Rujukan Kegiatan
<b>Output 1.1.2.</b>							
Media Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) Diseminasi Kepalangmerahan dan Diplomas Kemanusiaan yang diperbarui tersedia di setiap tingkatan.							
20	Jumlah media KIE Diseminasi Kepalangmerahan didistribusikan oleh Markas PMI dan UDD di Pusat/Prov/Kab/Kota.	Media KIE Diseminasi Kepalangmerahan adalah media komunikasi, informasi, dan edukasi cetak/elektronik yang dikembangkan secara khusus oleh PMI Pusat dan dicetak dalam jumlah yang cukup untuk mendukung diseminasi nilai-nilai kepalangmerahan  <u>Kalkulasi:</u> Jumlah materi KIE diseminasi kepalangmerahan yang diproduksi untuk didistribusikan kepada stakeholder/kelompok sasaran diseminasi.	Set	Aktual	Tanda terima distribusi media KIE	1 x 1 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meninjau, merevisi dan atau menyusun media KIE Diseminasi Kepalangmerahan sesuai kelompok sasaran (mis. jurnalis, kelompok usia sekolah, usia bekerja).</li> <li>Finalisasi dan distribusi media KIE diseminasi Kepalangmerahan untuk PMR dan Guru Pembina PMR, serta lembaga dan instansi terkait.</li> </ul>
21	Jumlah lembaga dan instansi yang memperoleh materi KIE diseminasi Kepalangmerahan	Adalah lembaga sasaran diseminasi seperti sekolah, lembaga pemerintahan relevan, organisasi sipil masyarakat, lembaga TNI/Polri yang menerima seperangkat materi KIE diseminasi dan mendistribusikannya di lingkungan masing-masing. <u>Kalkulasi:</u> Jumlah materi KIE diseminasi kepalangmerahan yang diterima oleh stakeholder/kelompok sasaran diseminasi.  Lembaga dan Instansi dihitung satu kali walaupun menerima lebih dari satu kali media KIE.	Unit	10	Berita acara penerimaan KIE diseminasi oleh lembaga sasaran	1 x 2 tahun	



No	Indikator	Uraian Indikator	Satuan Pengukuran	Target	Alat Verifikasi	Frekuensi Pelaporan	Rujukan Kegiatan
<b>Output 1.1.3.</b>							
Diseminasi nilai-nilai kemanusiaan dan kepalangmerahan dilaksanakan oleh diseminator di semua tingkatan							
22	Jumlah diseminator Kepalangmerahan di PMI Pusat/Prov/Kab/Kota.	<p>Diseminator adalah personil PMI yang telah lulus pelatihan diseminasi Kepalangmerahan, dimana salah satu sesi materi yang disampaikan terkait dengan HHI (Hukum Humaniter Internasional), dan memiliki sertifikat Pelatihan Manajemen Diseminasi Kepalangmerahan.</p> <p><b>Kalkulasi:</b> Total diseminator PMI yang memperoleh sertifikasi kelulusan yang diterbitkan oleh PMI. Pencatatan terpilah berdasarkan jenis kelamin dan kategori usia.</p>	Orang	68	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan kegiatan pelatihan;</li> <li>Database alumni pelatihan.</li> </ul>	1 x 1 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meninjau dan mensosialisasikan strategi diseminasi Kepalangmerahan;</li> <li>Meninjau, merevisi kurikulum dan pedoman pelatihan diseminasi Kepalangmerahan;</li> <li>Melaksanakan pelatihan spesialisasi Kepalangmerahan (diseminator) di tingkat nasional dan provinsi;</li> <li>Menerbitkan panduan diseminasi untuk berbagai kelompok sasaran;</li> <li>Pelatihan penyegaran Pelatih/Fasilitator bidang Diseminasi Kepalangmerahan.</li> </ul>
23	Jumlah diseminator PMI Pusat/Prov/Kab/Kota yang dimobilisasi untuk kegiatan diseminasi Kepalangmerahan	<p>Diseminator PMI Pusat/Prov/Kab/Kota yang ditugaskan oleh Markas PMI untuk melakukan kegiatan diseminasi di wilayah kerja masing-masing.</p> <p><b>Kalkulasi:</b> Cukup jelas.</p> <p>Seorang diseminator dihitung sebagai satu orang walaupun memfasilitasi kegiatan diseminasi lebih dari satu kali. Pencatatan terpilah berdasarkan jenis kelamin dan kategori usia.</p>	Orang	68	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan kegiatan penugasan ;</li> <li>Database (mobilisasi ) alumni pelatihan.</li> </ul>	1 x 1 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mobilisasi Diseminator PMI;</li> <li>Melaksanakan kegiatan diseminasi kepalangmerahan;</li> <li>Monitoring lembaga yang memperoleh diseminasi Kepalangmerahan;</li> <li>Pemuktahiran database alumni pelatihan.</li> </ul>

No	Indikator	Uraian Indikator	Satuan Pengukuran	Target	Alat Verifikasi	Frekuensi Pelaporan	Rujukan Kegiatan
<b>Output 1.1.4.</b>							
Kerja sama dengan institusi terkait (TNI, Polri, universitas, sekolah, LSM) dan masyarakat terjalin untuk mendiseminasikan nilai-nilai kemanusiaan dan Kepalangmerahan.							
24	Jumlah Mitra yang bekerjasama dengan PMI di bidang diseminasi Kepalangmerahan	Mitra diseminasi PMI adalah lembaga TNI/Polri, Perguruan Tinggi, Sekolah Dasar/Menengah, lembaga Non-Pemerintah, Organisasi Sipil Masyarakat yang memiliki rencana menyelenggarakan kegiatan diseminasi nilai-nilai Kepalangmerahan dan Hukum Humaniter Internasional.  <u>Kalkulasi:</u> Total organisasi induk Mitra PMI yang memiliki rencana diseminasi Kepalangmerahan yang dicatat oleh PMI Pusat.	Instansi	Aktual	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan kegiatan diseminasi Kepalangmerahan;</li> <li>Database diseminasi Kepalangmerahan.</li> </ul>	1 x 1 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menginisiasi kerjasama diseminasi dengan berbagai pihak di tingkat nasional (Deplu, Kumham, TNI/Polri, Universitas);</li> <li>Identifikasi kebutuhan dan penyusunan materi diseminasi;</li> <li>Memobilisasi diseminator PMI/Mitra untuk implementasi kerjasama dengan berbagai pihak.</li> </ul>
25	Jumlah kegiatan diseminasi yang dilaksanakan Mitra bersama dengan PMI Pusat/Prov/Kab/Kota.	Kegiatan diseminasi Kepalangmerahan yang dilaksanakan oleh Mitra bekerjasama dengan PMI Prov/Kab/Kota dan PMI Pusat.  <u>Kalkulasi:</u> Jumlah kegiatan diseminasi Kepalangmerahan yang dilaksanakan oleh PMI Pusat, Provinsi, Kab/Kota se Indonesia.	Kegiatan	Aktual	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan kegiatan diseminasi Kepalangmerahan;</li> <li>Database diseminasi Kepalangmerahan</li> </ul>	1 x 1 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan kegiatan diseminasi di unit-unit mitra;</li> <li>Melaksanakan sesi diseminasi pada peringatan hari-hari besar/acara terkait kepalangmerahan.</li> </ul>

No	Indikator	Uraian Indikator	Satuan Pengukuran	Target	Alat Verifikasi	Frekuensi Pelaporan	Rujukan Kegiatan
<b>Outcome 1.2:</b> Jangkauan, kualitas, intensitas dan ketersediaan dokumentasi, publikasi, promosi, dan advokasi kegiatan/pelayanan PMI meningkat.							
26	Jumlah berita tentang organisasi dan kegiatan PMI yang dikategorikan bersifat positif	Berita positif PMI adalah pemberitaan yang dipublikasikan oleh media massa (elektronik dan cetak) yang isinya menyatakan sesuatu yang positif mengenai kegiatan PMI.  <u>Kalkulasi:</u> Jumlah berita positif yang diterima dan dikompilasi setiap tahun	Angka	Aktual	Laporan monitoring pemberitaan kegiatan PMI	1 x 1 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoring pemberitaan tentang PMI;</li> <li>Analisa pemberitaan tentang PMI;</li> <li>Penyajian laporan triwulan hasil analisa pemberitaan.</li> </ul>
27	Media publikasi, promosi dan advokasi terdokumentasi secara digital	Terdokumentasi secara digital ialah media penyimpanan data berupa foto, video, audio, dokumen publikasi dan kearsipan penting PMI yang dapat digunakan untuk keperluan publikasi, promosi dan advokasi.  <u>Kalkulasi:</u> Cukup jelas	Judul/Tema dan Jenis	Aktual	Database media digital PMI	1 x 1 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengintegrasikan laman dokumentasi digital dengan <a href="http://www.pmi.or.id">www.pmi.or.id</a> dan SIM;</li> <li>Mengunggah dokumen digital secara berkala;</li> <li>Pencatatan arsip dokumentasi digital;</li> <li>Pengembangan media dokumentasi digital.</li> </ul>

No	Indikator	Uraian Indikator	Satuan Pengukuran	Target	Alat Verifikasi	Frekuensi Pelaporan	Rujukan Kegiatan
<b>Output 1.2.1.</b> Kapasitas Pegawai PMI dalam bidang kehumasan meningkat.							
28	Pegawai PMI Pusat/Prov/Kab/Kota memperoleh pelatihan kehumasan	<p>Pegawai Markas PMI Pusat/Prov/Kab/Kota yang menjalankan fungsi kehumasan yang memperoleh pelatihan teknis kehumasan, baik yang diselenggarakan oleh internal maupun eksternal.</p> <p><b>Kalkulasi:</b> Cukup jelas.</p> <p>Seorang pegawai dihitung sebagai satu orang walaupun mengikuti kegiatan pelatihan kehumasan lebih dari satu kali. Pencatatan terpilah berdasarkan jenis kelamin dan kategori usia.</p>	Orang	68	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan kegiatan pelatihan ;</li> <li>Dabatase Pegawai.</li> </ul>	1 x 1 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemetaan kapasitas personil Pegawai PMI yang memiliki fungsi kehumasan;</li> <li>Pelatihan bidang kehumasan</li> <li>Pendampingan, bantuan teknis kehumasan oleh PMI setingkat di atasnya</li> <li>Monitoring kegiatan kehumasan</li> </ul>

No	Indikator	Uraian Indikator	Satuan Pengukuran	Target	Alat Verifikasi	Frekuensi Pelaporan	Rujukan Kegiatan
<b>Output 1.2.2.</b>							
Laporan analisis pemberitaan PMI yang dimuat di media massa (cetak, online, TV, radio) dan media sosial (Twitter dan Facebook) tersedia secara teratur di PMI Pusat/Prov.							
29	Jumlah total berita PMI yang dimuat pada media massa lokal/nasional/Internasional	Berita PMI adalah berita tentang kegiatan yang dilakukan atau didukung oleh PMI yang dimuat di media cetak, radio, televisi, dan internet.  <b>Kalkulasi:</b> Total berita yang menggunakan kata kunci "PMI" yang dikompilasi Pegawai PMI yang memiliki fungsi kehumasan.	Angka	Aktual	Laporan monitoring pemberitaan kegiatan PMI	1 x 3 bulan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengolah data pemberitaan PMI dari perusahaan jasa pemantau (pihak ketiga);</li> <li>Membangun jejaring kehumasan dan kerjasama strategis dengan lembaga-lembaga media;</li> </ul>
30	Jumlah orang yang dijangkau oleh pemberitaan media massa tentang program/pelayanan PMI	Adalah orang yang dijangkau pemberitaan media massa tentang program/pelayanan PMI.  <b>Kalkulasi:</b> Jumlah audiens dari pemberitaan PMI di media cetak, televisi, radio, dan internet.	Angka	Aktual	Laporan monitoring pemberitaan kegiatan PMI	1 x 3 bulan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Analisis tren pemberitaan PMI;</li> <li>Menyediakan umpan balik kepada Pengurus.</li> </ul>
31	Jumlah pengunjung laman PMI	Adalah pengunjung yang membuka dan membaca berita layanan PMI yang dipublikasikan di laman PMI seperti <a href="http://www.pmi.or.id">www.pmi.or.id</a> , <a href="http://www.pmibali.or.id">www.pmibali.or.id</a> .  <b>Kalkulasi:</b> Jumlah pengunjung tercatat secara otomatis pada laman PMI yang membuka dan membaca berita layanan PMI	Angka	Aktual	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan pengunjung laman PMI;</li> <li>Data konsolidasi pengunjung laman PMI.</li> </ul>	1 x 1 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memperbaiki penampilan dan kapasitas laman PMI;</li> <li>Mengkoneksikan laman PMI dengan laman-laman inisiatif PMI Provinsi/Kab/Kota;</li> <li>Memutakhirkan berita di laman PMI dan mendata jumlah pengunjungnya;</li> <li>Monitoring berita dan informasi yang dimuat dalam Laman PMI;</li> <li>Membuat laporan analisis tentang citra PMI.</li> </ul>

No	Indikator	Uraian Indikator	Satuan Pengukuran	Target	Alat Verifikasi	Frekuensi Pelaporan	Rujukan Kegiatan
<b>Output 1.2.2.</b>							
Laporan analisis pemberitaan PMI yang dimuat di media massa (cetak, online, TV, radio) dan media sosial (Twitter dan Facebook) tersedia secara teratur di PMI Pusat/Prov.							
32	Jumlah pengikut media sosial PMI yang dijangkau oleh pemberitaan program/pelayanan PMI	<p>Adalah akun media sosial individu/lembaga/organisasi yang menjadi pengikut media sosial PMI seperti facebook, twitter, youtube dan Instagram yang membaca, menonton (PMI-TV) dan menyebarkan kembali pemberitaan program/layanan PMI.</p> <p><b>Kalkulasi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah pengikut media sosial PMI yang membaca pemberitaan program/layanan PMI;</li> <li>Jumlah pengikut media sosial PMI yang menyebarkan kembali pemberitaan program/layanan PMI;</li> <li>Jumlah pengikut media sosial PMI yang menyaksikan tayangan pemberitaan program/layanan PMI.</li> </ul>	Angka	Aktual	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan pengikut media sosial PMI PMI;</li> <li>Data konsolidasi pengikut media sosial PMI;</li> <li>Laporan monitoring pemberitaan kegiatan PMI.</li> </ul>	1 x 1 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoring jumlah pengikut media sosial PMI;</li> <li>Memutakhirkan berita di laman PMI;</li> <li>Mendata jumlah pengikut, pembaca dan individu/lembaga yang menyebarkan kembali pemberitaan PMI;</li> <li>Monitoring berita dan informasi yang dimuat dalam media sosial PMI;</li> <li>Monitoring umpan balik (tanggapan dan keluhan) di media sosial PMI;</li> <li>Menyusun laporan sosial media analisis;</li> <li>Menyediakan umpan balik kepada unit kerja terkait.</li> </ul>

No	Indikator	Uraian Indikator	Satuan Pengukuran	Target	Alat Verifikasi	Frekuensi Pelaporan	Rujukan Kegiatan
<b>Output 1.2.3.</b> Produk publikasi program dan layanan PMI diterbitkan secara reguler kepada masyarakat/publik.							
33	Jumlah produk publikasi yang didistribusikan oleh PMI Pusat/ Prov/ Kab/Kota	<p>Produk promosi/publikasi adalah media publikasi yang memuat informasi kegiatan layanan PMI, baik saat bencana maupun situasi normal. Produk publikasi dapat berupa <i>event promotion kit</i> (spanduk, <i>giant banner</i>, umbul-umbul, <i>roll banner</i>, <i>backdrop</i>), brosur, poster, multimedia (video), foto, <i>calendar kit</i> (kalender dan agenda), dan majalah.</p> <p>Distribusi dapat dilakukan secara langsung dan atau mengunggah produk publikasi digital.</p> <p><b>Kalkulasi:</b> Cukup jelas</p>	Judul/Tema dan Jenis	Aktual	Rekapitulasi data distribusi produk publikasi	1 x 1 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun panduan untuk pedoman penerapan identitas (<i>corporate identity</i>) bagi PMI Pusat;</li> <li>Menyusun kebijakan publikasi untuk berita, informasi terkait PMI;</li> <li>Memproduksi dan mendistribusikan berbagai materi advokasi dan produk kehumasan (mis. brosur, newsletter) ke PMI Prov/Kab/Kota;</li> <li>Monitoring distribusi materi advokasi dan produk; kehumasan ke PMI di daerah.</li> <li>Menyelenggarakan kegiatan pada hari besar kepalangmerahan.</li> </ul>
34	PMI-TV memproduksi setidaknya 2 (dua) siaran setiap 1 (tiga) bulan	<p>Produk PMI-TV adalah siaran tentang kegiatan PMI se-Indonesia yang diseleksi menurut kriteria tertentu.</p> <p><b>Kalkulasi:</b> Cukup jelas</p>	Tema/Topik	24	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan siaran PMI-TV;</li> <li>Link siaran PMI-TV.</li> </ul>	1 x 1 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan kajian pra-produksi untuk penentuan topik;</li> <li>Asesmen, seleksi lokasi, pemeran sesuai topik;</li> <li>Menyusun disain dan narasi produksi sesuai topik;</li> <li>Pengambilan gambar/film;</li> <li>Analisa umpan balik.</li> </ul>

No	Indikator	Uraian Indikator	Satuan Pengukuran	Target	Alat Verifikasi	Frekuensi Pelaporan	Rujukan Kegiatan
<b>Output 1.2.4</b> Mekanisme umpan balik untuk keterlibatan masyarakat dan akuntabilitas diimplementasikan oleh PMI							
35	Jumlah saluran komunikasi umpan balik yang dikelola oleh PMI	<p>Adalah jenis saluran komunikasi yang memungkinkan penerima manfaat menyampaikan suaranya baik dalam bentuk dialog dan tanya jawab khususnya dalam operasi tanggap darurat bencana tertentu, kesiapsiagaan bencana/pencegahan krisis kesehatan berbasis masyarakat, kegiatan layanan/bantuan sosial untuk kelompok rentan tertentu yang mendapat dukungan bantuan donor melalui PMI Pusat.</p> <p><b>Kalkulasi:</b> Cukup jelas</p>	Jenis	3	Laporan tim CEA	1 x 1 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mobilisasi tim CEA dalam setiap kegiatan layanan kemanusiaan (operasi tanggap darurat bencana, krisis kesehatan dan krisis kemanusiaan lainnya);</li> <li>• Mensosialisasikan kegiatan layanan PMI;</li> <li>• Mendorong keterlibatan dan partisipasi penerima manfaat dalam layanan PMI;</li> <li>• Membangun koneksitas dengan masyarakat/populasi terdampak untuk layanan CEA;</li> <li>• Menyusun laporan analisis umpan balik CEA;</li> <li>• Diseminasi laporan analisis CEA kepada audiens internal dan eksternal.</li> </ul>



No	Indikator	Uraian Indikator	Satuan Pengukuran	Target	Alat Verifikasi	Frekuensi Pelaporan	Rujukan Kegiatan
<b>Output 1.2.4</b>							
Mekanisme umpan balik untuk keterlibatan masyarakat dan akuntabilitas diimplementasikan oleh PMI							
36	Jumlah anggota masyarakat yang memberikan umpan balik CEA melalui saluran media yang dikelola oleh PMI	<p>Anggota masyarakat adalah orang yang dijangkau langsung/tidak langsung layanan PMI dalam operasi tanggap darurat bencana tertentu, kesiapsiagaan bencana/pencegahan krisis kesehatan berbasis masyarakat, kegiatan layanan/bantuan sosial lainnya yang memberikan umpan balik atas layanan-layanan PMI.</p> <p><b>Kalkulasi:</b> Total orang yang dijangkau langsung/tidak langsung yang memberikan umpan balik CEA terhadap kegiatan layanan PMI.</p> <p>Seorang anggota masyarakat dihitung sebagai satu orang walaupun memberikan umpan balik lebih dari satu kali. Pencatatan terpilah berdasarkan jenis kelamin dan kategori usia.</p>	Orang	Aktual	Laporan tim CEA	1 x 1 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membangun jejaring Komunikasi CEA dengan orang yang dijangkau langsung/tidak langsung dan stakeholder;</li> <li>Membangun <i>kapasitas focal point</i> CEA dari PMI setempat;</li> <li>Menginformasikan kepada unit layanan tentang mekanisme umpan balik;</li> <li>Mengoperasikan saluran Komunikasi umpan balik untuk CEA;</li> <li>Bekerjasama dengan Pusdatin dan PMER dalam menganalisis umpan balik keluhan;</li> <li>Mengkompilasi umpan balik dan keluhan yang masuk dari seluruh layanan.</li> </ul>

## TUJUAN STRATEGIS-2

**Meningkatkan ketersediaan darah yang aman, mudah dijangkau, berkualitas dan berkesinambungan di seluruh Indonesia**

No	Indikator	Uraian Indikator	Satuan Pengukuran	Target	Alat Verifikasi	Frekuensi Pelaporan	Rujukan Kegiatan
<b>Outcome 2.1</b>							
Kapasitas Unit Donor Darah (UDD) yang sesuai standar nasional meningkat.							
37	UDD PMI Prov/Kab/Kota memenuhi standar Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB)	<p>Standar Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) mencakup semua elemen praktik yang akan menghasilkan produk atau layanan akhir yang dapat memenuhi spesifikasi yang ditetapkan secara konsisten (<i>Australian Code of GMP 2000</i>). Standar ini merupakan bagian dari upaya penjaminan kualitas yang menjamin bahwa komponen darah diproduksi dan dikontrol secara konsisten berdasarkan standar kualitas yang sesuai dengan tujuan penggunaannya, mengikuti spesifikasi yang telah ditetapkan (<i>WHO Guidelines on GMP 2011</i>).</p> <p><b>Kalkulasi:</b> Jumlah UDD PMI yang telah mempraktikkan standar CPOB</p>	Unit	50	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen penilaian standar CPOB</li> <li>Laporan UDD Pusat</li> </ul>	1 x 3 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membangun standar CPOB pada UDD PMI Prov/Kab/Kota yang masih berkembang;</li> <li>Monitoring implementasi standar CPOB pada UDD PMI Prov/Kab/Kota se-Indonesia.</li> </ul>
38	UDD PMI Prov/Kab/Kota memenuhi Standar Nasional	<p>Standar Nasional mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan No. 91 Tahun 2015 tentang standar pelayanan transfusi darah yang disusun oleh tim gabungan dari Kemenkes, PMI dan pihak terkait, sesuai standar AABB (<i>American Assosiation Blood Bank</i>), <i>European Guidelines</i> dan WHO.</p> <p><b>Kalkulasi:</b> Jumlah UDD PMI yang telah melaksanakan standarnasional PMK No. 91 Tahun 2015.</p>	Unit	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen penilaian Standar Nasional;</li> <li>Laporan UDD Pusat.</li> </ul>	1 x 3 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan <i>visibility study</i> terhadap Kabupaten/kota yang belum terdapat UDD;</li> <li>Pembangunan UDD di Kab/Kota sesuai standar nasional terutama diwilayah kepulauan;</li> <li>Meningkatkan standar pelayanan UDD PMI Prov/Kab/Kota merujuk pada standar nasional;</li> <li>Monitoring implementasi pengembangan standar nasional pada UDD PMI Prov/Kab/Kota se-Indonesia.</li> </ul>

No	Indikator	Uraian Indikator	Satuan Pengukuran	Target	Alat Verifikasi	Frekuensi Pelaporan	Rujukan Kegiatan
<b>Output 2.1.1:</b> Kebijakan, peraturan, panduan standar nasional pelayanan darah tersedia dan diimplementasikan di UDD semua tingkatan.							
39	Jumlah UDD Prov/Kab/Kota dengan Struktur Organisasi sesuai standar	Standar untuk Struktur Organisasi mengacu kepada Permenkes No.83 tahun 2014 tentang unit transfusi darah, bank darah rumah sakit, dan jejaring pelayanan transfusi darah.  <b>Kalkulasi</b> Jumlah UDD PMI dengan stuktur organisasi mengacu pada PP No.83/2014	Unit	100	SK Struktur Organisasi	1 x 1 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mereview, merevisi dan menerbitkan kebijakan, peraturan, panduan terkait GMP pelayanan darah;</li> <li>Mendiseminasikan kebijakan, peraturan, panduan terkait GMP pelayanan darah ke UDD Pusat/Prov/Kab/Kota ;</li> <li>Monitoring penerapan standar layanan UDD sesuai GMP dan standar nasional.</li> </ul>
40	% UDD Prov/Kab/Kota yang lulus penilaian Pemantapan Mutu Eksternal (PME).	Penilaian Pemantapan Mutu Eksternal (PME) dilakukan dengan melihat hasil pemeriksaan uji saring Infeksi Menular Lewat Transfusi Darah (IMLTD) dan imunohematologi di UDD dengan mengerjakan sampel terstandar yang dikirim dari UDD Pusat.  <b>Kalkulasi:</b> Jumlah UDD PMI yang lulus PME, berbanding dengan total UDD PMI se-Indonesia.	Persentase	≥70%	Laporan hasil penilaian PME	1 x 1 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan penilaian PME terhadap UDD dan penilaian kinerja pegawai (DP2);</li> <li>Melaksanakan dokumentasi kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan.</li> </ul>

No	Indikator	Uraian Indikator	Satuan Pengukuran	Target	Alat Verifikasi	Frekuensi Pelaporan	Rujukan Kegiatan
<b>Output 2.1.2</b> Sistim manajemen UDD, termasuk struktur organisasi, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan, berjalan dengan baik di semua tingkatan.							
41	UDD Pusat/Prov/Kab/Kota melaksanakan penilaian kinerja pegawai setiap tahun	Penilaian kinerja dilakukan melalui Daftar Penilaian Pegawai (DP2).  <b>Kalkulasi:</b> Jumlah UDD PMI yang melaksanakan penilaian kinerja 50% dari total pegawainya	Unit	150	Laporan hasil DP2	1 x 1 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoring kinerja pegawai UDD;</li> <li>Melaksanakan penilaian kinerja pegawai setiap tahun.</li> </ul>
42	Jumlah pegawai UDD Pusat/Prov/Kab/Kota dengan gaji pokok sesuai sistim penggajian Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berlaku	Sistem penggajian PNS menyesuaikan sistim yang berlaku di Prov/Kab/Kota masing-masing.  <b>Kalkulasi:</b> Cukup jelas.  Pencatatan terpilah berdasarkan jenis kelamin dan kategori usia.	Orang	Pusat: 100 Prov: 50 Kab/Kota: 2000	Salinan slip gaji pegawai/dokumen kepegawaian	1 x 1 tahun	Mengalokasikan anggaran untuk penggajian PNS yang diperbantukan di UDD Pusat/Prov/Kab/Kota
43	% UDD Pusat/Prov/Kab/Kota melakukan audit keuangan oleh eksternal setiap tahun.	Audit adalah sebuah pemeriksaan laporan keuangan yang disiapkan oleh PMI untuk memeriksa kepatuhan terhadap ketentuan yang dilakukan secara independen oleh pihak eksternal.  <b>Kalkulasi:</b> Jumlah UDD PMI yang telah melaksanakan audit eksternal berbanding dengan total UDD PMI se-Indonesia.	Presentase	100%	Laporan hasil audit minimal 2 tahun kebelakang	1 x 1 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membina keuangan UDD PMI se-Indonesia;</li> <li>Monitoring keuangan UDD PMI se-Indonesia;</li> <li>Melakukan audit keuangan oleh eksternal setiap tahun.</li> </ul>
44	% UDD Pusat/Prov/Kab/Kota memiliki rencana kerja tahunan	Adalah rencana kerja yang menggunakan format yang ditetapkan dan memuat informasi: <ul style="list-style-type: none"> <li>Tujuan Strategis</li> <li>Outcome, indikator, dan targetnya</li> <li>Output, indikator, dan targetnya</li> <li>Kegiatan-kegiatan</li> <li>Jumlah anggaran per kegiatan dan kategorinya</li> </ul> <b>Kalkulasi:</b> Jumlah UDD PMI yang telah memiliki rencana kerja tahunan sesuai dengan kriteria diatas berbanding dengan total UDD PMI se-Indonesia.	Presentase	90%	Laporan analisis survei	1 x 1 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>UDD PMI se Indonesia menyusun rencana kerja tahunan;</li> <li>Raker UDD PMI se-Indonesia.</li> </ul>

No	Indikator	Uraian Indikator	Satuan Pengukuran	Target	Alat Verifikasi	Frekuensi Pelaporan	Rujukan Kegiatan
45	% UDD Pusat/Prov Kab/Kota memiliki laporan tahunan	<p>Adalah laporan pelaksanaan program kerja UDD Pusat/Prov Kab/Kota setiap tahun yang memuat laporan hasil pelaksanaan rencana kerja dan informasi akan pencapaian:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Target indikator Outcome</li> <li>• Target indikator Output</li> <li>• Penjelasan singkat mengenai pelaksanaan kegiatan</li> </ul> <p><b>Kalkulasi:</b> Jumlah UDD PMI yang telah memiliki laporan program tahunan sesuai dengan kriteria diatas berbanding dengan total UDD PMI se-Indonesia.</p>	Presentase	90%	Laporan analisis survei	1 x 1 tahun	Menyusun laporan tahunan kemajuan UDD

No	Indikator	Uraian Indikator	Satuan Pengukuran	Target	Alat Verifikasi	Frekuensi Pelaporan	Rujukan Kegiatan
<b>Output 2.1.3</b> Mekanisme komunikasi, koordinasi, dan pembinaan berjalan secara konsisten di internal UDD, antar tingkatan UDD, melalui sistem konsolidasi dan regionalisasi dan dengan pemangku kepentingan eksternal (Pemda, Dinkes, RS, POM Puskesmas, vendor, dll.).							
46	UDD Kab/Kota menerima kunjungan pembinaan dari UDD Prov/Pusat minimal sekali setahun	Kunjungan pembinaan teknis dari pegawai UDD di tingkat atasnya dapat dilakukan pada berbagai kesempatan dengan menggunakan panduan pembinaan yang ditetapkan.  <b>Kalkulasi:</b> Cukup jelas	Unit	80%	Laporan kunjungan pembinaan UDD	1 x 1 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memantau UDD semua tingkatan dalam pembuatan rencana kerja, laporan pelaksanaan kegiatan tahunan, dan laporan kegiatan pelayanan melalui SIMDONDAR.</li> <li>• Membina hubungan koordinasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan setempat.</li> <li>• Melaksanakan rapat kerja internal (konsolidasi) secara teratur dan terjadwal;</li> <li>• Melaksanakan program kerja (konsolidasi) secara teratur dan terjadwal.</li> </ul>

No	Indikator	Uraian Indikator	Satuan Pengukuran	Target	Alat Verifikasi	Frekuensi Pelaporan	Rujukan Kegiatan
<b>Outcome 2.2</b> Kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarana UDD meningkat.							
47	Jumlah Diklat UDD yang diakreditasi oleh Kemenkes	Proses pengajuan akreditasi dilakukan dengan melampirkan berbagai persyaratan untuk memperoleh pengakuan standar dari Kemenkes.  <b>Kalkulasi:</b> Cukup jelas	Unit	3	Dokumen akreditasi dari Kemenkes	1 x 1 tahun	Memantau dan mendorong Diklat UDD memenuhi kriteria pengajuan akreditasi oleh Kemenkes.
48	Jumlah pegawai UDD Pusat/Prov/Kab/Kota yang memenuhi 25 Satuan Kredit Profesional (SKP) dalam 5 tahun	Satuan Kredit Profesional (SKP) adalah kredit yang harus dikumpulkan oleh para petugas teknisi untuk mendapatkan kompetensi sebagai teknisi untuk dapat praktik kerja.  <b>Kalkulasi:</b> Cukup jelas.  Pencatatan terpilah berdasarkan jenis kelamin dan kategori usia.	Orang	Aktual (Ditetapkan oleh UDD)	Daftar pemenuhan SKP	1 x 1 tahun	Monitoring dan dokumentasi kinerja teknisi UDD.

No	Indikator	Uraian Indikator	Satuan Pengukuran	Target	Alat Verifikasi	Frekuensi Pelaporan	Rujukan Kegiatan
<b>Output 2.2.1</b> Pegawai UDD terlatih dalam menerapkan standar nasional sesuai dengan Tupoksi dan kompetensi yang diperlukan							
49	Jumlah pegawai UDD Pusat/Prov/Kab/Kota yang mengikuti pelatihan CPOB	<b>Kalkulasi:</b> Jumlah pegawai UDD yang mengikuti pelatihan CPOB pada tahun pelaporan.  Pencatatan terpilah berdasarkan jenis kelamin dan kategori usia.	Orang	Aktual	Laporan pelatihan CPOB	1 x 1 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menerapkan CPOB dan standar nasional sesuai standar ketentuan yang berlaku;</li> <li>Memfasilitasi proses akreditasi UDD oleh Kemenkes;</li> <li>Meningkatkan kapasitas personil UDD untuk memenuhi 25 Satuan Kredit Profesional (SKP).</li> </ul>
50	Jumlah pegawai UDD Pusat/Prov/Kab/Kota yang mendapatkan pelatihan minimal sekali setahun	<b>Kalkulasi:</b> Cukup jelas.  Pencatatan terpilah berdasarkan jenis kelamin dan kategori usia.	Orang	Aktual	Laporan pelatihan	1 x 1 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memantau kinerja pegawai UDD untuk pelatihan UDD;</li> <li>Mengupayakan pelatihan GMP dan lain-lain yang relevan untuk personil UDD.</li> </ul>



No	Indikator	Uraian Indikator	Satuan Pengukuran	Target	Alat Verifikasi	Frekuensi Pelaporan	Rujukan Kegiatan
<b>Output 2.2.2</b> Sentralisasi diklat dilaksanakan untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pelayanan darah.							
51	Jumlah lulusan peserta Diklat dari UDD Pusat/Prov/Kab/Kotatersertifikasi	Program Diklat UDD adalah Pendidikan dan pelatihan yang disediakan untuk para teknisi dan non teknis oleh UDD Pusat/Prov/Kab/Kota untuk menyediakan SDM yang kompeten di bidang teknologi transfusi darah.  <b>Kalkulasi:</b> Cukup jelas	Orang	200	Database pelatihan	1 x 1 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyelenggarakan program Diklat Pelayanan Darah;</li> <li>Memantau dan mengevaluasi kualitas lulusan peserta diklat;</li> <li>Membuat peta kebutuhan diklat di setiap UDD.</li> </ul>
<b>Output 2.2.3:</b> Sarana prasarana, perlengkapan, peralatan, dan bahan habis pakai tersedia secara memadai dan terstandarisasi di semua UDD melalui penyediaan logistik yang tersentralisasi.							
52	UDD Pusat/Prov/Kab/Kota memiliki peralatan sesuai dengan kelas pelayanannya	Pelayanan UDD sesuai Permenkes 83 tahun 2014 terbagi atas tingkat utama untuk UDD Pusat, madya untuk UDD Provinsi, dan pratama untuk UDD Kab/Kota.  <b>Kalkulasi:</b> Cukup jelas	Unit	≥80%	Dokumen inventarisasi	1 x 1 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mendata dan menginventarisasi peralatan UDD di semua tingkatan sesuai kelas layanan, termasuk jumlah kantong darah dan reagen;</li> <li>Mengelola sarana prasarana, perlengkapan, dan peralatan bahan habis pakai sesuai panduan;</li> <li>Melaksanakan prosedur pemeliharaan sarana prasarana dan perlengkapan sesuai panduan;</li> <li>Melaksanakan penggantian perlengkapan, dan peralatan bahan habis;</li> <li>Mengupayakan penggunaan kantong darah dan reagen yang sesuai standar nasional.</li> </ul>
53	UDD Pusat/Prov/Kab/Kota menggunakan kantong darah dan reagen yang sesuai standar nasional	Standar nasional untuk penggunaan kantong darah dan reagen mengacu pada PP No.7 Tahun 2011, Permenkes No. 83 Tahun 2014, Permenkes No. 62 Tahun 2017 dan Permenkes No. 1191 Tahun 2020.  <b>Kalkulasi:</b> Total UDD PMI yang telah menggunakan kantong darah dan reagen yang sesuai standar nasional di Indonesia	Unit	150	Dokumen pengadaan barang	1 x 1 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengelola sarana prasarana, perlengkapan, dan peralatan bahan habis pakai sesuai panduan;</li> <li>Melaksanakan prosedur pemeliharaan sarana prasarana dan perlengkapan sesuai panduan;</li> <li>Melaksanakan penggantian perlengkapan, dan peralatan bahan habis;</li> <li>Mengupayakan penggunaan kantong darah dan reagen yang sesuai standar nasional.</li> </ul>

No	Indikator	Uraian Indikator	Satuan Pengukuran	Target	Alat Verifikasi	Frekuensi Pelaporan	Rujukan Kegiatan
<b>Output 2.2.4</b>							
Sistem Informasi Manajemen Unit Donor Darah (SIMDONDAR) dan aplikasi <i>mobile app</i> Donorku berfungsi baik di seluruh UDD untuk mendukung pencatatan, pelaporan, dan penelusuran pelayanan darah.							
54	% UDD Pusat/Prov/Kab/Kota menggunakan Sistem Informasi Manajemen Unit Donor Darah (SIMDONDAR)	Sistem Informasi Manajemen Unit Donor Darah (SIMDONDAR) adalah sistem pencatatan seluruh aktivitas pelayanan darah di UDD mulai penerahan donor sampai pendistribusian darah.  <b>Kalkulasi:</b> Jumlah UDD PMI yang menggunakan SIMDONDAR berbanding dengan total UDD PMI se-Indonesia.	Presentase	80%	SIMDONDAR	1 x 1 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membentuk tim implementasi SIMDONDAR;</li> <li>Menyediakan infrastruktur untuk penampungan data SIMDONDAR.</li> </ul>
55	% UDD Prov/Kab/Kota mengirimkan laporan kegiatan pelayanan ke UDD Pusat melalui SIMDONDAR	Laporan kegiatan pelayanan melaporkan seluruh aktivitas di UDD, mulai dari rekrutmen donor, seleksi dan pengambilan darah, hingga pengamanan, pengolahan, penyimpanan dan pendistribusian darah selama setahun.  <b>Kalkulasi:</b> Jumlah UDD PMI yang mengirimkan laporan kegiatan pelayanan melalui SIMDONDAR berbanding dengan total UDD PMI se-Indonesia.	Presentase	80%	SIMDONDAR	1 x 1 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membina penggunaan SIMDONDAR di semua UDD Prov/Kab/Kota di wilayahnya;</li> <li>PMI Pusat dan/atau UDD Pusat memantau dan mengevaluasi pemanfaatan SIMDONDAR di semua UDD Prov/Kab/Kota di wilayahnya;</li> <li>Melakukan pencatatan, pelaporan, dan penelusuran pelayanan darah menggunakan SIMDONDAR.</li> </ul>

No	Indikator	Uraian Indikator	Satuan Pengukuran	Target	Alat Verifikasi	Frekuensi Pelaporan	Rujukan Kegiatan
<b>Outcome 2.3</b> Ketersediaan darah yang aman, terjangkau, berkualitas dan berkesinambungan di semua UDD meningkat.							
56	% pedonor darah sukarela di UDD Prov/Kab/Kota yang menyumbangkan darahnya 3-4 kali dalam setahun	<b>Kalkulasi:</b> Total pedonor darah sukarela yang menyumbangkan darahnya 3-4 kali dalam setahun berbanding jumlah DDS se-Indonesia.  Seorang pendonor darah dihitung sebagai satu orang walaupun menyumbangkan darahnya lebih dari satu kali. Pencatatan terpisah berdasarkan jenis kelamin dan kategori usia.	Persentase	90%	Database donor darah	1 x 1 tahun	Mendata DDS dengan SIMDONDAR
57	Presentase darah (kantong) yang dapat digunakan untuk pengobatan setiap tahun di UDD Prov/Kab/Kota	<b>Kalkulasi:</b> Total jumlah komponen darah yang diproduksi dan didistribusikan ke RS dalam setahun berbanding dengan total jumlah komponen darah (kantong) yang diproduksi dalam setahun	Presentase	80%	Dokumen pencatatan produksi dan distribusi darah tahunan	1 x 1 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sesuai SOP UDD</li> <li>Melaksanakan pengolahan darah, uji saring, dan uji silang serasi</li> </ul>

No	Indikator	Uraian Indikator	Satuan Pengukuran	Target	Alat Verifikasi	Frekuensi Pelaporan	Rujukan Kegiatan
58	Jumlah orang yang dijangkau dalam kegiatan promosi Donor Darah Sukarela (DDS) dalam setahun oleh UDD Pusat/Prov/Kab/Kota	<p>Kegiatan promosi untuk merekrut Donor Darah Sukarela (DDS) dilakukan melalui pembuatan leaflet, tayangan iklan di media cetak, televisi, dan online di laman UDD, dan sebagainya.</p> <p><b>Kalkulasi:</b> Cukup jelas.</p>	Orang	2% dari jumlah penduduk	Daftar hadir kegiatan Laporan <i>Media Coverage</i>	1 x 1 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat dan mendiseminasikan materi promosi DDS ke UDD Prov/Kab/Kota;</li> <li>• Melaksanakan promosi dan penggalangan DDS disemua tingkatan;</li> <li>• Mendiseminasikan dan membina cara penggunaan materi promosi DDS ke UDD Prov/Kab/Kota;</li> <li>• Meningkatkan jangkauan pelayanan donor darah;</li> <li>• Penghargaan terhadap Pedonor Darah 100x;</li> <li>• Menyelenggarakan kegiatan DDS keliling ke berbagai instansi secara teratur dan terjadwal;</li> <li>• Membangun jejaring dengan masyarakat pemerhati Donor Darah dan Pedonor Darah.</li> </ul>

No	Indikator	Uraian Indikator	Satuan Pengukuran	Target	Alat Verifikasi	Frekuensi Pelaporan	Rujukan Kegiatan
<b>Output 2.3.2</b> Sentralisasi pengolahan, dan pengamanan darah, rujukan dan pengawasan mutu dilaksanakan untuk efektivitas dan efisiensi pelayanan darah.							
59	Jumlah UDD Kab/Kota yang menjalankan sentralisasi/konsolidasi	Sentralisasi/konsolidasi adalah upaya untuk memusatkan proses pengolahan dan distribusi darah yang ada di beberapa UDD Kab/Kota menjadi satu atau beberapa sentra di Provinsi tersebut.  <b>Kalkulasi:</b> Cukup jelas	Unit	14 wilayah di 5 regional	Dokumen program rencana sentralisasi/konsolidasi	1 x 1 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan kualitas pengolahan darah, pengamanan darah, rujukan dan pengawasan mutu komponen darah;</li> <li>Meningkatkan kualitas manajemen UDD PMI;</li> <li>Memenuhi persediaan darah minimum sesuai kebutuhan setempat.</li> </ul>
60	Jumlah sentralisasi yang terbentuk	<b>Kalkulasi:</b> Cukup jelas	Unit	14 wilayah di 5 regional	Dokumen program rencana sentralisasi/konsolidasi	1 x 1 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan koordinasi untuk membangun sentralisasi/konsolidasi dengan UDD di Prov/Kab/Kota;</li> <li>Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM UDD PMI,</li> </ul>
<b>Output 2.3.3</b> Darah terdistribusi sesuai kebutuhan RS melalui jejaring pelayanan penyediaan darah.							
61	% permintaan darah yang rasional dan sesuai indikasi medis di RS terpenuhi di wilayah kerja UDD Kab/Kota	Penggunaan Darah Secara Klinis ( <i>Clinical Use Of Blood</i> ) adalah penggunaan darah sesuai indikasi klinis dan rasional serta demi kepentingan kesembuhan pasien.  <b>Kalkulasi:</b> Jumlah produksi darah UDD berbanding dengan jumlah permintaan darah dari RS yang tercatat di UDD.	Persentase	80%	Laporan RS	1 x 1 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyediakan persediaan darah minimum sesuai kebutuhan setempat;</li> <li>Memantau distribusi darah yang dilakukan UDD Prov/Kab/Kota;</li> <li>Memantau kebutuhan darah di RS setempat;</li> <li>Mengambil dan menyimpan darah sesuai standar pelayanan transfusi darah.</li> </ul>

No	Indikator	Uraian Indikator	Satuan Pengukuran	Target	Alat Verifikasi	Frekuensi Pelaporan	Rujukan Kegiatan
<b>Output 2.3.4</b>							
Terjaminnya ketersediaan darah yang aman dengan produksi reagen yang terstandarisasi serta bahan baku untuk fraksinasi plasma di UDD Pusat.							
62	Jumlah jenis <i>reagen</i> yang diproduksi	Cukup jelas	Jenis	10	Pencatatan produksi reagen	1 x 1 tahun	Menguji coba dan melakukan pengendalian kualitas terhadap jenis reagen yang diproduksi.
63	Jumlah <i>reagen</i> yang diproduksi	Cukup jelas	set	20.000 (@10ml)	Pencatatan produksi reagen	1 x 1 tahun	
64	Jumlah komponen plasma yang diproduksi mencukupi untuk bahan baku fraksinasi plasma baik yang diproduksi secara konvensional maupun plasmaferesis	Bahan baku plasma merupakan jumlah total volume kantong plasma yang diproduksi dari UDD yang sudah tersertifikasi CPOB	Liter plasma	210.000	Pencatatan dan pelaporan produksi kantong plasma dari UDD yang tersertifikasi CPOB	1 x 1 tahun	Membangun pabrik kantong darah dan fraksinasi plasma sesuai dengan <i>business plan</i> PMI Pusat.

### TUJUAN STRATEGIS-3

Meningkatkan rekrutmen dan pembinaan Relawan sebagai tulang-punggung layanan kemanusiaan PMI, baik secara kuantitas dan kualitas

No	Indikator	Uraian Indikator	Satuan Pengukuran	Target	Alat Verifikasi	Frekuensi Pelaporan	Rujukan Kegiatan
<b>Outcome 3.1:</b> Tatakelola PMR dan Relawan (rekrutmen, pembinaan, penugasan, pengembangan, penghargaan) terlaksana sesuai pedoman manajemen PMR dan Relawan							
65	% PMI Kab/Kota dengan database PMR dan Relawan yang diperbaharui setiap tahun	<p>Adalah PMI Kab/Kota yang memperbaharui data PMR dan Relawan dalam SIM PMI, meliputi informasi yang tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Data-data dasar individual;</li> <li>• Masa aktif (dari waktu rekrutmen hingga data aktifitas terakhir)</li> <li>• Catatan aktifitas individu (Diklat Kepalangmerahan, dan penugasan)</li> <li>• Catatan spesialisasi individu</li> <li>• Status keaktifan individu (setidaknya sampai jangka waktu 6 bulan setelah data aktifitas terakhir)</li> <li>• Waktu deaktivasi individu (<i>unsubscribe</i>)</li> </ul> <p><b>Kalkulasi:</b> Jumlah PMI Kab/Kota yang sudah memperbaharui database PMR dan Relawan, berbanding dengan jumlah PMI Kab/Kota yang melapor.</p>	Persentase	70%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan SIM PMI;</li> <li>• Database PMR dan Relawan PMI.</li> </ul>	1 x 1 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluasi sistim pencatatan data PMR dan Relawan;</li> <li>• Pengumpulan data PMR dan Relawan secara regular;</li> <li>• Memperbaharui database PMR dan Relawan secara periodik;</li> <li>• Menyusun panduan pengisian SIM PMI dan atau database PMR dan Relawan (manual).</li> </ul>

No	Indikator	Uraian Indikator	Satuan Pengukuran	Target	Alat Verifikasi	Frekuensi Pelaporan	Rujukan Kegiatan
<b>Output 3.1.1:</b> Panduan manajemen PMR dan Relawan (KSR dan TSR) diimplementasikan di semua tingkatan.							
66	Jumlah Relawan PMI yang aktif dalam kegiatan selama satu tahun terakhir	<p>Adalah anggota Korps Relawan (KSR) dan Tenaga Sukarela (TSR) PMI Kab/Kota yang setidaknya dilibatkan dalam 1 kali kegiatan yang dikelola oleh Markas PMI Kab/Kota setempat.</p> <p><b>Kalkulasi:</b> Jumlah Relawan PMI Kab/Kota yang tercatat ikut dalam kegiatan PMI Kab/Kota selama satu tahun terakhir.</p> <p>Seorang anggota Relawan dihitung sebagai satu orang walaupun terlibat dalam kegiatan PMI lebih dari satu kali. Pencatatan terpilah berdasarkan jenis kelamin dan kategori usia.</p>	Orang	Aktual	Laporan tahunan PMI Kab/Kota	1 x 1 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inovasi strategi rekrutmen Relawan</li> <li>Membentuk unit KSR/TSR</li> <li>Membentuk dan mengaktifkan Forum Relawan</li> <li>Melibatkan Relawan dalam setiap kegiatan PMI Kab/Kota</li> <li>Menugaskan Relawan secara rotasi untuk penugasan Posko</li> <li>Rekrutment TSR dari berbagai latar belakang profesi dan keahlian</li> <li>Melaksanakan seleksi penugasan Relawan ke Luar Negeri untuk berbagai kesempatan</li> <li>Memfasilitasi upaya-upaya inovatif dikalangan Relawan</li> <li>Mencatat kegiatan Relawan untuk memperbaharui database</li> </ul>
67	Jumlah PMR yang aktif dalam kegiatan selama satu tahun terakhir	<p>Adalah anggota PMR Mula, Madya dan Wira yang dilibatkan dalam yang setidaknya dilibatkan dalam 1 kali kegiatan yang dikelola oleh Markas PMI Kab/Kota setempat.</p> <p><b>Kalkulasi:</b> Jumlah PMR PMI Kab/Kota yang tercatat ikut dalam kegiatan PMI Kab/kota selama satu tahun terakhir.</p> <p>Seorang anggota PMR dihitung sebagai satu orang walaupun terlibat dalam kegiatan PMI lebih dari satu kali. Pencatatan terpilah berdasarkan jenis kelamin dan kategori usia.</p>	Orang	Aktual	Laporan tahunan PMI Kab/Kota	1 x 1 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inovasi strategi rekrutme PMR</li> <li>Membentuk unit PMR</li> <li>Membentuk dan mengaktifkan Forum PMR</li> <li>Melibatkan PMR dalam setiap kegiatan PMI Kab/Kota</li> <li>Mengimplementasikan tri bakti PMR</li> <li>Melaksanakan seleksi penugasan PMR ke Luar Negeri untuk berbagai kesempatan</li> <li>Memfasilitasi upaya-upaya inovatif dikalangan PMR</li> <li>Mencatat kegiatan PMR untuk memperbaharui database</li> </ul>



No	Indikator	Uraian Indikator	Satuan Pengukuran	Target	Alat Verifikasi	Frekuensi Pelaporan	Rujukan Kegiatan
68	PMI yamenyelenggarakan Temu Karya	<p>Temu Karya adalah sebuah acara yang mempertemukan Relawan PMI dari berbagai daerah asal untuk bersama-sama belajar, bertukar pengalaman, memantau serta mengevaluasi proses pembinaan dan kepemimpinan Relawan yang dilaksanakan PMI sekaligus untuk merancang peran dan kegiatan Relawan yang berkesinambungan.</p> <p>Jumlah kegiatan Temu Karya diadakan minimal sekali dalam periode Kepeguruan.</p> <p><b>Kalkulasi:</b> Cukup jelas</p>	Kegiatan	1 Pusat, 5 Prov	Laporan kegiatan Temu Karya	1 x 5 tahun	Sesuai Juklak/Juknis Temukarya

No	Indikator	Uraian Indikator	Satuan Pengukuran	Target	Alat Verifikasi	Frekuensi Pelaporan	Rujukan Kegiatan
66	Jumlah Relawan PMI yang aktif dalam kegiatan selama satu tahun terakhir	<p>Adalah anggota Korps Relawan (KSR) dan Tenaga Sukarela (TSR) PMI Kab/Kota yang setidaknya dilibatkan dalam 1 kali kegiatan yang dikelola oleh Markas PMI Kab/Kota setempat.</p> <p><b>Kalkulasi:</b> Jumlah Relawan PMI Kab/Kota yang tercatat ikut dalam kegiatan PMI Kab/Kota selama satu tahun terakhir.</p> <p>Seorang anggota Relawan dihitung sebagai satu orang walaupun terlibat dalam kegiatan PMI lebih dari satu kali. Pencatatan terpilah berdasarkan jenis kelamin dan kategori usia.</p>	Orang	Aktual	Laporan tahunan PMI Kab/Kota	1 x 1 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inovasi strategi rekrutmen Relawan</li> <li>• Membentuk unit KSR/TSR</li> <li>• Membentuk dan mengaktifkan Forum Relawan</li> <li>• Melibatkan Relawan dalam setiap kegiatan PMI Kab/Kota</li> <li>• Menugaskan Relawan secara rotasi untuk penugasan Posko</li> <li>• Rekrutment TSR dari berbagai latar belakang profesi dan keahlian</li> <li>• Melaksanakan seleksi penugasan Relawan ke Luar Negeri untuk berbagai kesempatan</li> <li>• Memfasilitasi upaya-upaya inovatif dikalangan Relawan</li> <li>• Mencatat kegiatan Relawan untuk memperbaharui database</li> </ul>
67	Jumlah PMR yang aktif dalam kegiatan selama satu tahun terakhir	<p>Adalah anggota PMR Mula, Madya dan Wira yang dilibatkan dalam yang setidaknya dilibatkan dalam 1 kali kegiatan yang dikelola oleh Markas PMI Kab/Kota setempat.</p> <p><b>Kalkulasi:</b> Jumlah PMR PMI Kab/Kota yang tercatat ikut dalam kegiatan PMI Kab/kota selama satu tahun terakhir.</p> <p>Seorang anggota PMR dihitung sebagai satu orang walaupun terlibat dalam kegiatan PMI lebih dari satu kali. Pencatatan terpilah berdasarkan jenis kelamin dan kategori usia.</p>	Orang	Aktual	Laporan tahunan PMI Kab/Kota	1 x 1 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inovasi strategi rekrutme PMR</li> <li>• Membentuk unit PMR</li> <li>• Membentuk dan mengaktifkan Forum PMR</li> <li>• Melibatkan PMR dalam setiap kegiatan PMI Kab/Kota</li> <li>• Mengimplementasikan tri bakti PMR</li> <li>• Melaksanakan seleksi penugasan PMR ke Luar Negeri untuk berbagai kesempatan</li> <li>• Memfasilitasi upaya-upaya inovatif dikalangan PMR</li> <li>• Mencatat kegiatan PMR untuk memperbaharui database</li> </ul>

No	Indikator	Uraian Indikator	Satuan Pengukuran	Target	Alat Verifikasi	Frekuensi Pelaporan	Rujukan Kegiatan
68	PMI menyelenggarakan Temu Karya	<p>Temu Karya adalah sebuah acara yang mempertemukan Relawan PMI dari berbagai daerah asal untuk bersama-sama belajar, bertukar pengalaman, memantau serta mengevaluasi proses pembinaan dan kepemimpinan Relawan yang dilaksanakan PMI sekaligus untuk merancang peran dan kegiatan Relawan yang berkesinambungan.</p> <p>Jumlah kegiatan Temu Karya diadakan minimal sekali dalam periode Kepeguruan.</p> <p><b>Kalkulasi:</b> Cukup jelas</p>	Kegiatan	1 Pusat, 5 Prov	Laporan kegiatan Temu Karya	1 x 5 tahun	Sesuai Juklak/Juknis Temukarya

No	Indikator	Uraian Indikator	Satuan Pengukuran	Target	Alat Verifikasi	Frekuensi Pelaporan	Rujukan Kegiatan
<b>Output 3.1.2:</b>							
Relawan PMI memperoleh pelatihan manajemen dan teknis/kejuruan/ketrampilan sesuai kebutuhan organisasi dan pelayanan							
69	Jumlah Relawan PMI yang dilatih manajemen dan keterampilan teknis organisasi/layanan	<p>Adalah Relawan PMI yang mengikuti pelatihan manajemen dan teknis organisasi/layanan tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asesmen</li> <li>• Pertolongan Pertama</li> <li>• Evakuasi</li> <li>• RFL</li> <li>• Kehumasan</li> <li>• Pelayanan dapur umum</li> <li>• Pelayanan kesehatan</li> <li>• Pelayanan ambulans</li> <li>• <i>Psychological Social Support Program</i></li> <li>• Air dan sanitasi</li> <li>• Penampungan dan pengungsian/Hunian</li> <li>• Distribusi bantuan</li> <li>• Manajemen Tanggap Darurat Bencana</li> <li>• Manajemen pergudangan</li> <li>• Manajemen konflik</li> <li>• Diseminasi Kepalangmerahan</li> <li>• Pemberdayaan masyarakat (KPPBM, KBBM, VCA/PRA dan lainnya)</li> <li>• Manajemen pelatihan</li> <li>• Manajemen posko</li> <li>• Manajemen data dan Informasi</li> <li>• Perawatan keluarga</li> <li>• Rencana kontijensi</li> </ul> <p><b>Kalkulasi:</b> Cukup jelas.</p> <p>Pencatatan terpisah berdasarkan jenis kelamin dan kategori usia.</p>	Orang	500	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Database pelatihan</li> <li>• Database relawan</li> </ul>	1 x 1 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seleksi Relawan sesuai kategori pelatihan</li> <li>• Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan ketrampilan layanan untuk Relawan</li> <li>• Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan untuk Relawan</li> <li>• Memperbaharui database Relawan</li> </ul>

No	Indikator	Uraian Indikator	Satuan Pengukuran	Target	Alat Verifikasi	Frekuensi Pelaporan	Rujukan Kegiatan
70	Jumlah Relawan PMI yang dimobilisasi di tingkat Nasional/Prov/Kab/Kota	<p>Relawan PMI terdaftar yang dimobilisasi oleh PMI Pusat/Prov/Kab/Kota untuk mendukung kegiatan PMI lintas daerah, baik untuk kebencanaan maupun non-bencana, berdasarkan spesialisasi/keterampilan khusus yang dimilikinya.</p> <p><b>Kalkulasi:</b> Cukup jelas.</p> <p>Seorang Relawan dihitung sebagai satu orang walaupun dimobilisasi lebih dari satu kali.</p> <p>Pencatatan terpilah berdasarkan jenis kelamin dan kategori usia.</p>	Orang	Aktual	Laporan tahunan	1 x 1 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengembangkan roster dalam SIM Relawan</li> <li>• Menyiapkan kelengkapan administratif mobilisasi</li> <li>• Dokumentasi, kompilasi laporan Relawan yang dimobilisasi untuk pembelajaran</li> </ul>

No	Indikator	Uraian Indikator	Satuan Pengukuran	Target	Alat Verifikasi	Frekuensi Pelaporan	Rujukan Kegiatan
<b>Output 3.1.3:</b>							
<b>Panduan Manajemen Relawan yang diperbaharui, tersedia dan diimplementasikan</b>							
71	Jumlah operasi kedaruratan yang dikelola oleh PMI mengimplementasikan panduan manajemen Relawan yang sudah diperbaharui	<p>PMI mengimplementasikan Panduan Manajemen Relawan yang sudah diperbaharui dan disahkan.</p> <p>Panduan manajemen Relawan yang diterbitkan oleh PMI Pusat termasuk didalamnya terkait penugasan Relawan dalam kegiatan kedaruratan PMI setempat dan kegiatan lintas daerah, dengan ketentuan-ketentuan yang antara lain tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prosedur mobilisasi dan demobilisasi, termasuk briefing dan debriefing;</li> <li>• Peraturan keselamatan dan keamanan bekerja di lapangan;</li> <li>• Penyediaan perlengkapan APD</li> <li>• Asuransi selama penugasan</li> <li>• Transportasi dan akomodasi selama penugasan</li> <li>• Biaya penugasan Relawan</li> </ul> <p><b>Kalkulasi:</b> Jumlah operasi kedaruratan yang mengimplementasikan Panduan Mobilisasi Relawan</p>	Event	Aktual	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan Bidang PMR/ Relawan</li> <li>• Laporan Operasi Kedaruratan</li> </ul>	1 x 1 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyusun alat monitoring mobilisasi Relawan</li> <li>• Menyusun panduan briefing/debriefing</li> <li>• Monitoring mobilisasi Relawan, mulai dari pra-mobilisasi, saat penugasan, hingga demobilisasi</li> <li>• Memfasilitasi kepentingan Relawan yang dimobilisasi</li> <li>• Mengupayakan penghargaan untuk Relawan (material/non-material)</li> <li>• Lokakarya pembelajaran mobilisasi Relawan</li> <li>• Memfasilitasi layanan jaminan kesehatan, kecelakaan kerja dan kematian untuk Relawan yang ditugaskan pada Operasi Kemanusiaan</li> </ul>
72	Jumlah operasi kemanusiaan PMI yang mengimplementasikan ketentuan keselamatan dan keamanan ( <i>duty of care</i> ) untuk penugasan Relawan	<p>Ketentuan keselamatan dan keamanan adalah ketentuan untuk jaminan keselamatan dan keamanan Relawan yang dimobilisasi atas permintaan PMI untuk mendukung operasi kemanusiaan (kedaruratan dan non darurat), dengan ketentuan tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Biaya evakuasi hingga perawatan, bilamana yang bersangkutan mengalami kecelakaan kerja;</li> <li>• Santunan, bilamana yang bersangkutan gugur dalam penugasan;</li> <li>• Jaminan pelayanan kesehatan, bilamana yang bersangkutan jatuh sakit.</li> </ul> <p><b>Kalkulasi:</b> Jumlah operasi kemanusiaan yang mengimplementasikan jaminan keselamatan dan keamanan Relawan</p>	Event	Aktual	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rencana kerja tahunan;</li> <li>• Rencana operasi;</li> <li>• Laporan keuangan ;</li> <li>• Laporan operasi.</li> </ul>	1 x 1 tahun	

No	Indikator	Uraian Indikator	Satuan Pengukuran	Target	Alat Verifikasi	Frekuensi Pelaporan	Rujukan Kegiatan
<b>Outcome 3.2:</b>							
Pendidikan karakter kepada PMR Mula, Madya dan Wira terlaksana sesuai pedoman manajemen pembinaan PMR							
73	% Unit PMR PMI Kab/Kota yang melaporkan kegiatannya setidaknya 2 kali dalam setahun	<p>Adalah Unit-Unit PMR (Mula/Madya/Wira) yang melaporkan implementasi rencana kegiatannya kepada PMI Kab/Kota pembinaannya, meliputi kegiatan yang antara lain tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan umum extra-kurikuler di sekolah yang diinisiasi oleh Unit-Unit PMR</li> <li>• Implementasi program/kegiatan PMI: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Kegiatan Remaja Sebaya</li> <li>○ Kampanye Lingkungan Hijau (<i>green campaign</i>)</li> <li>○ Sekolah Sehat</li> <li>○ Sekolah Siaga Bencana</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Kalkulasi:</b> Jumlah unit PMR yang aktif melapor sedikitnya 2 kali kegiatan per tahun kepada PMI Kab/Kota, berbanding dengan jumlah unit PMR PMI se-Indonesia</p>	Persentase	50%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan Kegiatan Unit PMR</li> <li>• Laporan PMI Kab/Kota</li> <li>• Data konsolidasi nasional unit PMR aktif</li> </ul>	1 x 1 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoring kegiatan unit-unit PMR</li> <li>• Dokumentasi, kompilasi laporan-laporan kegiatan PMR</li> <li>• Memfasilitasi, pendampingan kegiatan PMR</li> <li>• Monitoring kegiatan unit-unit PMR</li> </ul>
74	%PMI Kab/Kota yang memiliki unit PMR aktif setiap tingkatan $\geq 3$ sekolah.	<p>Adalah PMI Kab/Kota yang membina kegiatan PMR Mula/Madya/Wira di sekolah-sekolah (Dasar/Menengah) yang berlokasi di Kabupaten/Kota terkait.</p> <p>Unit PMR aktif adalah sekolah dengan unit PMR yang melaksanakan kegiatan rutin <math>\geq 1</math> kegiatan setiap bulannya.</p> <p><b>Kalkulasi:</b> Jumlah PMI Kab/Kota dengan unit PMR aktif <math>\geq 3</math> unit, berbanding dengan jumlah PMI Kab/Kota yang melapor.</p>	Persentase	50%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rencana kegiatan unit PMR dari sekolah</li> <li>• Laporan PMI Kab/Kota tentang kegiatan unit-unit PMR</li> </ul>	1 x 1 tahun	

No	Indikator	Uraian Indikator	Satuan Pengukuran	Target	Alat Verifikasi	Frekuensi Pelaporan	Rujukan Kegiatan
<b>Output 3.2 1:</b>							
Terbentuknya unit-unit PMR di sekolah Dasar/Menengah dengan Guru Pembina PMR yang kompeten di PMI Kab/Kota							
75	Jumlah Pembina PMR PMI yang aktif dalam setahun terakhir	<p>Adalah Guru/tenaga pendidik yang memfasilitasi kegiatan pembinaan PMR di sekolah-sekolah (dasar/menengah)</p> <p><b>Kalkulasi:</b> Jumlah Guru Pembina PMR di unit-unit PMR yang aktif.</p> <p>Target ditetapkan 50% dari total Guru Pembina PMR yang tercatat dalam SIM PMI (N=15.000).</p> <p>Pencatatan terpilah berdasarkan jenis kelamin dan kategori usia.</p>	Orang	7.500	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan PMI Kab/Kota</li> <li>Data SIM PMI</li> </ul>	1 x 1 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan kepada Guru Pembina Unit PMR;</li> <li>Memfasilitasi perencanaan kegiatan unit-unit PMR;</li> <li>Mempromosikan pendekatan sebaya kepada Guru Pembina PMR.</li> </ul>
76	Jumlah anggota PMR se-Indonesia	<p>Anggota PMR adalah anggota unit PMR Mula, Madya dan Wira di sekolah-sekolah binaan PMI Kab/Kota seluruh Indonesia</p> <p><b>Kalkulasi:</b> Total (individu) anggota PMR yang dilaporkan oleh semua PMI Kab/Kota.</p> <p>Target ditetapkan 10% dari total anggota PMR yang tercatat dalam SIM PMI (N= 295.000).</p> <p>Pencatatan terpilah berdasarkan jenis kelamin dan kategori usia.</p>	Orang	29.500	SIM PMI	1 x 1 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>Advokasi dan sosialisasi kegiatan PMR ke sekolah-sekolah sasaran;</li> <li>Membentuk unit-unit PMR Mula/Madya/Wira di sekolah-sekolah Dasar/Menengah;</li> <li>Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan kewiraan untuk PMR;</li> <li>Menyusun materi KIE untuk kegiatan PMR sebaya;</li> <li>Pendampingan kegiatan pendekatan sebaya PMR;</li> <li>Monitoring kegiatan PMR se-Indonesia;</li> <li>Memperbaharui sistem pencatatan untuk database PMR;</li> <li>Memperbaharui database PMR se-Indonesia.</li> </ul>



No	Indikator	Uraian Indikator	Satuan Pengukuran	Target	Alat Verifikasi	Frekuensi Pelaporan	Rujukan Kegiatan
77	PMI Prov/Kab/Kota melaksanakan Jumbara	<p>Jumbara (Jumpa Bakti Gembira) adalah sebuah acara yang mempertemukan anggota PMR dari berbagai daerah asal untuk bersama-sama belajar, bertukar pengalaman, memantau serta mengevaluasi proses pembinaan dan kepemimpinan PMR yang dilaksanakan PMI sekaligus untuk merancang peran dan kegiatan PMR yang berkesinambungan.</p> <p>Jumlah kegiatan Temu Karya diadakan minimal sekali dalam periode Kepeguruan.</p> <p><b>Kalkulasi:</b> Cukup jelas.</p>	Event	10	Laporan kegiatan Jumbara	1 x 3 tahun	Sesuai Juklak/Juknis Jumbara
<p><b>Output 3.2.2:</b> Kegiatan Unit PMR yang unik dan inovatif didokumentasikan, didiseminasikan, di replikasi/duplikasi oleh Unit PMR di wilayah lainnya.</p>							
78	Jumlah unit PMR yang melaporkan kegiatan yang kreatif dan inovatif setiap tahunnya	<p>Kegiatan Unit PMR yang kreatif dan inovatif adalah kegiatan yang bertujuan untuk mencari pemecahan sebuah permasalahan secara cerdas, berbeda, tidak umum, membawa hasil yang tepat dan bermanfaat dengan mendayagunakan pikiran dan sumber daya yang ada sesuai dengan konteks Kepalangmerahan.</p> <p><b>Kalkulasi:</b> Jumlah Unit PMR yang melaporkan kegiatan yang kreatif dan inovatif ke PMI Kab/Kota dan diteruskan ke PMI Pusat</p>	Unit	Aktual	Laporan PMI Kab/Kota	1 x 1 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun panduan informasi dan dokumentasi kegiatan PMR;</li> <li>Memfasilitasi kegiatan PMR yang inovatif;</li> <li>Melaksanakan dokumentasi kegiatan PMR secara periodik;</li> <li>Promosi, sosialisasi kegiatan PMR yang inovatif.</li> </ul>
79	Jumlah buletin informasi PMR yang diterbitkan oleh PMI Pusat	<p>Buletin Informasi PMR adalah sarana publikasi internal PMI untuk kegiatan-kegiatan PMR yang diseleksi menurut tematik tertentu dan dikelola oleh PMI Pusat.</p> <p><b>Kalkulasi:</b> Cukup Jelas</p>	Buletin	5	Laporan Bidang PMR dan Relawan PMI Pusat	1 x 1 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>Seleksi laporan kegiatan PMR untuk Buletin informasi;</li> <li>Menerbitkan Buletin Informasi kegiatan Relawan se-Indonesia.</li> </ul>

#### TUJUAN STRATEGIS-4

Meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan penanggulangan bencana, krisis kesehatan dan krisis kemanusiaan lainnya, melalui penguatan unit-unit pelayanan PMI di semua tingkatan dan pengembangan potensi sumber daya masyarakat.

No	Indikator	Uraian Indikator	Satuan Pengukuran	Target	Alat Verifikasi	Frekuensi Pelaporan	Rujukan Kegiatan
<b>Outcome 4.1</b>							
Kapasitas dan kualitas pelayanan PM di bidang kebencanaan dan pencegahan krisis kesehatan dan krisis kemanusiaan lainnya meningkat dengan berpedoman pada standar layanan kemanusiaan yang universal							
80	Jumlah PMI Prov/Kab/Kota yang memiliki setidaknya 3 upaya kesiapsiagaan institusional	<p>Adalah PMI Pusat/Prov/Kab/Kota yang melaksanakan upaya kesiapsiagaan institusional antara lain, tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Memiliki Pengurus/Pegawai Markas bidang pelayanan (PB dan kesehatan);</li> <li>Membina satuan tanggap darurat (bencana, krisis kesehatan dan krisis kemanusiaan lainnya);</li> <li>Memiliki Posko 24/7;</li> <li>Memiliki Rencana Kontinjensi/kedaruratan dan SOP yang diperbaharui secara berkala;</li> <li>Memiliki dana siap pakai</li> </ul> <p><b>Kalkulasi:</b> Cukup jelas</p>	Unit	34 Prov, 150 Kab/Kota	Laporan konsolidasi BOCA dan atau PER ( <i>Preparedness for Effective Response</i> )	1 x 1 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adopsi perangkat PER</li> <li>Penilaian kapasitas organisasi (OCAC/BOCA/PER)</li> <li>Analisis hasil penilaian kapasitas organisasi</li> <li>Diseminasi hasil penilaian</li> <li>Penyusunan rencana aksi</li> </ul>
81	Presentase peningkatan kesiapsiagaan institusional di PMI Pusat	<p>Adalah kesiapsiagaan institusi PMI di tingkat Nasional yang diukur menggunakan perangkat PER (<i>Preparedness for Effective Response</i>) dengan berbagai komponennya.</p> <p><b>Kalkulasi:</b> Jumlah peningkatan capaian <i>benchmark</i> PER dari asesmen pada periode sebelumnya.</p>	Presentase	80%	Laporan analisis hasil asesmen PER	1 x 2 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyelenggarakan pertemuan asesmen PER;</li> <li>Melaksanakan analisis hasil PER;</li> <li>Menyusun analisis perbandingan (tren perkembangan) hasil PER.</li> </ul>

No	Indikator	Uraian Indikator	Satuan Pengukuran	Target	Alat Verifikasi	Frekuensi Pelaporan	Rujukan Kegiatan
<b>Output 4.1.1</b>							
Tersedianya unit layanan kebencanaan, krisis kesehatan dan krisis kemanusiaan lainnya serta satuan spesialisasi yang profesional di PMI Pusat/Prov/Kab/Kota							
82	Jumlah PMI Kab/Kota yang memiliki layanan prioritas tanggap darurat dan krisis kesehatan	<p>Adalah PMI Kab/Kota yang telah memiliki layanan tanggap darurat setidaknya dengan kompetensi atau terlatih keterampilan tanggap darurat bencana dan atau pencegahan krisis kesehatan</p> <p><b>Layanan prioritas minimal:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asesmen;</li> <li>• SAR dan evakuasi;</li> <li>• Logistik;</li> <li>• Distribusi bantuan;</li> <li>• Pelayanan PP dasar;</li> <li>• Pengelolaan POSKO lapangan.</li> </ul> <p>Prioritas baru lainnya akan diatur ulang dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis PB.</p> <p><b>Kalkulasi:</b> Jumlah PMI Kab/Kota yang dengan 7 (tujuh) layanan prioritas PMI diatas dan melaporkannya kepada PMI setingkat diatasnya.</p>	Unit	150	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan Bidang Pelayanan (PB dan Kesehatan )</li> <li>• Data alumni pelatihan PMI Pusat/ Provinsi</li> <li>• SIM PMI</li> </ul>	1 x 1 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PMI Kab/Kota melaksanakan penugasan rotasi/piket Posko kepada anggota Tim Satgana</li> <li>• Menyusun Rencana Awal Aksi tanggap darurat bencana/krisis kesehatan tingkat Kab/Kota</li> <li>• Menyusun Rencana Awal Aksi tanggap darurat bencana/krisis kesehatan tingkat nasional/provinsi</li> <li>• Membangun jejaring dengan Badan/Lembaga terkait Rencana Kontinjensi</li> <li>• Menyelenggarakan simulasi Renkon, review dan re-formulasi Renkon</li> <li>• Membangun dan memantapkan Tim Satgana PMI Kab/Kota, termasuk wilayah rawan konflik</li> <li>• Membangun kapasitas layanan sektoral (Shelter, WASH, PSP, Kedar, Logistik, IT-Telekom, dll)</li> <li>• Membangun mekanisme dukungan personil lintas daerah (Korlap, Pendamping, Spesialis)</li> <li>• Menyelenggarakan lokakarya-lokakarya kebencanaan, kesehatan, krisis konteks sensitif</li> <li>• Membangun dan memantapkan kapasitas Posko PMI di semua tingkatan</li> <li>• Menyelenggarakan pelatihan-pelatihan tanggap darurat bencana, krisis kesehatan, krisis konteks sensitif</li> <li>• Koordinasi dengan sub-klaster nasional</li> </ul>

No	Indikator	Uraian Indikator	Satuan Pengukuran	Target	Alat Verifikasi	Frekuensi Pelaporan	Rujukan Kegiatan
83	Jumlah personil spesialis Tanggap Darurat PMI yang dimobilisasi pada saat bencana	<p>Adalah Pegawai/KSR/TSR PMI dengan pengetahuan, praktisi, keterampilan spesialis yang dimobilisasi oleh PMI untuk operasi bencana tingkat Kab/Kota/Prov/Pusat tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asesmen</li> <li>• Pertolongan Pertama</li> <li>• Evakuasi</li> <li>• RFL</li> <li>• Kehumasan</li> <li>• Pelayanan dapur umum</li> <li>• Pelayanan kesehatan</li> <li>• Pelayanan ambulans</li> <li>• Psychological Social Support</li> <li>• Air dan sanitasi</li> <li>• Penampungan dan pengungsian/Hunian</li> <li>• Distribusi bantuan</li> <li>• Manajemen Tanggap Darurat Bencana</li> <li>• Manajemen pergudangan</li> <li>• Manajemen konflik</li> <li>• Manajemen pengelolaan posko lapangan</li> <li>• Manajemen data dan Informasi</li> <li>• Perawatan keluarga</li> </ul> <p><b>Kalkulasi:</b> Cukup jelas.</p> <p>Pencatatan terpilah berdasarkan jenis kelamin dan kategori usia.</p> <p>Seorang personil dihitung sebagai satu orang walaupun dimobilisasi lebih dari satu kali.</p>	Orang	Aktual	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan Bidang Pelayanan (PB dan Kesehatan)</li> <li>• Data alumni pelatihan PMI Pusat/Provinsi</li> <li>• SIM PMI</li> </ul>	1 x 1 tahun	<p>PMI Pusat/Provinsi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan SOP pra-mobilisasi dan demobilisasi</li> <li>• Mobilisasi personil berkualifikasi Korlap, Pendamping, Spesialis</li> <li>• Dokumentasi personil pasca mobilisasi</li> </ul>

No	Indikator	Uraian Indikator	Satuan Pengukuran	Target	Alat Verifikasi	Frekuensi Pelaporan	Rujukan Kegiatan
84	Jumlah PMI Kab/Kota yang melaporkan aktivitas kesiapsiagaan, krisis kesehatan dan krisis kemanusiaan lainnya	<p>Adalah PMI Kab/Kota yang merespons peristiwa darurat kebencanaan, krisis kesehatan atau krisis kemanusiaan lainnya (konflik, bencana industri, gagal komunikasi dan lain-lain yang berdampak korban massal) sebelum peristiwa bencana terjadi, meliputi aksi/tindakan dini, tindakan respons awal, antara lain, tidak terbatas pada:</p> <p>Pra-Bencana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memantau prakiraan cuaca (<i>hydro-meteorological</i>) yang berpotensi bencana</li> <li>• Menggerakkan potensi masyarakat</li> <li>• Kerjasama strategis dengan lembaga terkait</li> <li>• Konsolidasi sumber daya TDB PMI (SDM, Alat, Dana, sistim mobilisasi, dst)</li> </ul> <p><b>Kalkulasi:</b> Cukup jelas</p>	Unit	150	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan Bidang Pelayanan (PB dan Kesehatan)</li> <li>• Laporan Pusdatin PMI</li> </ul>	1 x 1 tahun	<p>Pra-Bencana (umum)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyusun kebijakan keuangan dan operasional untuk melakukan aksi/tindakan dini pengurangan risiko bencana.</li> <li>• Membangun kerjasama strategis dengan lembaga dan kementerian pemerhati kebencanaan yang relevan.</li> <li>• Memperbaharui peta rawan bencana (PMI) secara omunika</li> <li>• Melaksanakan kajian dampak bencana secara periodic sebelum siklus kejadian bencana termaksud terjadi.</li> <li>• Mengirim laporan potensi bencana merujuk pada prakiraan situasi yang diterbitkan oleh lembaga berwenang</li> <li>• Menggerakkan potensi masyarakat di wilayah rawan bencana untuk aksi/tindakan dini.</li> </ul> <p>PMI Kab/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengirim laporan situasi bencana terkini</li> <li>• Memperbaharui peta rawan bencana/krisis kesehatan secara periodic</li> <li>• PMI Kab/Kota membangun jejaring, koodinasi, dan omunikasi dengan pihak terkait kebencanaan/kesehatan</li> <li>• PMI Kab/Kota membangun jejaring, koneksi dengan sistim peringatan dini Pemda setempat</li> </ul> <p>PMI Pusat/Provinsi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoring peristiwa bencana</li> <li>• Memperbaharui peta rawan bencana/ krisis kesehatan, local/nasional</li> <li>• Melaksanakan simulasi operasi bencana dengan scenario 6 jam aksi per kesempatan pertama</li> <li>• Mengalokasikan Dana Kontinjensi tingkat Nasional</li> </ul>

No	Indikator	Uraian Indikator	Satuan Pengukuran	Target	Alat Verifikasi	Frekuensi Pelaporan	Rujukan Kegiatan
85	Presentase Kasus RFL yang ditindaklanjuti	<p>Adalah kasus RFL (tidak terbatas pada bencana/konflik) yang diajukan kepada PMI dan ditindaklanjuti hingga kasus dinyatakan ditutup oleh PMI Kab/Kota atau Provinsi, dan Pusat</p> <p><b>Kalkulasi:</b> Jumlah kasus yang dinyatakan ditutup oleh PMI berbanding dengan total kasus yang masuk</p>	Presentase	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan Bidang Layanan (PB)</li> <li>Laporan PMI Kab/Kota /Prov</li> </ul>	1 x 1 tahun	<p>PMI Kab/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Identifikasi kasus RFL, saat bencana atau normal</li> <li>Membangun mekanisme umpan balik terkait kasus RFL</li> <li>Identifikasi dan membangun komunikasi dengan pihak-pihak terkait kasus RFL</li> <li>Dokumentasi individu dengan kasus RFL</li> </ul> <p>PMI Pusat/Provinsi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fasilitasi tindaklanjut kasus RFL lintas kabupaten/provinsi</li> </ul>

No	Indikator	Uraian Indikator	Satuan Pengukuran	Target	Alat Verifikasi	Frekuensi Pelaporan	Rujukan Kegiatan
<b>Output 4.1.2</b> Dokumen panduan/SOP untuk layanan kebencanaan, krisis kesehatan dan krisis kemanusiaan lainnya tersedia dan diimplementasikan							
86	Jumlah pedoman manajemen kedaruratan diterbitkan oleh PMI Pusat	Adalah panduan/SOP/manual, metode manajemen (tatakelola) termasuk layanan/bantuan kemanusiaan (CBI, FBA), termasuk aplikasi berbasis teknologi informasi, untuk layanan kebencanaan, krisis kesehatan dan krisis kemanusiaan lainnya yang ada terbaru sesuai dengan standar yang berlaku universal.  <b>Kalkulasi:</b> Cukup jelas	Dokumen	Aktual	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Panduan</li> <li>• SOP dan alur kerja</li> <li>• Manual</li> </ul>	1 x 1 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lokakarya review, revisi panduan pelayanan kedaruratan</li> <li>• Lokakarya review, revisi SOP kedaruratan</li> <li>• Penyusunan panduan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan kedaruratan</li> <li>• Penyusunan panduan tentang standar kualitas dan akuntabilitas pelayanan kemanusiaan</li> <li>• Panduan keamanan/SOP bekerja di konteks sensitive (SAF)</li> <li>• Penyusunan panduan untuk monitoring implementasi Proteksi, Jender, Inklusifisme (PGI) dalam layanan kedaruratan PMI</li> <li>• Monitoring implementasi panduan/SOP layanan kedaruratan</li> <li>• Mengembangkan panduan untuk sistim layanan/bantuan berbasis tunai (Cash-Based Intervention)</li> <li>• Mengembangkan panduan sistim peringatan dini untuk antisipasi dampak bencana/krisis kesehatan, termasuk forcast-based financing.</li> <li>• Mengembangkan aplikasi kesiapisagaan/kedaruratan berbasis Teknologi informasi dan Komunikasi</li> </ul>

No	Indikator	Uraian Indikator	Satuan Pengukuran	Target	Alat Verifikasi	Frekuensi Pelaporan	Rujukan Kegiatan
87	PMI Pusat/Prov/Kab/Kota melaksanakan simulasi kedaruratan sesuai Panduan/SOP kedaruratan	<p>Simulasi kedaruratan adalah kegiatan uji coba respons kedaruratan berbasis skenario tertentu, yang dilaksanakan dalam bentuk “<i>table-top exercise</i>” (menguji efektifitas alur koordinasi dan komunikasi) atau “<i>application exercise</i>” seperti simulasi menguji aksi-aksi respons yang merujuk pada panduan/SOP kedaruratan.</p> <p><b>Kalkulasi:</b> Jumlah kegiatan simulasi kedaruratan yang diinisiasi oleh PMI Pusat/Prov/Kab/Kota</p>	<i>Event</i>	150	Laporan Simulasi Kedaruratan	1 x 1 tahun	<p>Pra-simulasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan scenario simulasi</li> <li>• Penentuan metode simulasi, <i>table-top</i> atau <i>application exercise</i></li> <li>• Identifikasi lokasi, perizinan</li> <li>• Identifikasi keterlibatan stakeholders</li> <li>• Penyiapan personil PMI</li> <li>• Penyusunan run-down, pembagian peran, tugas</li> <li>• Persiapan lapangan</li> </ul> <p>Pelaksanaan simulasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Briefing</li> <li>• Pelaksanaan run-down, peran dan tugas</li> </ul> <p>Pasca simulasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Debriefing petugas PMI</li> <li>• Workshop, rekomendasi perbaikan SOP</li> </ul>



No	Indikator	Uraian Indikator	Satuan Pengukuran	Target	Alat Verifikasi	Frekuensi Pelaporan	Rujukan Kegiatan
<b>Output 4.1.3</b>							
Pelayanan kemanusiaan PMI dilaksanakan sesuai standar teknis, kualitas dan akuntabilitas yang berlaku secara universal.							
88	Presentase laporan akhir operasi kedaruratan PMI	<p>Adalah laporan yang disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban lembaga baik internal dan eksternal, yang memuat informasi tentang implementasi, capaian-capaian target dan realisasi anggaran, yang disampaikan secara tepat waktu.</p> <p>Laporan dapat disusun oleh Manager Operasi dan atau Pegawai Bidang Layanan (PB/Kesehatan)</p> <p><b>Kalkulasi:</b> Jumlah laporan akhir operasi kedaruratan berbanding dengan total operasi kedaruratan yang dilaksanakan PMI.</p>	Presentase	80%	Laporan Akhir Operasi Kedaruratan	1 x 1 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standarisasi format pelaporan</li> <li>• Penyusunan laporan situasi</li> <li>• Penyusunan laporan kemajuan periodik</li> <li>• Penyusunan laporan final</li> <li>• Diseminasi laporan operasi kedaruratan</li> </ul>
89	Presentase operasi kedaruratan PMI dengan layanan/ bantuan kemanusiaan sesuai standar teknis yang berlaku	<p>Operasi kedaruratan PMI adalah operasi kedaruratan yang telah mengikuti standar teknis yang berlaku baik secara kualitas, kuantitas dan akuntabilitas setidaknya merujuk pada panduan SPHERE dan CHS (<i>Core Humanitarian Standard</i>), termasuk PGI (<i>Protection, Gender and Inclusion</i>).</p> <p>Operasi PMI adalah layanan/bantuan kemanusiaan kedaruratan dan non-kedaruratan yang memberikan layanan, tidak terbatas pada sektor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Layanan/bantuan hunian (<i>Shelter</i>)</li> <li>• Layanan/bantuan non-pangan (<i>non-food items</i>)</li> <li>• Layanan/bantuan air dan sanitasi (<i>WASH</i>)</li> <li>• Layanan/bantuan kesehatan (<i>Health, PSS</i>)</li> </ul> <p><b>Kalkulasi:</b> Jumlah operasi kedaruratan yang telah mengikuti standar teknis yang berlaku berbanding dengan total operasi kedaruratan yang dilakukan PMI.</p>	Presentase	20%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen perencanaan operasi kedaruratan tingkat nasional</li> <li>• Laporan monitoring implementasi operasi kedaruratan</li> </ul>	1 x 1 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Orientasi standar teknis sektor-sektor pelayanan kepada Relawan</li> <li>• Menyusun rencana operasi merujuk kepada standar teknis yang berlaku</li> <li>• Pendampingan teknis sektor-sektor pelayanan</li> <li>• Monitoring implementasi sector-sektor pelayanan</li> </ul>

No	Indikator	Uraian Indikator	Satuan Pengukuran	Target	Alat Verifikasi	Frekuensi Pelaporan	Rujukan Kegiatan
90	Jumlah orang yang dijangkau layanan kemanusiaan PMI terdokumentasi	<p>Orang yang dijangkau layanan kemanusiaan PMI adalah individu/keluarga/kelompok masyarakat yang menerima manfaat langsung layanan darurat bencana dan/atau krisis kemanusiaan lainnya maupun program/kegiatan lain-lain diluar situasi kebencanaan/krisis kemanusiaan lainnya, termasuk program/kegiatan berbasis masyarakat.</p> <p>Terdokumentasi adalah tercatat jumlahnya, dipilah berdasarkan jenis kelamin dan kategori usia, serta orang yang sama tidak dihitung dua kali (<i>double counting</i>).</p> <p>Data KK perlu di konversi menjadi jiwa/orang</p> <p><b>Kalkulasi:</b> Jumlah total orang yang dijangkau layanan PMI disemua tingkatan yang tercatat oleh PMI Pusat.</p>	Orang	Aktual	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan Semester PMI Kab/Kota</li> <li>Laporan Bidang Pelayanan (PB dan Kesehatan)</li> </ul>	1 x 1 tahun	Pencatatan orang yang dijangkau per sektor pelayanan dipilah berdasarkan jenis kelamin dan kategori usia

No	Indikator	Uraian Indikator	Satuan Pengukuran	Target	Alat Verifikasi	Frekuensi Pelaporan	Rujukan Kegiatan
91	Presentase operasi kedaruratan PMI yang mengimplementasikan Gender, Proteksi, Inklusif (PGI) secara sistematis	<p>Isu terkait gender, proteksi dan inklusif adalah pertimbangan normatif dan akuntabilitas yang melekat pada setiap bentuk layanan/bantuan kemanusiaan, untuk memastikan penghormatan terhadap martabat penerima manfaat (<i>dignity</i>), ketersediaan akses untuk kelompok rentan tertentu (<i>access</i>), keterlibatan penerima manfaat (<i>participation</i>), dan rasa aman (<i>safety</i>) terhadap tindakan kekerasan, pelecehan, intoleransi dan lain-lain.</p> <p>Secara sistematis isu gender, proteksi, inklusif yang dikelola meliputi langkah-langkah dalam layanan kemanusiaan PMI, antara lain, tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perencanaan layanan/bantuan PMI</li> <li>• Implementasi/distribusi layanan/bantuan PMI, termasuk bantuan berbasis tunai (CBI);</li> <li>• Monitoring layanan/bantuan PMI;</li> <li>• Diseminasi informasi dan mekanisme umpan-balik layanan/bantuan PMI.</li> </ul> <p><b>Kalkulasi:</b> Jumlah operasi kedaruratan PMI yang telah mengimplementasikan PGI berbanding dengan total operasi kedaruratan PMI</p>	Event	30%	Laporan monitoring implementasi layanan	1 x 1 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pencatatan terpilah berdasarkan jenis kelamin dan kategori usia</li> <li>• Pelatihan Relawan tentang isu PGI</li> <li>• Pengarusutamaan isu PGI dalam program dan layanan PMI</li> <li>• Pelatihan Relawan tentang tatakelola bantuan berbasis tunai</li> <li>• Implementasi dan monitoring bantuan berbasis tunai</li> <li>• Perencanaan yang partisipatif</li> <li>• Melibatkan masyarakat/penerima manfaat dalam implementasi kegiatan Monitoring, memastikan isu gender, proteksi teridentifikasi dan ditindaklanjuti secara tepat</li> <li>• Pendampingan, fasilitasi kelompok penerima manfaat terkait isu gender dan proteksi</li> <li>• Koordinasi dengan sub-klaster Gender dan Proteksi</li> </ul>

No	Indikator	Uraian Indikator	Satuan Pengukuran	Target	Alat Verifikasi	Frekuensi Pelaporan	Rujukan Kegiatan
<b>Output 4.1.4</b>							
Layanan kesehatan umum, spesialis/sub-spesialis berbasis fasilitas kesehatan tumbuh dan berkembang							
92	Presentase PMI Prov/Kab/Kota yang menginisiasi pendirian fasilitas layanan kesehatan	<p>Fasilitas layanan kesehatan PMI adalah sarana layanan kesehatan untuk umum, memiliki ijin pendirian yang diterbitkan oleh pihak berwenang, yang dikelola oleh PMI Prov/Kab/Kota dengan layanan yang tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rumah Sakit Umum</li> <li>• Klinik kesehatan (mum/khusus)</li> <li>• Dokter Umum</li> <li>• Apotik</li> <li>• Laboratorium pendukung diagnosis</li> <li>• Layanan hemodialisa</li> <li>• Layanan lain-lain yang relevan</li> </ul> <p><b>Kalkulasi:</b> Jumlah PMI Prov/Kab/Kota yang melaporkan pendirian atau pengoperasian fasilitas kesehatan berbanding dengan total PMI Prov/Kab/Kota</p>	Presentase	10%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen pendirian fasilitas layanan kesehatan PMI</li> <li>• Laporan Tahunan PMI Prov/Kab/Kota</li> </ul>	1 x 1 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identifikasi PMI Prov/Kab/Kota yang mendirikan fasilitas layanan kesehatan</li> <li>• Monitoring kegiatan fasilitas Pelayanan Kesehatan PMI Prov/Kab/Kota</li> </ul>
93	Presentase fasilitas layanan kesehatan PMI yang memenuhi standar sertifikasi kelayakan oleh pihak berwenang	<p>Adalah fasilitas layanan kesehatan PMI yang memenuhi standar teknis dan kualitas yang disertifikasi oleh Dinas Kesehatan setempat, tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memiliki ijin pendirian/operasional dari pihak berwenang</li> <li>• Ketersediaan tenaga medis/paramedic yang memadai sesuai jenis layanan dan kapasitas layanannya</li> <li>• Ketersediaan ruang layanan yang memenuhi standar higienis, layak</li> <li>• Ketersediaan prosedur layanan standar</li> <li>• Memiliki jaringan pelayanan rujukan</li> </ul> <p><b>Kalkulasi:</b> Jumlah PMI Prov/Kab/Kota yang memiliki sertifikat pelayanan dari Dinas Kesehatan setempat berbanding dengan total fasilitas layanan kesehatan PMI</p>	Presentase	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen sertifikat</li> <li>• Laporan Tahunan PMI Prov/Kab/Kota</li> </ul>	1 x 1 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identifikasi PMI Prov/Kab/Kota yang mendirikan fasilitas layanan kesehatan</li> <li>• Monitoring kegiatan sertifikasi fasilitas Pelayanan Kesehatan PMI Prov/Kab/Kota</li> <li>• PMI Pusat melaksanakan dokumentasi, kompilasi sertifikasi fasilitas Pelayanan Kesehatan PMI Prov/Kab/Kota</li> </ul>

No	Indikator	Uraian Indikator	Satuan Pengukuran	Target	Alat Verifikasi	Frekuensi Pelaporan	Rujukan Kegiatan
94	Presentase PMI Prov/Kab/Kota dengan fasilitas layanan kesehatan yang melaporkan jumlah orang yang dijangkau	<p>Orang yang dijangkau adalah pengunjung yang memperoleh layanan langsung dari fasilitas layanan kesehatan PMI Prov/Kab/Kota .</p> <p><b>Kalkulasi</b> Jumlah PMI Prov/Kab/Kota dengan fasilitas Yankes yang melaporkan jumlah orang yang dijangkau langsung dipilah berdasarkan jenis kelamin dan kategori usia, berbanding dengan total PMI Prov/Kab/Kota yang memiliki fasilitas layanan kesehatan.</p> <p>Pencatatan orang yang dijangkau tidak dihitung dua kali (<i>double counting</i>).</p>	Presentase	100%	Laporan penerima manfaat terpilah dari PMI Prov/Kab/Kota yang mengoperasikan fasilitas layanan kesehatan	1 x 1 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>PMI Pusat/Divisi Yankessos membuat standar laporan kegiatan fasilitas Yankes PMI</li> <li>Fasilitas Yankes PMI Prov/Kab/Kota melaporkan kegiatan kepada PMI setingkat di atasnya dan PMI Pusat</li> </ul>

No	Indikator	Uraian Indikator	Satuan Pengukuran	Target	Alat Verifikasi	Frekuensi Pelaporan	Rujukan Kegiatan
<b>Outcome 4.2</b>							
Kapasitas dan kualitas pelayanan PMI dalam upaya pengurangan risiko bencana (PRB) dan pencegahan krisis kesehatan yang berbasis masyarakat meningkat							
95	Jumlah PMI Kab/Kota memiliki setidaknya 2 (dua) komunitas binaan program PRB/Kesehatan.	<p>Komunitas Binaan adalah kelompok anggota masyarakat di satuan teritorial tertentu (kelurahan, desa, dusun) yang menjadi sasaran program/kegiatan PMI berbasis masyarakat untuk upaya pengurangan risiko bencana dan/atau pencegahan krisis kesehatan dengan berbagai kegiatan dalam kategori sbb:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengorganisir masyarakat</li> <li>• Mengedukasi masyarakat</li> <li>• Memberdayakan masyarakat</li> </ul> <p><b>Kalkulasi:</b> Jumlah PMI Kab/Kota yang memiliki komunitas dampingan pada periode 2019-2024</p>	Unit	150	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan Tahunan PMI Kab/Kota</li> <li>• Laporan Bidang layanan</li> </ul>	1 x 1 tahun	<p>PMI Pusat/Provinsi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memfasilitasi PMI Kab/Kota yang berinisiatif menyelenggarakan program/kegiatan berbasis masyarakat</li> <li>• Pelatihan teknis dan manajemen program/kegiatan berbasis masyarakat kepada Pegawai/Relawan PMI Kab/Kota</li> <li>• Pendampingan teknis Relawan PMI Kab/Kota untuk implementasi program/kegiatan berbasis masyarakat</li> </ul>
96	Presentase orang yang dijangkau langsung dari program/kegiatan PMI Kab/Kota berbasis masyarakat	<p>Adalah kelompok sasaran langsung program/kegiatan berbasis masyarakat, PRB atau pencegahan krisis kesehatan, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anggota satuan/kelompok yang dilatih PMI</li> <li>• Penerima manfaat edukasi, sosialisasi</li> <li>• Individu/kelompok dengan inisiatif PRB atau pencegahan krisis kesehatan yang mendapat dukungan PMI</li> </ul> <p>Data KK perlu di konversi menjadi jiwa/orang.</p> <p><b>Kalkulasi:</b> Total orang yang dijangkau langsung dari program/kegiatan berbasis masyarakat yang dilaporkan oleh PMI Kab/Kota berbanding dengan jumlah populasi dari komunitas yang menjadi target binaan PMI Kab/Kota.</p> <p>Pencatatan orang yang dijangkau dipilah berdasarkan jenis kelamin dan kategori usia, dan orang yang sama tidak dihitung dua kali (<i>double counting</i>).</p>	Orang	10%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan tahunan PMI Kab/Kota</li> <li>• Laporan Bidang layanan</li> </ul>	1 x 1 tahun	Dokumentasi orang yang dijangkau dari semua kegiatan-kegiatan di masyarakat, dipilah berdasarkan jenis kelamin dan kategori usia.

No	Indikator	Uraian Indikator	Satuan Pengukuran	Target	Alat Verifikasi	Frekuensi Pelaporan	Rujukan Kegiatan
<b>Output 4.2.1:</b>							
PMI Kab/kota memiliki kapasitas dalam memfasilitasi upaya kegiatan PRB dan pencegahan krisis kesehatan berbasis masyarakat.							
97	Jumlah personil PMI Kab/Kota yang dilibatkan dalam program/kegiatan berbasis masyarakat.	<p>Adalah personil PMI Kab/Kota yang memperoleh pelatihan khas PRB dan pencegahan krisis kesehatan dan dimobilisasi untuk program/kegiatan PMI berbasis masyarakat seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelatihan dan edukasi kepada masyarakat sasaran</li> <li>• Pendampingan kelompok masyarakat sasaran</li> <li>• Memfasilitasi masyarakat sasaran dengan sumber-sumber pembangunan setempat</li> </ul> <p><b>Kalkulasi:</b> Total jumlah personil PMI Kab/Kota yang dimobilisasi dalam program/kegiatan berbasis masyarakat.</p> <p>Seorang relawan dihitung sebagai satu orang walaupun dilibatkan lebih dari satu kali.</p> <p>Pencatatan terpilah berdasarkan jenis kelamin dan kategori usia.</p>	Orang	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan PMI Kab/Kota</li> <li>• Laporan Bagian Pelayanan (PB dan Kesehatan)</li> <li>• SIM PMI</li> </ul>	1 x 1 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyelenggarakan pelatihan-pelatihan kepada Relawan PMI untuk kegiatan-kegiatan berbasis masyarakat</li> <li>• Membangun jejaring dan hubungan strategis dengan masyarakat di wilayah rawan bencana/krisis kesehatan</li> <li>• Mengupayakan pelatihan-pelatihan tangggap bencana/krisis kesehatan kepada masyarakat binaan PMI</li> <li>• Membina ketahanan masyarakat terhadap bencana/krisis kesehatan melalui pengembangan proyek-proyek berbasis masyarakat (Mitra Gerakan, Pemerintah) yang berorientasi pada pemberdayaan, Perlindungan lingkungan, pencegahan penyakit</li> </ul>
98	Jumlah PMI Kab/Kota yang memiliki setidaknya satu unit lembaga Pendidikan dengan kegiatan PRB dan pencegahan krisis kesehatan	<p>Lembaga Pendidikan adalah Sekolah (SD/SMP/ SMA/Sederajat) dan Perguruan Tinggi binaan PMI Kab/Kota yang menyelenggarakan kegiatan PRB dan atau pencegahan krisis kesehatan, antara lain, tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelatihan dan edukasi kepada komunitas sekolah dan perguruan tinggi</li> <li>• Mobilisasi Relawan untuk pengurangan risiko di lingkungan sekolah/kampus (untuk Pelatihan PB/PP, penyuluhan PB/Kesehatan, inisiatif pemeliharaan lingkungan, promosi sadar bencana)</li> <li>• Menyelenggarakan simulasi tanggap darurat di lingkungan sekolah/kampus (penyelamatan diri, menyiapkan sekolah/kampus sbg. tempat penampungan sementara)</li> </ul> <p><b>Kalkulasi:</b> Jumlah PMI Kab/Kota dengan kegiatan pembinaan di lembaga-lembaga Pendidikan</p>	Unit	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan Tahunan PMI Kab/Kota</li> <li>• Laporan Bagian PMR-Relawan</li> <li>• Laporan Bidang Pelayanan (PB dan Kesehatan)</li> </ul>	1 x 1 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identifikasi sekolah/kampus sasaran Sekolah/Kampus Siaga Bencana</li> <li>• Menyelenggarakan kegiatan Sekolah/Kampus Siaga Bencana</li> <li>• Menyelenggarakan simulasi bencana di sekolah/kampus dan lingkungan sekitarnya</li> <li>• Meningkatkan gerakan sadar bencana/krisis kesehatan di lembaga-lembaga pendidikan (dukungan Mitra Gerakan/ Donor)</li> </ul>

No	Indikator	Uraian Indikator	Satuan Pengukuran	Target	Alat Verifikasi	Frekuensi Pelaporan	Rujukan Kegiatan
<b>Output 4.2.2</b>							
Tertindakannya program-program pengurangan risiko bencana dan pencegahan krisis kesehatan berbasis masyarakat							
99	% Desa/Kelurahan Binaan PMI Kab/Kota yang telah berhasil mendapatkan dukungan pendanaan Pemerintah	Adalah Desa/Kelurahan binaan PMI Kab/Kota pada periode 2019-2024 yang telah mendapatkan akses pendanaan (dana desa) dari Pemerintah.  <b>Kalkulasi:</b> Jumlah Desa/Kelurahan binaan PMI Kab/Kota periode 2019-2024 yang telah mengakses dana desa berbanding dengan total Desa/Kelurahan binaan PMI di periode 2019-2024.	Presentase	10%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perjanjian kerjasama proyek</li> <li>Laporan Divisi pelaksana proyek-proyek berbasis masyarakat</li> <li>Laporan Bidang PMR-Relawan</li> </ul>	1 x 1 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun <i>concept note</i> dan proposal;</li> <li>Menyusun kerangka kerja logis dan anggaran proyek;</li> <li>Mengimplementasikan rencana kerja proyek;</li> <li>Menyusun laporan kemajuan proyek;</li> <li>Menyusun laporan akhir proyek.</li> </ul>



No	Indikator	Uraian Indikator	Satuan Pengukuran	Target	Alat Verifikasi	Frekuensi Pelaporan	Rujukan Kegiatan
<b>Output 4.2.3</b>							
Terbentuknya kelompok masyarakat terlatih sebagai Mitra Strategis untuk upaya pengurangan risiko bencana dan pencegahan krisis kesehatan							
100	Jumlah kelompok masyarakat terlatih yang dibina oleh PMI Kab/Kota	<p>Kelompok masyarakat terlatih adalah anggota masyarakat yang memperoleh pelatihan ketrampilan khas Kepalangmerahan, respons bencana serta krisis kesehatan yang akan menjadi ujung-tombak kegiatan PMI berbasis masyarakat.</p> <p><b>Kalkulasi:</b> Jumlah organisasi (kelompok) masyarakat terlatih di Desa/Kelurahan/Komunitas binaan PMI pada periode 2019-2024 yang dilaporkan ke PMI Pusat</p>	Kelompok	Aktual	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan PMI Kab/Kota</li> <li>Laporan Bidang Pelayanan (PB dan Kesehatan)</li> <li>Laporan Bidang PMR-Relawan</li> </ul>	1 x 1 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>Identifikasi wilayah sasaran untuk kegiatan pengurangan risiko bencana dan pencegahan krisis kesehatan berbasis masyarakat</li> <li>Pendekatan dan kerjasama dengan organisasi-organisasi masyarakat yang eksis di wilayah sasaran</li> <li>Membentuk satuan siaga kebencanaan/krisis kesehatan di tingkat masyarakat</li> <li>Introduksi kegiatan pengurangan risiko bencana dan pencegahan krisis kesehatan berbasis masyarakat</li> <li>Melaksanakan VCA, pemetaan risiko, penyusunan rencana aksi, simulasi, mitigasi skala kecil, dll terkait PRB/pencegahan krisis kesehatan</li> <li>Merekrut <i>focal point</i> dan/atau membentuk kelompok masyarakat sebagai mitra strategis PMI</li> </ul>
101	Jumlah komunitas binaan PMI Kab/Kota yang menginisiasi secara mandiri kegiatan pengurangan risiko bencana dan kesehatan	<p>Komunitas Binaan adalah Desa/Kelurahan/Lembaga Pendidikan yang dibina oleh PMI yang melakukan inisiasi kegiatan mandiri</p> <p>Yang berkaitan dengan upaya pengurangan risiko bencana dan kesehatan yang direncanakan dan diimplementasikan dengan menggunakan sumber daya masyarakat sendiri, dikelola oleh masyarakat dan hasilnya digunakan oleh masyarakat itu sendiri.</p> <p><b>Kalkulasi:</b> Cukup jelas</p>	Komunitas	Aktual	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan PMI Kab/Kota</li> <li>Laporan Bidang Pelayanan (PB dan Kesehatan)</li> <li>Laporan Bidang PMR-Relawan</li> </ul>	1 x 1 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pendampingan kegiatan pengurangan risiko bencana dan kesehatan secara mandiri oleh komunitas binaan</li> <li>Memfasilitasi komunitas binaan dalam hubungannya dengan sumber-sumber potensial Pemerintah/stakeholder setempat</li> <li>Mempromosikan kegiatan mandiri komunitas binaan kepada Pemerintah/stakeholder setempat</li> </ul>

No	Indikator	Uraian Indikator	Satuan Pengukuran	Target	Alat Verifikasi	Frekuensi Pelaporan	Rujukan Kegiatan
<b>Outcome 4.3:</b>							
Kualitas dan jangkauan pelayanan sosial yang diberikan oleh PMI kepada masyarakat yang paling membutuhkan meningkat							
102	Jumlah PMI Prov/Kab/Kota yang melaksanakan kegiatan pelayanan sosial	<p>Pelayanan sosial adalah kegiatan sosial kemasyarakatan yang tidak berdiri sendiri, tidak terbatas pada kegiatan psikososial dan atau bakti sosial saja. Kegiatan ini bisa dipadukan dengan materi terkait lainnya. Misalnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Program/kegiatan psikososial untuk anak jalanan, dipadukan dengan kegiatan Pendidikan karakter</li> <li>• Program/kegiatan psikososial bagi kelompok ibu-ibu, dipadukan dengan kegiatan <i>livelihood</i></li> <li>• Program/kegiatan layanan kesehatan, dipadukan dengan edukasi kesehatan</li> </ul> <p>Layanan sosial terpadu diorganisir untuk membantu, memperbaiki kondisi sosial individu atau kelompok yang memerlukan perhatian khusus, antara lain, tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Individu/Keluarga kurang mampu secara ekonomi</li> <li>• Individu/kelompok penyandang masalah sosial</li> <li>• Individu/kelompok penyandang masalah kesehatan</li> <li>• Individu penyandang disabilitas</li> <li>• Kelompok yatim-piatu</li> <li>• Anak Balita</li> <li>• Anak-Anak dari keluarga kurang mampu</li> <li>• KK Perempuan</li> <li>• Kelompok lansia</li> <li>• Individu/kelompok migran tidak berdokumen</li> </ul> <p><b>Kalkulasi:</b> Jumlah Prov/Kab/Kota yang melaksana kegiatan pelayanan sosial terpadu.</p>	Unit	15 Prov, 60 Kab/Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan PMI Prov/Kab/Kota</li> <li>• Laporan Bidang Pelayanan (Kesehatan)</li> </ul>	1 x 1 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan sosial terpadu kepada individu/kelompok yang memerlukan perhatian khusus</li> <li>• Berpartisipasi dalam program-program sosial dan kesehatan masyarakat Pemda setempat</li> <li>• Memfasilitasi individu dan kelompok kurang mampu untuk memperoleh akses pelayanan kesehatan dan sosial</li> <li>• Menyelenggarakan pelayanan ambulans 24 x 7</li> <li>• Membangun sistem rujukan Pelayanan Ambulans PMI dengan RS setempat</li> <li>• Aktivasi Posko sebagai Call Center Pelayanan Ambulans Pelayanan sosial kepada individu bermasalah Migrasi tidak berdokumen, di dalam negeri dan luar negeri (TKI)</li> <li>• PMI Pusat melakukan monitoring kegiatan pelayanan sosial leh PMI Prov/Kab/Kota</li> <li>• Dokumentasi penerima manfaat, menurut jenis layanan sosialnya, dipilah menurut kategori umur dan jender.</li> </ul>
103	Jumlah orang yang dijangkau langsung layanan sosial di PMI Kab/Kota	<p>Adalah individu atau kelompok tertentu yang menerima bantuan, layanan/fasilitas melalui kegiatan terorganisir, antara lain, tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi layanan sosial</li> <li>• Bantuan material</li> <li>• Bakti sosial</li> <li>• Bantuan kacamata optik</li> <li>• Operasi katarak</li> <li>• Khitanan massal</li> </ul> <p>Data KK perlu di konversi menjadi jiwa/orang.</p> <p><b>Kalkulasi:</b> Jumlah penerima manfaat pelayanan sosial yang dilaporkan PMI Kab/Kota dipilah berdasarkan jenis kelamin dan kategori usia, serta orang yang sama tidak dihitung dua kali (<i>double counting</i>).</p>	Orang	Aktual	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan kegiatan PMI Kab/Kota</li> <li>• Laporan Bidang Pelayanan (Kesehatan)</li> </ul>	1 x 1 tahun	

No	Indikator	Uraian Indikator	Satuan Pengukuran	Target	Alat Verifikasi	Frekuensi Pelaporan	Rujukan Kegiatan
<b>Output 4.3.1</b>							
Dokumen panduan/SOP dan perangkat penunjang pelayanan sosial (seperti media KIE, alat peraga, perangkat M&E) tersedia, termutakhirkan, dan digunakan di PMI.							
104	Jumlah perangkat penunjang pelayanan sosial yang diterbitkan oleh PMI Pusat	<p>Perangkat penunjang pelayanan sosial ialah Panduan/SOP dan atau perangkat lainnya yang memuat teknis pelaksanaan pelayanan sosial mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi atau penutupan. Contoh perangkat penunjang pelayanan sosial antara lain media KIE, alat peraga, dan perangkat M&amp;E.</p> <p><b>Kalkulasi:</b> Jumlah perangkat penunjang pelayanan sosial yang diterbitkan oleh PMI Pusat</p>	Dokumen	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen Panduan/ SOP</li> <li>Laporan Bidang Pelayanan (Kesehatan)</li> </ul>	1 x 1 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>Review dan revisi Panduan Pelayanan Sosial PMI</li> <li>Review dan revisi Panduan Pelayanan Psikososial PMI</li> <li>Menyusun SOP untuk kasus Individu/kelompok yang memerlukan perhatian khusus</li> </ul>
<b>Output 4.3.2</b>							
Kegiatan-kegiatan pelayanan sosial dilaksanakan oleh Pegawai/Relawan yang kompeten di PMI semua tingkatan.							
105	Jumlah personil PMI terlatih dalam bidang perawatan keluarga yang dimobilisasi dalam kegiatan pelayanan sosial	<p>Adalah Pegawai/Relawan/PMR PMI yang telah memperoleh pelatihan perawatan keluarga dan dimobilisasi untuk melaksanakan kegiatan pelayanan sosial.</p> <p><b>Kalkulasi:</b> Cukup jelas</p> <p>Seorang personil PMI dihitung sebagai satu orang walaupun dimobilisasi lebih dari satu kali. Pencatatan terpilah berdasarkan jenis kelamin dan kategori usia.</p>	Orang	Aktual	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan kegiatan PMI Kab/Kota</li> <li>Laporan Bidang Pelayanan (Kesehatan)</li> </ul>	1 x 1 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>PMI Pusat menyelenggarakan Pelatihan Pelayanan Sosial kepada Pegawai/Relawan/PMR PMI</li> <li>PMI Pusat memobilisasi tenaga pendamping untuk kegiatan pelayanan sosial yang diinisiasi oleh PMI Kab/Kota</li> </ul>

## TUJUAN STRATEGIS-5

**Mewujudkan PMI yang berfungsi baik, dengan kepemimpinan yang kolektif-kolegial dan berpedoman kuat pada Prinsip-Prinsip Dasar Gerakan Internasional PM/BSM dengan tatakelola organisasi dan Markas yang sinergis dalam pelaksanaan kegiatan, peraturan organisasi, sistem, dan prosedur yang berlaku**

No	Indikator	Uraian Indikator	Satuan Pengukuran	Target	Alat Verifikasi	Frekuensi Pelaporan	Rujukan Kegiatan
<b>Outcome 5.1:</b>							
Kepemimpinan dan tata kelola Organisasi PMI di semua tingkatan dilaksanakan secara konsekuen dengan berpedoman pada Prinsip-prinsip Kepalangmerahan							
106	Jumlah PMI disemua tingkatan yang memenuhi kapasitas organisasi yang berfungsi baik	PMI yang memenuhi kriteria berfungsi baik menurut alat penilaian kapasitas organisasi, meliputi 5 (lima) kapasitas inti , yaitu:  <b>Kalkulasi:</b> Jumlah PMI Pusat/Prov/Kab/Kota dengan yang memenuhi ≥80% kriteria penilaian kapasitas organisasi	Unit	1 PMI Pusat, 34 PMI Provinsi, 68 PMI Kab/Kota	Dokumen hasil penilaian kapasitas organisasi OCAC/BOCA	1 x 2 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penilaian kapasitas organisasi OCAC/BOCA</li> <li>• Melaksanakan review capaian Indikator Kunci Kinerja (KPI)</li> <li>• Tindaklanjut hasil penilaian kapasitas organisasi OCAC/BOCA</li> <li>• Analisis hasil penilaian kapasitas organisasi OCAC,/BOCA</li> <li>• Lokakarya Strategi Dukungan Keberlanjutan Organisasi PMI tidak aktif</li> </ul>

No	Indikator	Uraian Indikator	Satuan Pengukuran	Target	Alat Verifikasi	Frekuensi Pelaporan	Rujukan Kegiatan
<b>Output 5.1.1:</b> AD/ART/PO dan aturan pelaksanaannya serta produk hukum lainnya tersedia dan diimplementasikan di semua tingkatan							
107	Jumlah Peraturan Organisasi yang diterbitkan oleh PMI Pusat mengacu pada AD/ART PMI	<p>Peraturan Organisasi adalah aturan-aturan setingkat di bawah AD/ART yang menjabarkan garis besar tata kelola organisasi PMI dan dapat menjadi acuan penyusunan peraturan PMI Pusat/Provinsi/Kab/Kota yang disesuaikan, seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepengurusan</li> <li>• Kemarkasan, termasuk issue jender dan proteksi</li> <li>• Pelayanan</li> <li>• Sumber Daya Manusia</li> <li>• Tata kelola keuangan</li> <li>• Tata kelola Aset dan Logistik</li> <li>• Kepegawaian, termasuk isu gender dan keberagaman</li> <li>• Perencanaan dan Pelaporan</li> <li>• Kemitraan</li> <li>• Pencitraan</li> </ul> <p><b>Kalkulasi:</b> Jumlah dokumen final terkait dengan ketentuan hukum PMI seperti Peraturan PMI, Peraturan Organisasi dan ketentuan lainnya</p>	Dokumen	24	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen PO yang diterbitkan oleh PMI Pusat;</li> <li>• Laporan Divisi Organisasi PMI Pusat.</li> </ul>	1 x 1 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lokakarya/Rapat Kerja review, revisi Peraturan PMI/Peraturan Organisasi PMI dan ketentuan hukum terkait PMI</li> <li>• Menyusun aturan pelaksanaan dari PO Keanggotaan</li> <li>• Penerbitan Peraturan PMI/Peraturan Organisasi PMI dan ketentuan hukum terkait PMI</li> <li>• Sosialisasi Peraturan PMI/Peraturan Organisasi PMI dan ketentuan hukum terkait PMI</li> <li>• Orientasi Kepalangmerahan</li> <li>• Monitoring implementasi Peraturan Organisasi PMI</li> <li>• Pendampingan teknis penyusunan SK PMI Prov/Kab/Kota yang mengacu pada PO PMI</li> <li>• Penerbitan SK PMI Prov/Kab/Kota</li> </ul>
108	Jumlah PMI Prov/Kab/Kota yang menerbitkan SK mengacu pada PO yang diterbitkan PMI Pusat	<p>Peraturan Organisasi (PO) yang diterbitkan oleh PMI Prov/Kab/Kota yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PMI setempat serta mengacu, sebagian atau keseluruhan, pada produk-produk hukum yang diterbitkan oleh PMI Pusat</p> <p><b>Kalkulasi:</b> Jumlah PMI Prov/Kab/Kota yang menerbitkan SK dengan mengacu pada PO PMI</p>	Unit	Aktual	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen SK yang diterbitkan oleh PMI Prov/Kab/Kota yang mengacu pada PO PMI</li> <li>• Laporan Bidang Organisasi</li> <li>•</li> </ul>	1 x 1 tahun	

No	Indikator	Uraian Indikator	Satuan Pengukuran	Target	Alat Verifikasi	Frekuensi Pelaporan	Rujukan Kegiatan
109	PMI disemua tingkatan melaksanakan Musyawarah setiap 5 (lima) tahun tepat waktu	PMI Pusat/Prov/Kab/Kota yang melaksanakan Musyawarah selambat-lambatnya ≤3 bulan setelah masa bakti Kepengurusan berakhir.  <b>Kalkulasi:</b> Jumlah PMI Prov/Kab/Kota yang melaksanakan Musyawarah pada tahun pelaporan	Unit	200	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan Musyawarah PMI Pusat/Prov/Kab/Kota</li> <li>Laporan Bidang Organisasi</li> </ul>	1 x 1 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan Pra-Musyawarah: konsultasi penyusunan prioritas rencana kerja jangka panjang 5 tahun mengacu pada Renstra 2019-2024</li> <li>Menyusun laporan pertanggungjawaban dan kinerja kepengurusan</li> <li>Melaksanakan Musyawarah</li> <li>Laporan kepada PMI setingkat di atasnya</li> <li>Tindak lanjut paska musyawarah: advokasi sumber-sumber dukungan pembangunan organisasi</li> </ul>
110	PMI disemua tingkatan melaksanakan Musyawarah Kerja tahunan sesuai jadwal yang ditetapkan	PMI Pusat/Prov/Kab/Kota yang melaksanakan Musyawarah Kerja sebelum pengesahan rencana anggaran Pemerintah di Kab/Kota, Provinsi dan Pusat.  <b>Kalkulasi:</b> Cukup jelas	Unit	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan Musyawarah Kerja PMI Pusat/Prov/Kab/Kota</li> <li>Laporan Bidang Organisasi</li> <li>Laporan Tahunan PMI Prov/Kab/Kota</li> </ul>	1 x 1 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan Pra-Musyawarah Kerja, penyusunan prioritas rencana kerja tahunan pada Saptacita 2019-2024</li> <li>Menyusun laporan evaluasi kinerja tahun sebelumnya</li> <li>Melaksanakan Musyawarah Kerja</li> <li>Laporan kepada PMI setingkat di atasnya</li> <li>Tindak lanjut paska Musyawarah Kerja: advokasi sumber-sumber dukungan pembangunan organisasi</li> </ul>

No	Indikator	Uraian Indikator	Satuan Pengukuran	Target	Alat Verifikasi	Frekuensi Pelaporan	Rujukan Kegiatan
111	PMI disemua tingkatan menyelenggarakan orientasi Kepalangmerahan bagi Pengurus	<p>Orientasi Kepalangmerahan adalah orientasi yang diberikan kepada Pengurus (baru) tentang Palang Merah dna organisasi PMI, serta praktik, prosedur dan implementasi peraturan organisasi diberbagai bidang, diantaranya, tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepemimpinan yang berpedoman pada penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Kepalangmerahan</li> <li>• Penerapan Prinsip Dasar Kepalangmerahan dalam situasi norma/kedaruratan atau implementasi kerangka kerja Akses yang lebih aman (<i>Safer Access Framework</i>);</li> <li>• Prosedur layanan pada saat normal dan kedaruratan;</li> <li>• Pembagian tugas dan tanggungjawab Pengurus dan Pegawai dalam arti luas;</li> <li>• Strategi Keberlanjutan Dukungan Organisasi untuk PMI yang tidak aktif (<i>Business Continuity Plan</i>);</li> <li>• Hubungan PMI antar tingkatan (vertikal, horizontal).</li> </ul> <p><b>Kalkulasi:</b> Jumlah PMI Prov/Kab/Kota yang memperoleh orientasi Kepengurusan dari PMI Pusat, IFRC dan ICRC.</p>	Unit	200	Laporan Bidang Organisasi	1 x 1 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembaharuan materi orientasi ORTALA</li> <li>• Pelatihan Fasilitator orientasi ORTALA tingkat nasional</li> <li>• Melaksanakan orientasi ORTALA, kepemimpinan yang efektif dan pengawasan</li> </ul>

No	Indikator	Uraian Indikator	Satuan Pengukuran	Target	Alat Verifikasi	Frekuensi Pelaporan	Rujukan Kegiatan
<b>Output 5.1.2:</b>							
Mekanisme konsultasi reguler antara Pengurus dan Dewan Kehormatan PMI disemua tingkatan berfungsi							
112	Jumlah PMI yang menyelenggarakan pertemuan konsultasi Pengurus dan Dewan Kehormatan setidaknya 1 kali dalam periode Kepengurusan	<p>Adalah PMI Pusat/Prov/Kab/Kota yang menyelenggarakan pertemuan konsultasi Pengurus dan Dewan Kehormatan baik atas inisiatif Pengurus dan atau atas undangan Dewan Kehormatan, yang berfungsi antara lain tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebagai mekanisme komunikasi untuk memastikan Kepemimpinan dan tata kelola organisasi dilaksanakan sesuai dengan Pokok-Pokok Kebijakan PMI;</li> <li>• Sebagai mekanisme untuk berbagi informasi tentang kinerja PMI setempat;</li> <li>• Sebagai mekanisme untuk menggalang dukungan;</li> <li>• Sebagai mekanisme untuk pemecahan masalah.</li> </ul> <p><b>Kalkulasi:</b> Cukup jelas</p>	Unit	35	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undangan pertemuan</li> <li>• Laporan PMI Pusat/Prov/Kab/Kota</li> </ul>	1 x 1 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi PO tentang TUPOKSI Dewan Kehormatan melalui forum Musyawarah Kerja PMI disemua tingkatan.</li> <li>• Sosialisasi mekanisme kegiatan konsultasi Pengurus dan Dewan Kehormatan melalui forum Musyawarah Kerja.PMI disemua tingkatan.</li> <li>• PMI Pusat/Prov/Kab/Kota menyusun jadwal pertemuan konsultasi Pengurus dan Dewan Kehormatan</li> <li>• Dokumentasi kegiatan konsultasi Pengurus dan Dewan Kehormatan</li> </ul>
<b>Output 5.1.3.</b>							
Kegiatan pembinaan berjenjang dalam bidang organisasi dan program dilakukan secara rutin serta sesuai kebutuhan.							
113	Jumlah PMI Prov/Kab/Kota yang menerima kunjungan pembinaan oleh PMI setingkat diatasnya minimal satu kali dalam setahun	<p>Adalah kunjungan pembinaan dari <b>Pengurus setingkat diatasnya</b> saat musyawarah/musyawahar kerja atau kunjungan pembinaan Organisasi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>Laporan pembinaan dibuat oleh PMI setingkat diatasnya yang melakukan kunjungan dapat berupa notulensi dan atau laporan kegiatan.</p> <p><b>Kalkulasi:</b> Cukup jelas</p>	Kunjungan	34 Prov 68 Kab/Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan kunjungan</li> <li>• Notulensi</li> <li>• Laporan bidang terkait.</li> </ul>	1 x 1 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Riview PO Kepengurusan</li> <li>• Menetapkan pembagian tugas Pengurus antar tingkatan</li> <li>• Menetapkan mekanisme monitoring dan evaluasi pembinaan organisasi antar tingkatan</li> <li>• Mengkoordinasikan kunjungan pembinaan (organisasi, teknis program) dengan unit PMI setingkat diatasnya</li> <li>• Mengkoordinasikan kegiatan pendampingan, antar Kab/Kota, antar Provinsi</li> <li>• Mengkoordinasikan kegiatan magang Pegawai Markas, antar Kab/Kota, antar Provinsi</li> </ul>




No	Indikator	Uraian Indikator	Satuan Pengukuran	Target	Alat Verifikasi	Frekuensi Pelaporan	Rujukan Kegiatan
<b>Output 5.1.4:</b>							
Komunikasi dan koordinasi internal, serta antar tingkatan PMI, termasuk lintas Prov/Kab/Kota terlaksana sesuai kerangka acuan yang disepakati							
114	Jumlah forum regional PMI Prov/Kab/Kota yang terbentuk	Forum Regional PMI adalah forum koordinasi dan komunikasi antara beberapa Provinsi atau antar Kab/Kota se-Provinsi yang dibentuk berdasarkan kedekatan geographis, kepentingan bersama, terstruktur yang disepakati dan diketahui/disetujui oleh PMI setingkat di atasnya.  <b>Kalkulasi:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah forum regional antar Provinsi</li> <li>Jumlah PMI Provinsi dengan forum regional antar Kab/Kota se-provinsi</li> </ul>	Forum	6	Laporan Bidang Organisasi	1 x 1 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membentuk forum koordinasi regional antar Kab/Kota dalam satu Provinsi</li> <li>Membentuk forum koordinasi regional antar Provinsi</li> <li>Menyelenggarakan pertemuan regional secara teratur, terjadwal</li> <li>Menetapkan mekanisme monitoring dan evaluasi kerjasama regional</li> <li>Sharing, sosialisasi hasil kerjasama regional</li> <li>Implementasi kerjasama regional (bervariasi)</li> <li>Monitoring kerjasama regional</li> </ul>
115	Jumlah kesepakatan regional yang diimplementasikan	Adalah output kerjasama regional PMI yang ditindaklanjuti bersama dan dilaporkan kemajuan-kemajuannya dalam forum koordinasi.  <b>Kalkulasi:</b> Jumlah dokumen kerjasama regional yang dilaporkan forum-forum regional.	Dokumen	6	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen kesepakatan forum regional</li> <li>Laporan Bidang Organisasi</li> </ul>	1 x 1 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>Implementasi kerjasama regional (bervariasi)</li> <li>Monitoring kerjasama regional</li> </ul>

No	Indikator	Uraian Indikator	Satuan Pengukuran	Target	Alat Verifikasi	Frekuensi Pelaporan	Rujukan Kegiatan
<b>Outcome 5.2:</b>							
Fungsi Kemarkasan berjalan sesuai tugas, pokok dan fungsi terutama aspek manajemen dan administrasi dalam mendukung pelayanan Kepalangmerahan							
116	Jumlah Markas PMI yang memenuhi kriteria manajemen dan administrasi yang berfungsi baik	<p>Markas PMI dengan kriteria manajemen dan administrasi yang berfungsi baik, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Memiliki sistim tatakelola keuangan yang akuntabel</li> <li>Melaksanakan tertib administrasi yang tercatat secara sistimatis, tersimpan baik, dan dilaporkan secara teratur</li> <li>Memiliki tatakelola kepegawaian yang komprehensif</li> <li>Memiliki rencana kerja dengan anggaran untuk mendukung Program, Kegiatan, Pengembangan dan operasional tahunan.</li> <li>Membuat laporan kegiatan dan periodik (bulanan, triwulan, semester, tahunan) secara tepat waktu</li> <li>Memiliki Pegawai tetap dalam jumlah yang memadai.</li> </ul> <p><b>Kalkulasi:</b> Jumlah Markas PMI Pusat/Prov/Kab/Kota yang memenuhi setidaknya 4 kriteria minimal diatas (manajemen dan administrasi yang baik</p>	unit	1 Pusat, 34 Prov 68 kab/Kota	Laporan OCAC PMI Laporan BOCA	1 x 1 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengumpulkan kuestioner OCAC dan BOCA sesuai kriteria untuk Markas berfungsi baik.</li> <li>Menganalisa kuestioner OCAC dan BOCA sesuai kriteria untuk Markas berfungsi baik.</li> <li>Menyusun Laporan hasil analisis penilaian kinerja Markas berdasarkan OCAC dan BOCA.</li> </ul>

No	Indikator	Uraian Indikator	Satuan Pengukuran	Target	Alat Verifikasi	Frekuensi Pelaporan	Rujukan Kegiatan
<b>Output 5.2.1.</b>							
Terlaksananya tatakelola kepegawaian yang menyeluruh dan berorientasi pada pengembangan kompetensi dan kesejahteraan Pegawai							
117	Jumlah Markas PMI Kab/Kota yang memiliki setidaknya ≥4 orang Pegawai tetap dan digaji sesuai UMP/UMK	<p>Pegawai Tetap Markas PMI dengan dokumen dengan komposisi fungsi minimal antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala Markas</li> <li>• Pendukung (Keu, Adm, IT, Log, Humas, dst)</li> <li>• Pelayanan ( PB, Kes, UDD, RS / Klinik)</li> <li>• Pengembangan (Relawan, organisasi, Diklat, Perencanaan)</li> </ul> <p>Pegawai Markas PMI Kab/Kota adalah dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SK pengangkatan yang diterbitkan oleh PMI Kab/Kota</li> <li>• Memiliki Kontrak Kerja atau sejenis.</li> <li>• Uraian tugas yang jelas</li> </ul> <p><b>Kalkulasi:</b> cukup jelas</p>	unit	200	Laporan penilaian kapasitas organisasi BOCA	1 x 1 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penetapan struktur dan Tupoksi unit kerja Markas;</li> <li>• Penetapan uraian tugas dan tanggungjawab Pegawai Markas;</li> <li>• Penetapan mekanisme koordinasi dan pelaporan sesuai Tupoksi unit kerja.</li> </ul>
118	Jumlah markas PMI Provinsi yang memiliki setidaknya ≥6 orang Pegawai tetap dan digaji sesuai UMP/UMK	<p>Pegawai Tetap Markas PMI dengan dokumen dengan komposisi fungsi minimal antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala Markas</li> <li>• Pendukung (Keu, Adm, IT, Log, Humas, dst)</li> <li>• Pelayanan ( PB, Kes, UDD, RS / Klinik)</li> <li>• Pengembangan (Relawan, organisasi, Diklat, Perencanaan)</li> </ul> <p>Pegawai Markas PMI Kab/Kota adalah dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SK pengangkatan yang diterbitkan oleh PMI Kab/Kota</li> <li>• Memiliki Kontrak Kerja atau sejenis.</li> <li>• Uraian tugas yang jelas</li> </ul> <p><b>Kalkulasi:</b> cukup jelas</p>	unit	34	Laporan penilaian kapasitas organisasi BOCA	1 x 1 tahun	

No	Indikator	Uraian Indikator	Satuan Pengukuran	Target	Alat Verifikasi	Frekuensi Pelaporan	Rujukan Kegiatan
119	Jumlah Markas PMI memiliki peraturan dasar tatakelola kepegawaian	<p>Peraturan kepegawaian PMI, antara lain dengan komponen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Status Tenaga kerja</li> <li>• Perekrutan</li> <li>• Perjanjian Kerja</li> <li>• Tata tertib Kerja</li> <li>• Penugasan Khusus</li> <li>• Sistem Penggajian dan pajak Penghasilan</li> <li>• Tunjangan</li> <li>• Kepangkatan</li> <li>• Jaminan kesehatan dan Keselamatan Kerja</li> <li>• Kesejahteraan Pegawai</li> <li>• Cuti</li> <li>• Pembinaan dan pengembangan kapasitas</li> <li>• Mutasi pegawai</li> <li>• Pengharagaan , Larangan dan Sanksi</li> <li>• PHK</li> </ul> <p>Untuk peraturan dasar tatakelola kepegawaian setidaknya memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hak dan Kewajiban Pemberi Kerja</li> <li>• Hak dan Kewajiban Pekerja</li> <li>• Syarat Kerja</li> <li>• Tata tertib Organisasi</li> <li>• Jangka waktu</li> </ul> <p><b>Kalkulasi:</b> Cukup Jelas</p>	unit	1 Pusat 34 Provinsi 68 kab/Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen Aturan Kepegawaian</li> <li>• Laporan bidang kepegawaian</li> </ul>	1 x 1 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan Seleksi dan rekrutment Pegawai Markas sesuai kompetensi yang diperlukan</li> <li>• Menetapkan mekanisme dan prosedur pemberhentian Pegawai dengan mempertimbangkan keberlanjutan operasional Markas</li> <li>• Penetapan disiplin kinerja Pegawai</li> <li>• Menetapkan mekanisme pelaporan issue jender dan proteksi</li> <li>• Menetapkan pola rotasi (promosi, mutasi) Pegawai</li> <li>• Melaksanakan rotasi Pegawai secara berkala</li> <li>• Mengupayakan pelatihan ketrampilan tambahan secara eksternal</li> <li>• Penetapan uraian tugas dan tanggungjawab Pegawai Markas</li> <li>• Melakukan penilaian Kinerja Pegawai</li> <li>• Menetapkan peraturan penugasan untuk tugas-tugas perbantuan ke luar Markas</li> <li>• Melaksanakan monitoring dan penilaian kinerja Pegawai secara berkala</li> </ul>
120	Jumlah Markas PMI yang telah melaksanakan sistim penilaian kinerja Pegawai setiap tahun	<p>Sistim penilaian kerja adalah mekanisme penilaian kinerja Pegawai Markas yang dilakukan oleh pejabat setingkat di atasnya, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perilaku</li> <li>• Hasil (output) pekerjaan</li> </ul> <p><b>Kalkulasi:</b> Cukup jelas</p>	Unit	120	Dokumen penilaian kinerja Pegawai Markas	1 x 1 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan penghargaan atas kinerja Pegawai (material/non-material)</li> <li>• Penyiapan/pra-purna bhakti (pensiun)</li> <li>• Penyediaan layanan purna bhakti</li> <li>• Memperbaharui database Pegawai Markas secara berkala</li> </ul>

No	Indikator	Uraian Indikator	Satuan Pengukuran	Target	Alat Verifikasi	Frekuensi Pelaporan	Rujukan Kegiatan
121	Jumlah Pegawai Markas PMI setidaknya terlatih 1 kali terkait fungsi dukungan dan pengembangan.	<p>Adalah Pegawai Markas PMI yang telah terlatih memperoleh pelatihan/orientasi manajemen sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diklat Jabatan bagi Pegawai &amp; TU Unit Kerja</li> <li>• Diklat bagi kepala Markas</li> <li>• Diklat jabatan bagi Kepala Unit kerja</li> <li>• Diklat jabatan bagi Sub Unit Kerja</li> <li>• Diklat Tim Pendampingan Penguatan markas</li> <li>• Orientasi Kepalang Merahan untuk Pegawai baru</li> </ul> <p><b>Kalkulasi:</b> Cukup jelas</p>	Orang	30 (Pusat), 34 (Prov), 474 (Kab/Kota)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan pelaksanaan Diklat;</li> <li>• Laporan peserta Diklat;</li> <li>• Database pegawai.</li> </ul>	1 x 1 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Analisa kebutuhan dan pemetaan Pegawai Markas memiliki kompetensi manajerial.</li> <li>• Menyelenggarakan pelatihan manajemen Program,</li> <li>• Melaksanakan Diklat pra-jabatan bagi Pegawai/pegawai</li> <li>• Menyelenggarakan pelatihan manajemen kemarkasan</li> <li>• Menyelenggarakan pelatihan kepemimpinan untuk Pegawai Markas.</li> </ul>
122	Jumlah Pegawai Markas PMI yang berkompoten dalam bidang teknis layanan	<p>Adalah Pegawai PMI dengan pengetahuan, praktisi, keterampilan spesialis yang dimobilisasi oleh PMI untuk operasi bencana tingkat Pusat/Prov/Kab/Kota tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spesialis Asesmen</li> <li>• Spesialis PP</li> <li>• Spesialis Medis, Paramedis</li> <li>• Spesialis Shelter</li> <li>• Spesialis WASH</li> <li>• Spesialis Psikososial</li> <li>• Spesialis Manajemen Distribusi</li> <li>• Spesialis Manajemen Logistik</li> <li>• Spesialis PRB</li> <li>• Manajemen data dan Informasi</li> <li>• Lain-lain</li> </ul> <p><b>Kalkulasi:</b> Jumlah Pegawai Markas yang memiliki setidaknya 3 jenis keterampilan.</p>	Orang	30 (Pusat), 34 (Prov), 474 (Kab/Kota)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan pelaksanaan Diklat;</li> <li>• Laporan peserta Diklat;</li> <li>• Database pegawai.</li> </ul>	1 x 1 tahun	
123	Jumlah Markas PMI yang memberikan kontribusi perlindungan sosial	<p>Perlindungan Sosial Pegawai yang dimaksud minimal BPJS ketenagakerjaan dan BPJS kesehatan yang dikontribusikan oleh markas namun dapat diberikan perlindungan Pegawai lain secara proporsional.</p> <p><b>Kalkulasi:</b> Cukup jelas</p>	Unit	1 Pusat, 34 Prov, 150 Kab/Kota.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen kepersertaan BPJS</li> <li>• Laporan Bidang Kepegawaian PMI</li> </ul>	1 x 1 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengikutsertakan pegawai untuk mendapatkan perlindungan sosial</li> <li>• Memasukkan dalam Rencana kerja anggaran untuk perlindungan Sosial</li> <li>• Melaporkan Kepada ke PMI setingkat di atasnya</li> </ul>

No	Indikator	Uraian Indikator	Satuan Pengukuran	Target	Alat Verifikasi	Frekuensi Pelaporan	Rujukan Kegiatan
<b>Output 5.2.2</b>							
Terlaksananya sistim dan tatakelola keuangan yang akuntabel							
124	Jumlah Markas PMI yang menerbitkan laporan keuangan tahunan sesuai standar PSAK 45	Laporan Keuangan standar PSAK 45 (Pedoman Standar Akuntansi Keuangan) adalah pelaporan keuangan untuk Organisasi Nirlaba yang bertujuan untuk menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para penyumbang, anggota organisasi, kreditur, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi organisasi nirlaba. Laporan tahunan sesuai PSAK 45, terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan Posisi Keuangan</li> <li>• Laporan Aktivitas</li> <li>• Laporan Arus Kas</li> </ul> <p><b>Kalkulasi:</b> Cukup jelas</p>	Unit	1 Pusat, 34 Prov, 100 Kab/Kota.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan tahunan keuangan PMI Pusat/Prov/Kab/Kota;</li> <li>• Laporan trwulan keuangan PMI Pusat/Prov/Kab/Kota;</li> <li>• Laporan bulanan keuangan PMI Pusat/Prov/Kab/Kota.</li> <li>• </li> </ul>	1 x 1 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan sistim keuangan PMI disemua tingkatan sesuai standar organisasi nirlaba (PSAK 45)</li> <li>• Pelatihan/Orientasi tatakelola keuangan sesuai standar pertanggungjawaban dana Pemerintah (merujuk pada PP UU Kepalaangmerahan)</li> <li>• Penyusunan laporan keuangan bulanan, triwulan, tahunan</li> <li>• Pendampingan untuk Penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan tahunan organisasi untuk Musyawarah Kerja di daerah.</li> </ul>
125	Jumlah Markas PMI yang telah melakukan audit eksternal setiap tahun	Audit eksternal merupakan pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan secara independen oleh pihak eksternal untuk memeriksa kepatuhan terhadap ketentuan yang ditetapkan. <p><b>Kalkulasi:</b> Cukup jelas</p>	Unit	1 Pusat, 34 Prov, 100 Kab/Kota.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan Audit Eksternal;</li> <li>• Laporan Bagian Keuangan PMI.</li> <li>• </li> </ul>	1 x 1 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentasi, kompilasi bukti-bukti pertanggungjawaban keuangan sesuai periodisasi</li> <li>• Seleksi auditor eksternal</li> <li>• Melaksanakan audit eksternal</li> <li>• Sharing laporan audit eksternal</li> </ul>
126	Jumlah laporan penggunaan donasi yang dipublikasikan kepada masyarakat.	Laporan penggunaan donasi adalah pertanggungjawaban PMI atas penerimaan dan penggunaan donasi mitra/masyarakat yang dipublikasikan kepada masyarakat melalui media massa. <p><b>Kalkulasi:</b> Cukup jelas</p>	Dokumen	Aktual	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan penggunaan donasi PMI;</li> <li>• Dokumen publikasi.</li> </ul>	1 x 1 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan laporan penggunaan donasi (masyarakat, lembaga donor dll)</li> <li>• Sharing, publikasi laporan penggunaan donasi</li> <li>• Pelatihan/orientasi pengelolaan dana kedaruratan donasi dalam negeri/internasional</li> <li>• </li> </ul>

No	Indikator	Uraian Indikator	Satuan Pengukuran	Target	Alat Verifikasi	Frekuensi Pelaporan	Rujukan Kegiatan
<b>Output 5.2.3</b>							
Sistim perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan melembaga							
127	Jumlah produk publikasi SIM PMI yang diterbitkan	Adalah hasil pengolahan data berupa informasi yang disajikan dalam bentuk <i>dashboard</i> , <i>infographis</i> , <i>factsheet</i> , dan <i>flyers</i> yang dapat diakses oleh PMI disemua tingkatan yang sudah terintegrasi dalam SIM PMI.  <b>Kalkulasi:</b> Jenis dan jumlah produk publikasi berdasarkan SIM yang diterbitkan PMI setiap tahun	Produk Publikasi	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>SIM PMI;</li> <li>Laporan publikasi SIM (<i>dashboard</i>, <i>infographic</i>, <i>factsheet</i>, dll);</li> <li>Laporan Unit Kerja Terkait.</li> </ul>	1 x 1 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan rencana penerbitan topik-topik informasi;</li> <li>Seleksi informasi sesuai topik</li> <li>Penyajian informasi secara periodik;</li> <li>Distribusi informasi sesuai yang diperlukan PMI Prov/Kab/Kota;</li> <li>Analisis umpan-balik.</li> </ul>
128	PMI disemua tingkatan memiliki rencana kerja tahunan sesuai panduan	Rencana kerja setiap tahun sesuai Panduan Perencanaan dan Pelaporan adalah rencana kerja yang menggunakan format yang ditetapkan dan memuat informasi: <ul style="list-style-type: none"> <li>Tujuan Strategis</li> <li>Outcome, indikator, dan targetnya</li> <li>Output, indikator, dan targetnya</li> <li>Kegiatan-kegiatan</li> <li>Jumlah anggaran per kegiatan dan kategorinya</li> </ul> <b>Kalkulasi:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Markas PMI Prov/Kab/Kota mengirimkan dokumen perencanaan tahunan kepada PMI Pusat;</li> <li>PMI Pusat menyusun rencana rencana kerja tahunan.</li> </ul>	Unit	255	Dokumen rencana kerja yang disahkan pada forum Musyawarah Kerja	1 x 1 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan rencana kerja tahunan PMI</li> <li>Monitoring implementasi rencana kerja tahunan PMI</li> <li>Penyusunan laporan periodik (bulanan, triwulan, dan semester);</li> <li>Penyusunan laporan kemajuan tahunan organisasi untuk Musyawarah Kerja;</li> <li>Pelatihan/orientasi PMER;</li> <li>Bimbingan teknis PMER antar tingkatan;</li> <li>Melaksanakan penilaian Kapasitas Organisasi/PMER ;</li> <li>Lokakarya pengembangan sistim PMER PMI.</li> </ul>

No	Indikator	Uraian Indikator	Satuan Pengukuran	Target	Alat Verifikasi	Frekuensi Pelaporan	Rujukan Kegiatan
129	PMI Kab/Kota mengirim laporan semester tepat waktu	<p>Laporan semester adalah laporan yang memuat 9 indikator dasar kinerja Markas, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah PMR Mula/Madya/Wira aktif selama 6 bulan terakhir</li> <li>Jumlah KSR/TSR aktif selama 6 bulan terakhir</li> <li>Jumlah DDS aktif yang mendonor setidaknya 2 kali dalam 6 bulan terakhir</li> <li>Jumlah Pegawai markas yang digaji</li> <li>Jumlah penerima manfaat layanan darurat bencana</li> <li>Jumlah penerima manfaat layanan non-darurat bencana</li> <li>Jumlah pendapatan per semester</li> <li>Jumlah belanja per semester</li> <li>Jumlah kecamatan binaan PMI Kab/Kota</li> </ul> <p>Tepat waktu ialah laporan semester-1 (Januari-Juni) dan laporan semester-2 (Juli-Desember) dikirimkan ke PMI Pusat paling lambat sebelum akhir periode pelaporan per semester.</p> <p><b>Kalkulasi:</b> Jumlah PMI Kab/Kota yang terdokumentasi dalam modul Laporan Semester</p>	Unit	237	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan semester 1 dan 2 setiap tahun berjalan</li> <li>Modul Laporan Semester</li> </ul>	2 x 1 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan rencana kerja tahunan PMI</li> <li>Monitoring implementasi rencana kerja tahunan PMI</li> <li>Penyusunan laporan periodik (bulanan, triwulan, dan semester);</li> <li>Penyusunan laporan kemajuan tahunan organisasi untuk Musyawarah Kerja;</li> <li>Pelatihan/orientasi PMER;</li> <li>Bimbingan teknis PMER antar tingkatan;</li> <li>Melaksanakan penilaian Kapasitas Organisasi/PMER ;</li> <li>Lokakarya pengembangan sistim PMER PMI.</li> </ul>
130	PMI disemua tingkatan menerbitkan laporan tahunan	<p>Laporan Tahunan PMI sesuai Panduan Perencanaan dan Pelaporan setidaknya terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ringkasan Eksekutif</li> <li>Analisis capaian program (target vs aktual)</li> <li>Informasi Keuangan</li> </ul> <p><b>Kalkulasi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Markas PMI Prov/Kab/Kota yang mengirimkan laporan realisasi rencana kerja ke PMI Pusat;</li> <li>PMI Pusat menyusun laporan tahunan realisasi rencana kerja.</li> </ul>	Unit	255	Dokumen laporan tahunan realisasi rencana kerja	1 x 1 tahun	



No	Indikator	Uraian Indikator	Satuan Pengukuran	Target	Alat Verifikasi	Frekuensi Pelaporan	Rujukan Kegiatan
131	PMI disemua tingkatan melaksanakan monitoring sesuai kaidah PMER	<p>Adalah monitoring proses, hasil, serapan dana, umpan-balik dan penerima manfaat, atas <b>kegiatan spesifik (pilihan tertentu) atau proyek</b> (bantuan donor, dana mandiri), yang dilaksanakan dengan mengikuti kaidah-kaidah standar, tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fokus pada kebutuhan informasi</li> <li>• Sistimatis berdasarkan indikator</li> <li>• Mendeteksi perubahan yang tidak terduga</li> <li>• Tepat waktu</li> <li>• Partisipatif, melibatkan stakeholder</li> <li>• Hasil monitoring, dilaporkan dan dibagikan</li> </ul> <p><b>Kalkulasi:</b> Jumlah Markas PMI yang melakukan monitoring atas kegiatan spesifik tertentu atau proyek.</p>	Unit	Aktual	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan monitoring kegiatan spesifik atau proyek;</li> <li>• Laporan Biro Perencanaan dan Litbang.</li> </ul>	1 x 1 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identifikasi kegiatan spesifik/proyek yang diimplementasikan oleh PMI Pusat/Prov/Kab/Kota;</li> <li>• PMI Pusat menyediakan <b>bantuan teknis</b> untuk kegiatan pra-sewaktu-paska monitoring (pelatihan, penyediaan alat monitoring, bimtek/pendampingan, pelaporan).</li> </ul>
132	Jumlah program/proyek PMI yang melaksanakan evaluasi sesuai kaidah PMER	<p>Evaluasi adalah penilaian sistimatis dan obyektif atas <b>kegiatan spesifik (pilihan tertentu) atau proyek</b> (bantuan donor, dana mandiri), yang dilaksanakan pada paruh-waktu atau setelah kegiatan/proyek selesai, dengan kriteria tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Relevansi (kesesuaian dengan kebutuhan penerima manfaat atau kepentingan organisasi)</li> <li>• Efisiensi (penggunaan sumber daya)</li> <li>• Efektifitas (capaian tujuan jangka pendek, menengah)</li> <li>• Keberlanjutan (tindak lanjut setelah intervensi selesai)</li> <li>• Penilaian dampak (perubahan yang terjadi)</li> </ul> <p><b>Kalkulasi</b> Cukup jelas.</p>	Program/ Proyek	Aktual	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan evaluasi kegiatan spesifik atau proyek</li> <li>• Laporan Biro Perencanaan dan Litbang PMI Pusat</li> </ul>	1 x 3 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identifikasi kegiatan spesifik/proyek yang diimplementasikan oleh PMI Pusat/Prov/Kab/Kota;</li> <li>• PMI Pusat menyediakan bantuan teknis untuk kegiatan pra-sewaktu-paska evaluasi (pelatihan, penyediaan alat evaluasi, bimtek/pendampingan, pelaporan).</li> </ul>

No	Indikator	Uraian Indikator	Satuan Pengukuran	Target	Alat Verifikasi	Frekuensi Pelaporan	Rujukan Kegiatan
<b>Output 5.2.4</b>							
Hasil kajian dan pengembangan organisasi digunakan oleh PMI di semua tingkatan							
133	Jumlah Markas PMI yang menggunakan hasil kajian untuk pengembangan organisasi dan kelembagaan	Hasil kajian adalah temuan tertentu yang diterapkan dalam proses pengembangan organisasi dan kelembagaan.  <b>Kalkulasi:</b> Jumlah laporan hasil kajian yang diterapkan dalam pengembangan organisasi dan kelembagaan oleh Markas PMI.	Unit	Aktual	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan perkembangan manajemen respon;</li> <li>Laporan Biro Perencanaan dan Litbang.</li> </ul>	1 x 3 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>Identifikasi topik-topik kajian yang relevan untuk pengembangan kinerja PMI secara nasional</li> <li>Melaksanakan kajian pengembangan organisasi</li> <li>Diseminasi hasil kajian (semua topik kajian) PMI Pusat kepada PMI Prov/Kab/Kota</li> <li>PMI Pusat memfasilitasi Lokakarya topik kajian yang hendak dikembangkan oleh PMI Prov/Kab/Kota</li> <li>PMI Pusat memfasilitasi bantuan teknis untuk implementasi topik kajian yang hendak dikembangkan oleh PMI Prov/Kab/Kota</li> </ul>
134	Jumlah Panduan, SOP, perangkat penunjang kajian dan pengembangan tersedia di PMI Pusat	Perangkat penunjang kajian adalah panduan, alat, metode penelitian dan survei yang dikembangkan oleh PMI Pusat secara terus-menerus sesuai kebutuhan kajian PMI.  <b>Kalkulasi:</b> Cukup jelas	Dokumen	2	Laporan Biro Perencanaan dan Litbang	1 x 3 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>Finalisasi buku referensi kajian dan survei;</li> <li>Menyusun SOP kajian dan survei;</li> <li>Menyiapkan alat-alat kajian, survei yang esensial;</li> <li>Mengembangkan alat-alat kajian sesuai topik studi kasus.</li> </ul>

No	Indikator	Uraian Indikator	Satuan Pengukuran	Target	Alat Verifikasi	Frekuensi Pelaporan	Rujukan Kegiatan
135	Jumlah Personil PMI dengan kompetensi kajian yang dilibatkan dalam kegiatan kajian dan pengembangan	<p>Adalah Personil PMI yang memperoleh pelatihan terkait kajian dan pengembangan yang tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Metodologi</li> <li>• Membuat alat pengumpulan data</li> <li>• Pengelolaan data</li> <li>• Analisis data</li> <li>• Penyajian hasil analisis data (data visualisasi)</li> </ul> <p><b>Kalkulasi:</b> Jumlah Pegawai PMI terlatih yang dilibatkan dalam kegiatan kajian PMI.</p> <p>Seorang Pegawai dihitung sebagai satu orang walaupun dimobilisasi lebih dari satu kali. Pencatatan terpilah berdasarkan jenis kelamin dan kategori usia.</p>	Orang	25	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Database alumni pelatihan;</li> <li>• Laporan Biro Perencanaan dan Litbang.</li> </ul>	1 x 1 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelatihan kajian (kualitatif dan kuantitatif);</li> <li>• Melaksanakan asesmen pra-kajian;</li> <li>• Melaksanakan kajian;</li> <li>• Menyusun laporan kajian;</li> <li>• Diseminasi hasil kajian.</li> </ul>
136	Jumlah PMI Prov/Kab/Kota sasaran studi kasus kajian pengembangan organisasi	<p>Adalah PMI Prov/Kab/Kota dengan keunggulan tertentu (<i>success story</i>) yang menjadi sasaran studi kasus kajian pengembangan organisasi</p> <p><b>Kalkulasi:</b> Cukup jelas</p>	Unit	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan monitoring dan evaluasi;</li> <li>• Laporan Biro Perencanaan dan Litbang.</li> </ul>	1 x 1 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identifikasi dan analisis pra-kajian untuk topik yang menjadi perhatian PMI secara umum;</li> <li>• Identifikasi PMI Prov/Kab/Kota yang relevan dengan analisa pra-kajian sebagai sasaran studi kasus;</li> <li>• Koordinasi dan kerjasama dengan PMI Prov/Kab/Kota yang menjadi sasaran studi kasus topik kajian.</li> </ul>

No	Indikator	Uraian Indikator	Satuan Pengukuran	Target	Alat Verifikasi	Frekuensi Pelaporan	Rujukan Kegiatan
137	Jumlah dokumen hasil kajian yang dipublikasikan di internal PMI	<p>Hasil kajian yang dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada Pengurus PMI dan dipublikasikan melalui sarana media PMI serta forum-forum pertemuan PMI. Hasil kajian memuat antara lain tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kajian proyek (<i>baseline</i>, <i>endline</i>, KAP, dan VCA)</li> <li>• Monitoring dan evaluasi proyek;</li> <li>• Studi kasus pengembangan organisasi, kinerja layanan.</li> <li>• Hasil <i>lessons-learned workshop</i>.</li> </ul> <p>Dokumen hasil kajian tidak terbatas dalam bentuk laporan, dapat berupa <i>fact sheet</i>, infografis, buletin, dan lainnya.</p> <p><b>Kalkulasi:</b> Cukup jelas</p>	Dokumen	Aktual	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan monitoring dan evaluasi;</li> <li>• Laporan Biro Perencanaan dan Litbang.</li> </ul>	1 x 1 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentasi, kompilasi data dan informasi yang terkait kajian;</li> <li>• Menerbitkan publikasi dengan topik-topik terkait pengembangan organisasi secara umum;</li> <li>• Diseminasi hasil kajian PMI.</li> </ul>
138	Jumlah Markas PMI yang memberikan umpan balik temuan hasil kajian PMI	<p>Tanggapan unit kerja di Markas Pusat dan atau PMI Prov/Kab/Kota tentang temuan Litbang baik yang disampaikan pada sesi tanya jawab dan diskusi saat diseminasi, kotak dialog di laman PMI dan atau email</p> <p><b>Kalkulasi:</b> Cukup jelas</p>	Unit	Aktual	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompilasi tanya jawab publikasi hasil litbang</li> <li>• Daftar unit kerja/PMI Prov/Kab/Kota yang memberikan umpan balik temuan litbang</li> </ul>	1 x 1 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Analisis umpan balik</li> <li>• Menindaklanjuti hasil umpan balik.</li> </ul>

No	Indikator	Uraian Indikator	Satuan Pengukuran	Target	Alat Verifikasi	Frekuensi Pelaporan	Rujukan Kegiatan
<b>Outcome 5.3</b>							
Manajemen dan pengembangan sistem pendidikan-pelatihan PMI berfungsi dengan baik							
139	Jumlah dokumen analisis kebutuhan diklat secara nasional diperbaharui setiap tahun	<p>Analisis kebutuhan Diklat PMI adalah analisis kesenjangan antara jumlah dan jenis SDM PMI terlatih yang tersedia dibandingkan dengan jumlah dan jenis SDM terlatih yang dibutuhkan oleh layanan, yang terdiri dari informasi tentang pelatih/fasilitator, jenis pelatihan, dan alumni pelatihan.</p> <p><b>Kalkulasi:</b> Cukup jelas</p>	Dokumen	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peta analisis kebutuhan diklat</li> <li>Laporan PUSDIKLAT PMI</li> </ul>	1 x 1 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumentasi, kompilasi laporan Diklat secara nasional</li> <li>Penyusunan database hasil Diklat secara nasional</li> <li>Pemetaan dan analisis kebutuhan Diklat</li> </ul>
<b>Output 5.3.1</b>							
Pelatih dan fasilitator dilatih, dan disertifikasi oleh PMI maupun badan yang berwenang, tersedia secara memadai untuk dimobilisasi di berbagai pelatihan.							
140	Jumlah pelatih bersertifikat yang dimobilisasi PMI setiap tahun	<p>Adalah Pelatih/Fasilitator dengan sertifikasi yang diterbitkan oleh PMI dan atau badan yang berwenang, dimobilisasi untuk melatih atau memfasilitasi dalam berbagai pelatihan.</p> <p>Data mobilisasi pelatih dilaporkan kepada PMI setingkat di atasnya secara berkala.</p> <p><b>Kalkulasi:</b> Cukup jelas</p> <p>Seorang pelatih dihitung sebagai satu orang walaupun dimobilisasi lebih dari satu kali. Pencatatan terpilah berdasarkan jenis kelamin dan kategori usia.</p>	Orang	50	Database mobilisasi pelatih	1 x 1 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun agenda tahunan Diklat PMI disemua tingkatan</li> <li>Monitoring kesiapan dan ketersediaan Pelatih/Fasilitator</li> <li>Mobilisasi Pelatih/Fasilitator</li> <li>Laporan hasil pelatihan</li> </ul>

No	Indikator	Uraian Indikator	Satuan Pengukuran	Target	Alat Verifikasi	Frekuensi Pelaporan	Rujukan Kegiatan
<b>Output 5.3.2</b>							
Kurikulum pelatihan nasional yang dibutuhkan oleh internal/eksternal dimutakhirkan oleh PMI dan diakreditasi oleh lembaga nasional (Kemenkes, Kemenakertrans, BNPB).							
141	% kurikulum pelatihan termuktakhirkan	Kurikulum diperbaharui sesuai dengan perkembangan pelayanan PMI dan disahkan.  <b>Kalkulasi:</b> Jumlah kurikulum pelatihan yang diperbaharui berbanding dengan jumlah kurikulum yang dibutuhkan (n= 54)	Persentase	50%	Dokumen kurikulum pelatihan	1 x 1 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemuktahiran kurikulum pelatihan</li> <li>• Monitoring pelatihan yang menggunakan kurikulum termuktakhirkan</li> <li>• Laporan hasil pelatihan</li> </ul>
142	Jumlah kurikulum yang memperoleh akreditasi dari lembaga yang berkompeten	Adalah kurikulum pelatihan yang memenuhi kriteria kelulusan akreditasi oleh lembaga nasional seperti Kemenkes, Kemenakertrans, dan BNPB.  <b>Kalkulasi:</b> Cukup jelas	Dokumen	2	Laporan akreditasi	1 x 1 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Review dan penyempurnaan kurikulum Pelatihan untuk proses akreditasi</li> <li>• Seleksi kurikulum yang memenuhi kriteria untuk akreditasi</li> <li>• Pengajuan proses akreditasi</li> <li>• Standarisasi proses pelatihan untuk kurikulum terakreditasi</li> </ul>
<b>Output 5.3.3</b>							
Pelatihan-pelatihan PMI dikelola sesuai dengan panduan manajemen pelatihan							
143	Laporan pelatihan PMI Prov/Kab/Kota sesuai Juknis manajemen pelatihan	Adalah laporan pelatihan internal dan eksternal yang sesuai panduan akreditasi dan manajemen pelatihan, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perencanaan/analisis diklat seperti: surat pemberitahuan pelatihan, kerangka acuan, jadwal, kurikulum, form monitoring dan evaluasi pelatihan, pelaksana pelatihan (pelatih, panitia, pengendali diklat).</li> <li>• Pelaksanaan diklat seperti : surat permohonan akreditasi pelatihan, laporan pelatihan, laporan pelatih, biodata peserta.</li> <li>• Pemantauan pelatihan seperti : bentuk evaluasi reaksi, pembelajar, evaluasi harian, evaluasi akhir, standard minimum kelulusan, nilai akhir, RKTL.</li> </ul> <b>Kalkulasi:</b> Jumlah laporan pelatihan PMI Pusat/Prov/Kab/Kota sesuai dengan panduan akreditasi manajemen pelatihan	Dokumen	100	Laporan penyelenggaraan pelatihan	1 x 1 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mobilisasi Fasilitator/Pelatih sesuai prosedur</li> <li>• Seleksi peserta Pelatihan sesuai kriteria yang diperlukan</li> <li>• Penyiapan materi Pelatihan, alat belajar-mengajar, tempat pelatihan dll</li> <li>• Melaksanakan pelatihan sesuai Kerangka Acuan Pelatihan</li> <li>• Menyusun laporan Pelatihan sesuai Panduan</li> <li>• Memberikan umpan-balik atas laporan Pelatihan</li> </ul>

No	Indikator	Uraian Indikator	Satuan Pengukuran	Target	Alat Verifikasi	Frekuensi Pelaporan	Rujukan Kegiatan
<b>Output 5.3.4</b>							
<b>Standar Kerja Kompetensi Nasional Indonesia (SKKNI) di bidang layanan kemanusiaan merujuk pada perundang-undangan Kepalangmerahan tersedia dan diimplementasikan</b>							
144	Jumlah Diklat/LSP/TUK Layanan Kemanusiaan berbasis SKKNI yang diselenggarakan oleh PMI	SKKNI adalah Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan.  <b>Kalkulasi:</b> Jumlah penyelenggaraan sertifikasi/Diklat PMI menggunakan kurikulum yang merujuk pada struktur SKKNI	<i>Event</i>	Aktual	Laporan Pusdiklat PMI	1 x 1 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembentukan tim LSP PMI</li> <li>• Pengembangan dokumen mutu dan skema sertifikasi.</li> <li>• Konsultasi dengan BNSP.</li> <li>• Pengembangan dokumen SKKNI.</li> <li>• Penyesuaian kurikulum Diklat ke-PM-an yang relevan dengan SKKNI</li> <li>• Sosialisasi kurikulum Diklat ke-PM-an berbasis SKKNI</li> <li>• Konsultasi pra-Diklat berbasis SKKNI</li> <li>• Pra dan Konvensi pengesahan dokumen SKKNI.</li> <li>• Pelaksanaan Diklat berbasis SKKNI</li> </ul>

## TUJUAN STRATEGIS-6

**Meningkatkan kapasitas PMI di semua tingkatan dalam mengelola infrastruktur material dasar (sarana-prasarana) untuk mendukung kegiatan operasional dan pelayanan**

No	Indikator	Uraian Indikator	Satuan Pengukuran	Target	Alat Verifikasi	Frekuensi Pelaporan	Rujukan Kegiatan
<b>Outcome 6.1</b>							
Sarana prasarana dasar pendukung kegiatan operasional dan pelayanan (seperti markas, alat-alat kerja dan komunikasi, kendaraan operasional, gudang) tersedia melalui proses pengadaan, pemeliharaan dan pengelolaan yang baik.							
145	% PMI Prov/Kab/Kota dengan ketersediaan sarana prasarana dasar pendukung kegiatan operasional dan pelayanan.	<p>Adalah Markas PMI yang memiliki sarana-parasarana pendukung minimal untuk operasional Markas dan pelayanan namun tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Markas dengan hak guna pakai / sewa</li> <li>• Fungsi Pusdatin 24 jam</li> <li>• Memiliki Kendaraan operasional untuk transportasi</li> <li>• Memiliki Ruang penyimpanan untuk Gudang</li> <li>• Memiliki perlengkapan kantor</li> <li>• Memiliki Perlengkapan dasar Komunikasi (telp, memiliki jaringan internet markas);</li> <li>• Peralatan standar layanan lapangan (perlengkapan penampungan, peralatan DU, peralatan PP/Evakuasi, APD)</li> </ul> <p><b>Kalkulasi:</b> Jumlah Markas PMI Prov/Kab/Kota yang memenuhi kriteria per uraian indikator, berbanding dengan total Markas PMI Prov/Kab/Kota</p>	Persentase	≥50%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan penilaian kapasitas organisasi (OCAC/BOCA/PER);</li> <li>• Laporan Aset.</li> </ul>	1 x 1 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan penilaian kapasitas organisasi/sarana-prasarana dengan kuestioner alat penilaian kapasitas organisasi (OCAC/BOCA/PER);</li> <li>• Melaksanakan pendataan Aset tahunan kepada PMI disemua tingkatan.</li> </ul>



No	Indikator	Uraian Indikator	Satuan Pengukuran	Target	Alat Verifikasi	Frekuensi Pelaporan	Rujukan Kegiatan
<b>Output 6.1.1</b>							
Tersedianya sarana prasarana Markas untuk mendukung kegiatan rutin							
146	PMI Prov/Kab/Kota memiliki setidaknya tiga jenis sarana prasarana dasar operasional Markas.	<p>Sarana prasarana dasar operasional markas, tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meja, kursi, lemari/rak</li> <li>• Komputer dengan internet</li> <li>• Telepon, Fax</li> <li>• Radio Komunikasi (tetap/mobile)</li> <li>• Kendaraan operasional roda empat</li> <li>• Kendaraan operasional roda dua</li> <li>• Ruang setara tempat penampungan barang</li> </ul> <p><b>Kalkulasi:</b> Jumlah Markas PMI Kab/Kota yang memiliki setidaknya 3 jenis dari daftar sarana-prasarana tersebut diatas</p>	Unit	100	Daftar inventaris PMI Kab/Kota	1 x 1 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan sarana pokok Markas (Gedung) yang memenuhi prinsip-prinsip Keamanan dan Keselematan</li> <li>• Penyediaan sarana kerja [furniture, perlengkapan kantor, alat Komunikasi (telepon, fax, internet)]</li> <li>• Penyediaan sarana operasional (kendaraan roda-4/2, angkutan barang)</li> <li>• Penyediaan tempat penampungan barang</li> <li>• Pemeliharaan sarana-prasarana Markas</li> </ul>
147	Jumlah markas PMI memiliki Pusdatin yang berfungsi.	<p>Adalah PMI Prov/Kab/Kota yang mengoperasikan Posko 24/7 dengan kelengkapan minimal antara lain, tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Radio komunikasi (stationer/portable/), yang berizin</li> <li>• Radio komunikasi (mobile ), yang berizin</li> <li>• Telepon &amp; fax</li> <li>• Komputer dan</li> <li>• Jaringan Internat markas</li> <li>• Data kontak person (internal dan eksternal)</li> <li>• Data daerah rawan bencana</li> <li>• Data kejadian bencana/konflik/krisis kesehatan</li> </ul> <p><b>Kalkulasi:</b> Markas PMI Prov/Kab/Kota memiliki Pusdatin yang beroperasi 24/7 dengan setidaknya 5 item kelengkapan dari daftar tersebut diatas.</p>	Unit	100	Laporan Pusdatin PMI	1 x 1 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan sarana Pudatin 24/7</li> <li>• Penugasan rotasi Relawan untuk siaga Pusdatin</li> <li>• Apel radio Komunikasi</li> <li>• Monitoring situasi kedaruratan</li> <li>• Menerbitkan laporan situasi</li> </ul>
148	Jumlah Pusdatin Markas PMI yang melaporkan kejadian bencana	<p>Adalah Pusdatin yang melaporkan kejadian awal kejadian bencana dan laporan perkembangan bencana yang diperbaharui (<i>update</i>) yang dilaporkan ke Pusdatin setingkat diatasnya.</p> <p><b>Kalkulasi:</b> Cukup jelas</p>	Unit	100	Laporan Pusdatin PMI	1 x 1 tahun	

No	Indikator	Uraian Indikator	Satuan Pengukuran	Target	Alat Verifikasi	Frekuensi Pelaporan	Rujukan Kegiatan																							
<b>Output 6.1.2</b>																														
Sistim logistik bantuan kemanusiaan berfungsi sesuai SOP mekanisme dukungan regional/zonasi																														
149	Jumlah Gudang PMI yang memiliki persediaan minimum jenis barang bantuan prioritas	<p>Gudang zonasi/provinsi yang dimaksud adalah untuk mobilisasi bantuan logistik operasi bencana melalui mekanisme dukungan regional/zonasi.</p> <p>Persediaan minimum jenis barang bantuan prioritas, antara lain, tidak terbatas pada:</p> <table border="1" data-bbox="495 382 911 615"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Items</th> <th colspan="2">Gudang</th> </tr> <tr> <th>Regional</th> <th>Zonasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Family Kits (unit)</td> <td>2000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Hygine Kits (unit)</td> <td>2000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Terpauline (pcs)</td> <td>2000</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>Selimut (pcs)</td> <td>10000</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>Tandon air</td> <td>100</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kantong mayat (pcs)</td> <td></td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Kalkulasi:</b> Cukup jelas</p>	Items	Gudang		Regional	Zonasi	Family Kits (unit)	2000		Hygine Kits (unit)	2000		Terpauline (pcs)	2000	200	Selimut (pcs)	10000	200	Tandon air	100		Kantong mayat (pcs)		100	Unit	16	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan Stok Periodik</li> <li>Laporan konsolidasi Stok Gudang</li> </ul>	1 x 1 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan pengadaan barang dan jasa secara transparan dan akuntabel.</li> <li>Penyediaan stok barang bantuan prioritas untuk Gudang Strategis (Regional/Zonasi)</li> <li>Melaksanakan tertib administrasi gudang sesuai panduan</li> <li>Mengirimkan laporan Stock secara periodik kepada PMI.</li> <li>Melaksanakan pemeliharaan gudang sesuai panduan</li> <li>Melaksanakan pelatihan Logistik (manajemen gudang dan transport/armada) untuk Pegawai gudang strategis.</li> </ul>
Items	Gudang																													
	Regional	Zonasi																												
Family Kits (unit)	2000																													
Hygine Kits (unit)	2000																													
Terpauline (pcs)	2000	200																												
Selimut (pcs)	10000	200																												
Tandon air	100																													
Kantong mayat (pcs)		100																												
150	Jumlah operasi kedaruratan PMI yang mendapatkan dukungan barang bantuan dari gudang regional/Zonasi	<p>Operasi kedaruratan PMI adalah kegiatan tanggap darurat bencana, krisis kesehatan dan krisis kemanusiaan lainnya yang memperoleh dukungan bantuan logistik PMI Pusat.</p> <p>Pasokan dari gudang PMI adalah jenis dan jumlah items barang yang didistribusikan dari gudang regional/zonasi provinsi dukungan Barang dari PMI Pusat.</p> <p><b>Kalkulasi:</b> Semua operasi kedaruratan yang memperoleh pasokan barang bantuan dari gudang strategis PMI.</p>	Event	Aktual	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan Bidang Sarana dan Prasarana;</li> <li>Laporan Bidang Pelayanan (PB dan Kesehatan)</li> </ul>	1 x 1 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>Merumuskan sistim mobilisasi barang bantuan menurut mekanisme dukungan regional dan zonasi</li> <li>Melaksanakan distribusi barang untuk operasi bencana</li> <li>Membangun sistim distribusi barang per local outlet (khusus untuk fase darurat) dengan pemasok air minum dan makanan siap saji yang memiliki Jaringan pemasaran luas/<i>nation-wide</i></li> <li>Mengupayakan perjanjian Pra-Bencana dengan jasa angkutan laut/udara potensial, pemasok barang, distributor air minum kemasan dan makanan siap saji</li> <li>Melaksanakan simulasi mobilisasi barang bantuan menurut mekanisme dukungan regional/zonasi, distribusi per <i>local outlet</i></li> </ul>																							

No	Indikator	Uraian Indikator	Satuan Pengukuran	Target	Alat Verifikasi	Frekuensi Pelaporan	Rujukan Kegiatan
<b>Output 6.1.3</b>							
Tersedianya sarana prasarana dan perangkat pendukung layanan kebencanaan, krisis kesehatan dan krisis kemanusiaan lainnya yang berfungsi baik dan memenuhi standar akuntabilitas.							
151	Jumlah alat utama sistim kedaruratan yang dimobilisasi untuk mendukung operasi bencana	<p>Alat utama sistim (ALUTSIS) pendukung operasi kedaruratan, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Armada truk tanki air</li> <li>• Armada truk ringan</li> <li>• Kendaraan multi fungsi (MPV)</li> <li>• Kendaraan ambulans</li> <li>• Perahu karet evakuasi</li> <li>• Set peralatan PP korban massal</li> <li>• Set peralatan APD Satgana</li> <li>• Set peralatan WASH/penjernih air</li> <li>• Set peralatan WASH/toilet darurat</li> <li>• Set peralatan RS lapangan</li> <li>• Set peralatan IT-Telekom darurat</li> <li>• Set Gudang lapangan (rubhall)</li> <li>• Set peralatan kerja (perkakas) lapangan</li> </ul> <p><b>Kalkulasi:</b> Jumlah ALUTSIS Kedaruratan yang dimobilisasi untuk mendukung operasi bencana selama tahun berjalan, terdiri dari unit atau set ALUTSIS diatas.</p>	unit/set	Aktual	Laporan bidang Sarana & Prasarana	1 x 1 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi prosedur dan mekanisme mobilisasi/demobilisasi ALUTSIS kedaruratan</li> <li>• Mengupayakan perjanjian Pra-Bencana untuk mobilisasi dengan jasa angkutan laut/udara potensial</li> <li>• Asesmen untuk akses masuk mobilisasi peralatan yang akan digunakan dalam mendukung operasi baik laut/darat/udara</li> </ul>

No	Indikator	Uraian Indikator	Satuan Pengukuran	Target	Alat Verifikasi	Frekuensi Pelaporan	Rujukan Kegiatan
152	PMI Provinsi memiliki setidaknya lima alat pendukung operasional pelayanan darurat	<p>PMI Provinsi yang memiliki peralatan standar pelayanan kedaruratan yang dapat mendukung kebutuhan operasional Tim Respon bencana, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlengkapan DU lengkap untuk 500 orang</li> <li>• Perlengkapan PP (untuk Individu atau Tim)</li> <li>• Perlengkapan Evakuasi korban Korban (ambulans, tandu)</li> <li>• Perlengkapan keamanan dan keselamatan kerja (pelampung, masker, kacamata debu, helmet, sarung tangan, jas hujan)</li> <li>• Tenda Penampungan sementara + alat kelengkapannya</li> <li>• Alat-alat lapangan (Pacul, Sekop, Palu, Tali-temali)</li> <li>• Truck Pengangkut (apabila belum memiliki dimungkinkan dengan pra-perjanjian sewa)</li> <li>• Kendaraan Operasional untuk personil.</li> <li>• Unit ambulans gadar/transportasi yang sesuai dengan panduan pelayanan ambulans PMI</li> </ul> <p><b>Kalkulasi:</b> Jumlah Markas PMI Provinsi yang memiliki 5 items dari daftar peralatan standar PB diatas.</p>	Unit	16	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan penilaian kapasitas organisasi (BOCA/PER);</li> <li>• Laporan Aset.</li> </ul>	1 x 1 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengupayakan perjanjian Pra-Bencana untuk jasa angkutan laut/darat potensial</li> <li>• Penyediaan stok barang bantuan prioritas</li> <li>• Membangun kapasitas untuk pengelolaan gudang</li> <li>• Pelaporan stok barang dan aset</li> </ul>
153	PMI Kabupaten/Kota memiliki setidaknya tiga jenis perlengkapan tim pelayanan darurat	<p>PMI Kabupaten/Kota yang memiliki peralatan standar pelayanan kedaruratan yang dapat mendukung kebutuhan operasional Tim Respon bencana, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlengkapan DU lengkap untuk 500 orang</li> <li>• Perlengkapan PP (untuk Individu atau Tim)</li> <li>• Perlengkapan Evakuasi korban Korban ( ambulans, tandu)</li> <li>• Perlengkapan keamanan dan keselamatan kerja (pelampung, masker, kacamata debu, helmet, sarung tangan, jas hujan)</li> <li>• Tenda Penampungan sementara + alat kelengkapannya</li> <li>• Alat-alat lapangan (Pacul, Sekop, Palu, Tali-temali)</li> <li>• Truk Pengangkut (apabila belum memiliki dimungkinkan dengan pra-perjanjian sewa)</li> <li>• Kendaraan Operasional untuk personil.</li> <li>• Unit ambulans gadar/transportasi yang sesuai dengan panduan pelayanan ambulans PMI</li> </ul> <p><b>Kalkulasi:</b> Jumlah Markas PMI Kab/Kota yang memiliki 3 items dari daftar peralatan standar PB diatas.</p>	Unit	150	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan penilaian kapasitas organisasi (BOCA/PER);</li> <li>• Laporan Aset.</li> </ul>	1 x 1 tahun	

No	Indikator	Uraian Indikator	Satuan Pengukuran	Target	Alat Verifikasi	Frekuensi Pelaporan	Rujukan Kegiatan
<b>Output 6.1.4:</b>							
Sarana-prasarana Diklat milik PMI tumbuh dan berkembang							
154	Jumlah PMI Prov/Kab/Kota dengan sarana-prasarana Diklat PMI yang memenuhi standar minimum fasilitas diklat	<p>Standar fasilitas minimal sarana-prasarana Diklat antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gedung diklat (ruang belajar/in door, akomodasi, area kegiatan luar ruang/out door)</li> <li>• Ruang setara kelas dengan kapasitas 30 orang</li> <li>• Media peraga pelatihan (cetak, audio visual)</li> <li>• Furnitures (kantor, kelas, ruang akomodasi)</li> <li>• Perlengkapan kelas, media belajar</li> <li>• Perlengkapan kantor (computer, printer, mesin tik)</li> <li>• Perlengkapan recording (camera, handy-cam)</li> <li>• Memiliki rencana pengembangan jangka panjang (bila dirancang untuk sumber pendapatan)</li> <li>• Memiliki status hukum (terpisah dari Markas)</li> </ul> <p><b>Kalkulasi:</b> Cukup jelas</p>	Unit	7	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan Bidang Diklat PMI;</li> <li>• Laporan Aset.</li> </ul>	1 x 1 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Renovasi sarana dasar untuk Diklat</li> <li>• Pengadaan furnitur, media belajar-mengajar dan peralatan esensial lainnya</li> <li>• Membentuk tim pengelola sarana-prasarana Diklat</li> <li>• Membangun sistim dokumentasi administratif, tatakelola pendapatan/pengeluaran dan kegiatan</li> <li>• Membuat media promosi untuk pemasaran</li> <li>• Membuat laporan kemajuan untuk pengembangan lebih lanjut</li> </ul>

No	Indikator	Uraian Indikator	Satuan Pengukuran	Target	Alat Verifikasi	Frekuensi Pelaporan	Rujukan Kegiatan
<b>Outcome 6.2</b>							
Teknologi informasi dan Komunikasi (TIK) PMI disemua tingkatan tersedia dan dikelola dengan baik							
155	Jumlah institusi PMI yang menggunakan alamat email resmi (@pmi.or.id) dalam mengakses SIM PMI	<p>Institusi PMI adalah Markas PMI Pusat/Prov/Kab/Kota, UDD Pusat/Prov/Kab/Kota , termasuk UPT PMI telah menggunakan alamat email resmi (@pmi.or.id) dalam mengakses SIM PMI.</p> <p><b>Kalkulasi:</b> Cukup jelas</p>	Jumlah	120	Laporan Bagian IT- Telekom PMI	1 x 1 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun kebijakan penggunaan internet korporasi (<i>email dan messaging</i>);</li> <li>Install <i>software</i> email resmi PMI untuk PMI Prov/Kab/Kota;</li> <li>Mengoperasikan jaringan internet korporasi PMI;</li> <li>Monitoring penggunaan jaringan internet korporasi;</li> <li>Membuat mekanisme umpan-balik untuk efektifitas jaringan.</li> </ul>
156	PMI Prov/Kab/Kota mengakses sistim informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi	<p>Sistim Informasi Manajemen (SIM) berbasis teknologi informatika adalah kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mentransformasikan data (mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis, menyajikan) dalam bentuk informasi yang spesifik untuk mengidentifikasi suatu masalah, menyelesaikan masalah, dan mengevaluasi kinerja semua tahapan manajemen termasuk perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan.</p> <p><b>Kalkulasi:</b> Jumlah PMI Prov/Kab/Kota yang setidaknya sudah memiliki akses terhadap 2 modul pada sistim informasi manajemen PMI yang dikelola oleh PMI Pusat.</p>	Unit	508	<ul style="list-style-type: none"> <li>SIM PMI</li> <li>Laporan Bidang TIK</li> </ul>	1 x 2 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun kebijakan nasional untuk digitalisasi sistim informasi manajemen PMI;</li> <li>Lokakarya sistim informasi manajemen (SIM) PMI dan digitalisasi informasi Kepalaangmerahan;</li> <li>Disain teknis dan tatakelola SIM PMI;</li> <li>Bekerjasama dengan unit kerja terkait dalam pengembangan teknis SIM PMI (penyiapan modul, uji coba, <i>launching</i>);</li> <li>Pelatihan dan orientasi penggunaan SIM PMI bersama dengan unit kerja terkait;</li> <li>Pengembangan sistim dokumentasi dan pengarsipan.</li> </ul>

No	Indikator	Uraian Indikator	Satuan Pengukuran	Target	Alat Verifikasi	Frekuensi Pelaporan	Rujukan Kegiatan
<b>Output 6.2.1</b>							
Kapasitas Markas PMI disemua tingkatan dalam tatakelola informasi meningkat							
157	Jumlah PMI yang memiliki perangkat dasar IT	PMI memiliki perangkat dasar pendukung IT yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komputer yang menggunakan perangkat lunak yang berlisensi atau menggunakan perangkat lunak OpenSource</li> <li>• Printer</li> <li>• Jaringan Internet Markas</li> </ul>	Unit	508	Lap Biro IT	1 tahun	
158	Personil Markas PMI semua tingkatan yang memperoleh pelatihan teknologi informasi dan komunikasi	Pelatihan teknologi informatika adalah pelatihan yang diinisiasi oleh PMI Pusat, antara lain, <b>tidak terbatas</b> pada: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelatihan penggunaan SIM PMI</li> <li>• Pelatihan teknis lainnya untuk mendukung pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi</li> </ul> <b>Kalkulasi:</b> Jumlah personil Markas yang memperoleh pelatihan TI tingkat nasional.	Orang	50	Laporan Bidang IT- Telekom PMI	1 x 1 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PMI Pusat menyelenggarakan pelatihan tatakelola data dan informasi</li> <li>• Pelatihan teknis lainnya untuk mendukung pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi</li> <li>• Pengembangan aplikasi dan produk IT lainnya</li> </ul>

## TUJUAN STRATEGIS-7

**Meningkatkan kemandirian organisasi PMI secara berkesinambungan melalui kerjasama strategis disemua tingkatan dan inisiatif Pengembangan Sumber Daya yang inovatif**

No	Indikator	Uraian Indikator	Satuan Pengukuran	Target	Alat Verifikasi	Frekuensi Pelaporan	Rujukan Kegiatan
<b>Outcome 7.1:</b>							
Hubungan kerjasama PMI di semua tingkatan dengan pemerintah, sektor swasta, mitra gerakan, organisasi, lembaga donor nasional dan internasional, masyarakat umum serta pemangku kepentingan lainnya menguat di semua tingkatan.							
159	Jumlah mitra yang memiliki kerjasama formal lebih dari satu tahun dengan PMI	<p>Mitra PMI adalah lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah, sektor publik, swasta, mitra gerakan, lembaga donor dan pemangku kepentingan lainnya yang bekerjasama dengan PMI berdasarkan kesepakatan tertulis dan berkelanjutan.</p> <p><b>Kalkulasi:</b> Jumlah Mitra yang memiliki kerjasama formal dengan PMI durasi lebih dari satu tahun.</p>	Institusi	Aktual	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen kerjasama tertulis</li> <li>• Laporan Bidang Hukum</li> </ul>	1 x 1 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan jejaring Kerjasama dengan Mitra secara formal</li> <li>• Memelihara standar kualitas, akuntabilitas dan transparansi bidang yang dikerjasamakan</li> <li>• Membuat laporan kemajuan secara periodik</li> </ul>



No	Indikator	Uraian Indikator	Satuan Pengukuran	Target	Alat Verifikasi	Frekuensi Pelaporan	Rujukan Kegiatan
<b>Output 7.1.1.</b>							
Kesepakatan tertulis antara PMI dengan pemerintah, sektor publik, swasta, mitra gerakan, organisasi, lembaga donor nasional dan internasional, serta pemangku kepentingan lainnya tersedia dan diimplementasikan di PMI semua tingkatan.							
160	Jumlah kesepakatan formal yang telah ditandatangani oleh PMI Pusat/Prov/Kab/Kota bersama Mitra	Kesepakatan tertulis dan kesepakatan lain-lain yang setara adalah kesepakatan formal yang menjadi landasan hukum kerjasama PMI dan Mitra, yang memuat ketentuan atau rujukan isi kerjasama, antara lain, tidak terbatas pada: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tujuan kerjasama</li> <li>• Ruang lingkup kerjasama</li> <li>• Durasi kerjasama</li> <li>• Pembagian tugas dan tanggungjawab para pihak</li> <li>• Monitoring, evaluasi dan pelaporan</li> <li>• Anggaran</li> </ul> <b>Kalkulasi:</b> Total kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh PMI Pusat/Prov/Kab/Kota	Dokumen	6	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen kerjasama tertulis</li> <li>• Laporan Bidang Pengembangan Sumber Daya &amp; Kerjasama</li> <li>• Laporan Bidang Hukum</li> </ul>	1 x 1 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membina dan membangun kerjasama strategis dengan lembaga-lembaga Pemerintah dan Non-Pemerintah</li> <li>• Membangun strategi kerjasama yang berkelanjutan dengan Mitra Gerakan</li> <li>• PMI Pusat menyediakan layanan hukum untuk proses kerjasama PMI Prov/Kab/Kota</li> </ul>
161	Jumlah PMI yang mengirim laporan kerjasama Mitra PMI	Laporan dimaksud dikirimkan kepada PMI setingkat di atasnya dan kepada Mitra. <b>Kalkulasi:</b> Cukup jelas	Unit	5	Laporan hasil kerjasama PMI-Mitra	1 x 1 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat laporan kemajuan secara periodik kepada Mitra dan stakeholder</li> <li>• Menyusun laporan Akhir Kerjasama dengan Mitra</li> </ul>
162	%PMI Provinsi yang melaporkan penerimaan donasi dalam satu tahun	Cukup jelas <b>Kalkulasi:</b> Jumlah PMI Provinsi yang melaporkan total penerimaan dana donasi dalam satu tahun berbanding dengan total PMI Provinsi se-Indonesia	Persentase	10%	Laporan PMI Provinsi	1 x 1 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PMI Pusat dan Provinsi mengadvokasi Pemerintah Provinsi dan DPRD tingkat-I untuk akses dana bantuan</li> <li>• PMI Provinsi mengkompilasi laporan semester-1 dan 2 (informasi penerimaan) dari PMI Kab/Kota sesuai jadwal</li> <li>• Mengisi kuesioner penilaian kapasitas Organisasi.</li> </ul>
163	%PMI Kab/Kota yang melaporkan penerimaan dana tahunan dari Pemerintah	Cukup jelas <b>Kalkulasi:</b> Jumlah PMI Kab/Kota yang melaporkan total penerimaan dana dari Pemerintah dalam satu tahun berbanding dengan total PMI Kab/Kota se-Indonesia	Persentase	Aktual	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan semester-2 PMI Kab/Kota;</li> <li>• Laporan penilaian kapasitas organisasi</li> </ul>	1 x 1 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PMI Provinsi dan PMI Kab/Kota mengadvokasi Pemerintah Kab/Kota dan DPRD tingkat-II untuk akses dana bantuan</li> <li>• Menyusun laporan semester-1 dan 2 tepat waktu</li> <li>• Mengisi kuesioner penilaian kapasitas organisasi</li> </ul>

No	Indikator	Uraian Indikator	Satuan Pengukuran	Target	Alat Verifikasi	Frekuensi Pelaporan	Rujukan Kegiatan
<b>Output 7.1.2.</b>							
Terlaksananya inisiatif penggalangan Dana masyarakat untuk mendukung kegiatan kemanusiaan PM							
164	Jumlah PMI Kab/Kota yang melaksanakan dan melaporkan kegiatan Bulan Dana	Adalah kegiatan pengumpulan dana masyarakat dengan izin dari lembaga Pemerintah yang berwenang dan dilaksanakan dan dilaporkan pada periode tertentu saja baik kepada internal, PMI setingkat di atasnya dan eksternal (misal: Pemerintah).  <b>Kalkulasi:</b> Cukup jelas	Unit	118	Laporan Bulan Dana PMI Kab/Kota	1 x 1 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>PMI Pusat Memfasilitasi perizinan untuk pelaksanaan Bulan Dana bagi PMI se Indonesia</li> <li>PMI Prov &amp; kab/kota menindak lanjuti perizinan Bulan Dana di daerah</li> <li>Menyelenggarakan event, promosi dan inisiatif lainnya untuk mendukung Bulan Dana</li> <li>Laporan Bulan Dana kepada PMI setingkat di atasnya</li> <li>Melaporkan pelaksanaan Bulan dana ke pada Pemerintah terkait.</li> </ul>
165	Jumlah PMI Prov/Kab/Kota dan Pusat melaporkan kegiatan penggalangan dana	Laporan penggalangan dana diluar bulan dana adalah direkapitulasi PMI pada setiap event penggalangan dana, baik bersumber dari individu/kelompok individu, lembaga usaha/korporasi, lembaga donor dan lain-lain yang atau melalui Bulan dana selanjutnya dipublikasi ke masyarakat melalui laporan atau media massa.  <b>Kalkulasi:</b> Jumlah PMI yang mengirim laporan kegiatan dan hasil penggalangan dana.	Unit	Aktual	Laporan hasil penggalangan dana PMI Pusat/Prov/Kab/Kota	1 x 1 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyelenggarakan event, promosi dan inisiatif lainnya untuk mendukung Pengalangan dana</li> <li>Membuat laporan kemajuan realisasi donasi secara periodic kepada pihak Donor</li> <li>Menyusun laporan final realisasi donasi yang dilaporkan kepada Donor dan dipublikasikan kepada masyarakat umum.</li> </ul>

No	Indikator	Uraian Indikator	Satuan Pengukuran	Target	Alat Verifikasi	Frekuensi Pelaporan	Rujukan Kegiatan
<b>Outcome 7.2</b>							
Kapasitas pengembangan sumber daya dalam rangka menggalang partisipasi mitra dan masyarakat untuk mendukung keberlangsungan program meningkat							
166	Jumlah Markas PMI dengan inisiatif diversifikasi sumber pendapatan	<p>Inisiatif diversifikasi sumber pendapatan adalah berbagai upaya PMI Pusat/Prov/Kab/Kota untuk meningkatkan pendapatan non pemerintah yang tidak terikat, antara lain dan tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Promosi kegiatan kepalangmerahan</li> <li>• Pendirian unit usaha dengan status hukum terpisah</li> <li>• Komersialisasi sarana-prasarana</li> <li>• Jasa pelatihan khas ke-PM-an</li> <li>• Kerjasama strategis</li> <li>• Donasi online</li> <li>• Kegiatan innovative lainnya</li> </ul> <p><b>Kalkulasi:</b> Cukup Jelas</p>	Unit	1 Pusat, 34 Prov, 34 Kab/Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan PMI Pusat Prov/ Kab/Kota</li> <li>• Laporan Bidang Pengembangan Sumber Daya dan Kerjasama</li> </ul>	1 x 1 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerbitkan produk-produk promosi dan publikasi tentang kegiatan PMI (bencana, non-bencana)</li> <li>• Memanfaatkan media mitra untuk penggalangan dana</li> <li>• Melibatkan donor potensial dalam kegiatan kebencanaan</li> <li>• Monitoring dana hasil donasi masyarakat untuk kegiatan PMI di semua tingkatan</li> <li>• Mempromosikan dan memutakhirkan konten Donasi Online PMI.</li> <li>• Mengupayakan inovasi, terobosan, variasi baru dalam upaya penggalangan dana</li> <li>• Memfasilitasi PMI Prov/Kab/Kota dengan inisiatif diversifikasi pendapatan</li> <li>• Dokumentasi dan kompilasi data dan informasi kegiatan diversifikasi sumber pendapatan/ inisiatif Pengembangan Sumber Daya PMI Prov/ Kab/ Kota</li> <li>• Monitoring kegiatan Pengembangan Sumber Daya PMI Prov/ Kab/ Kota</li> </ul>

No	Indikator	Uraian Indikator	Satuan Pengukuran	Target	Alat Verifikasi	Frekuensi Pelaporan	Rujukan Kegiatan
<b>Output 7.2.1</b>							
Strategi peningkatan kapasitas Pengembangan Sumber Daya tersedia dan diimplementasikan oleh PMI di semua tingkatan							
167	Jumlah Pegawai Markas PMI yang memperoleh peningkatan kapasitas terkait bidang PSD	Adalah Pegawai Markas PMI yang memperoleh Pelatihan manajemen usaha yang difasilitasi oleh PMI Pusat, meliputi topik-topik, antara lain, tidak terbatas pada: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengalangan dana</li> <li>• Kemitraan</li> <li>• Unit Usaha</li> </ul> <b>Kalkulasi:</b> Cukup jelas	Orang	80	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan Bidang Pengembangan Sumber Daya dan Kerjasama</li> <li>• Laporan Pusdiklat PMI</li> </ul>	1 x 1 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PMI Pusat, kerjasama dengan lembaga yang kompeten untuk menyelenggarakan pelatihan manajemen usaha</li> <li>• PMI Prov/Kab/Kota berinisiatif melaksanakan pelatihan-pelatihan manajemen usaha secara mandiri</li> </ul>
168	Jumlah stakeholders Potensial PMI yang terdata dalam database PMI	Stakeholders Potensial adalah yang memiliki peluang untuk memberikan donasi. Stakeholder tersebut terdata masuk dalam data base untuk pengembangan inisiatif diversifikasi sumber pendapatan, jejaring, komunikasi, koordinasi, konsultasi dan kerjasama pengembangan usaha, tidak terbatas pada: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Masyarakat umum</li> <li>• Lembaga Pemerintah</li> <li>• Lembaga usaha/korporasi potensial</li> <li>• Lembaga usaha berbasis online</li> <li>• Donatur lokal</li> <li>• Pasar potensial yaitu sasaran produk usaha, segmen produk informasi</li> </ul> <b>Kalkulasi:</b> Jumlah stakeholders tingkat lokal dan nasional yang terdata dalam <i>database</i> PMI	Unit	Aktual	Database Donor (Potensial)	1 x 1 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membina kerjasama strategis untuk pengembangan usaha dan promosi/pemasaran</li> <li>• Memfasilitasi inisiatif diversifikasi sumber pendapatan yang inovatif</li> <li>• Sharing laporan kegiatan Pengembangan Sumber Daya PMI kepada stakeholders</li> </ul>

No	Indikator	Uraian Indikator	Satuan Pengukuran	Target	Alat Verifikasi	Frekuensi Pelaporan	Rujukan Kegiatan
169	Jumlah pendapatan hasil penggalangan dana melalui donasi online PMI Pusat	Donasi adalah sarana penggalangan dana berbasis web dengan sasaran masyarakat umum yang mengakses web PMI <a href="http://www.pmi.or.id">www.pmi.or.id</a> dan <a href="http://www.donasi.pmi.or.id">www.donasi.pmi.or.id</a>  <b>Kalkulasi:</b> Cukup jelas.	Angka	Aktual	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan Bagian Keuangan PMI</li> <li>Laporan Bagian Pengembangan Sumber Daya dan Kerjasama PMI</li> </ul>	1 x 1 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun kebijakan Donasi Online terkoneksi dengan system keuangan</li> <li>Mensosialisasikan Kebijakan Donasi Online</li> <li>Finalisasi Tatakelola Donasi</li> <li>Modifikasi, update tampilan web donasi online PMI</li> <li>Memperbaharui pesan-pesan kunci, narasi donasi online secara periodic, kerjasama dengan Humas PMI semua tingkatan</li> <li>Mekanisme umpan-balik kepada donatur</li> <li>Analisis tren pendapatan dari donasi online</li> </ul>

No	Indikator	Uraian Indikator	Satuan Pengukuran	Target	Alat Verifikasi	Frekuensi Pelaporan	Rujukan Kegiatan
<b>Output 7.2.2</b>							
Inisiatif Pengembangan Sumber Daya yang inovatif terdokumentasi, didiseminasikan dan direplikasi/duplikasi oleh unit PMI lainnya							
170	Jumlah inisiatif Pengembangan Sumber Daya yang inovatif disosialisasikan oleh PMI	<p>Inisiatif Pengembangan Sumber Daya yang inovatif adalah berbagai upaya untuk menciptakan landasan, sumber daya, ruang, peluang untuk memelihara keberlanjutan program dan ketersediaan dana, antara lain tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Membangun akseptabilitas organisasi melalui kegiatan sosialisasi, promosi, membina jejaring</li> <li>Membangun akses yang tetap terhadap sumber-sumber Pemerintah melalui advokasi, integrasi dengan program Pemda, kerjasama strategis</li> <li>Kreasi/inovasi yang atraktif untuk menggalang dukungan berupa partisipasi masyarakat, sumber daya masyarakat (dana, sarpras, fasilitasi, koneksi dll)</li> </ul> <p><b>Kalkulasi:</b> Jumlah inisiatif Pengembangan Sumber Daya inovatif yang dilaporkan PMI Prov/Kab/Kota kepada Divisi Pengembangan Sumber Daya &amp; Kerjasama PMI Pusat</p>	Angka	34	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan PMI Prov/Kab/Kota</li> <li>Laporan Divisi Pengembangan Sumber Daya &amp; Kerjasama PMI Pusat</li> </ul>	1 x 1 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mempromosikan kewirausahaan</li> <li>Monitoring dokumentasi kegiatan Pengembangan Sumber Daya PMI Prov/Kab/Kota yang eksis</li> <li>Menerbitkan bulletin informasi tentang kegiatan Pengembangan Sumber Daya PMI Prov/Kab/Kota yang eksis</li> </ul>

No	Indikator	Uraian Indikator	Satuan Pengukuran	Target	Alat Verifikasi	Frekuensi Pelaporan	Rujukan Kegiatan
<b>Output 7.2.3</b>							
Tersedianya mekanisme berbagi pengalaman inisiatif Pengembangan Sumber Daya							
171	Jumlah kunjungan bimbingan teknis Pengembangan Sumber Daya yang dikelola oleh PMI	<p>Kunjungan bimbingan teknis adalah upaya membangun kapasitas Pengembangan Sumber Daya PMI Prov/Kab/Kota dengan kegiatan, antara lain tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendampingan tata kelola inisiatif diversifikasi sumber dana</li> <li>• Fasilitasi hubungan dengan Mitra lokal</li> </ul> <p><b>Kalkulasi:</b> Cukup jelas</p>	Angka	10	Laporan Bidang Pengembangan Sumber Daya dan Kerjasama	1 x 1 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Analisa kebutuhan pendampingan, bimtek untuk PMI Prov/Kab/Kota yang hendak mengembangkan inisiatif Pengembangan Sumber Daya</li> <li>• Memfasilitasi pendampingan, bimtek untuk personil Pengembangan Sumber Daya PMI Prov/Kab/Kota yang hendak mengembangkan inisiatif Pengembangan Sumber Daya</li> </ul>
172	Jumlah kunjungan studi banding yang didokumentasikan oleh PMI Pusat	<p>Kunjungan antar PMI Prov/Kab/Kota dengan pembelajaran yang tercatat dan disosialisasikan oleh Bidang Pengembangan Sumber Daya dan Kerjasama PMI Pusat.</p> <p><b>Kalkulasi:</b> Cukup jelas</p>	Angka	Aktual	Laporan Kunjungan	1 x 1 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mempromosikan PMI Prov/Kab/Kota dengan keunggulan Pengembangan Sumber Daya sebagai tempat kunjungan pembelajaran/studi banding</li> <li>• Membuat profil PMI Prov/Kab/Kota dengan keunggulan Pengembangan Sumber Daya</li> <li>• Memfasilitasi kunjungan studi banding</li> </ul>

**Markas Pusat Palang Merah Indonesia**

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 96, Jakarta  
12790 - Indonesia

Telp. +62 21 7992325,

Fax. +62 21 7995188

Email: [pmi@pmi.or.id](mailto:pmi@pmi.or.id)

Website: [www.pmi.or.id](http://www.pmi.or.id)



**Palang  
Merah  
Indonesia**